

Maslathif Dwi Purnomo

**THE POWER OF LANGUAGE
(KUASA BAHASA)**

Dalam Dimensi Sosial, Politik, Budaya dan Pendidikan

Maslathif Dwi Purnomo

THE POWER OF LANGUAGE (KUASA BAHASA)

Dalam Dimensi Sosial, Politik, Budaya dan Pendidikan

Editor:
Faisal Riza

Kata Pengantar:

Prof. H. Amrin Saragih, MA., Ph.D

*Ketua Program Studi Doktor Linguistik Terapan Bahasa Inggris
Pasca Sarjana Universitas Negeri Medan*

THE POWER OF LANGUAGE

(KUASA BAHASA)

Dalam Dimensi Sosial, Politik, Budaya dan Pendidikan

copyright©2017

All rights reserved

hak cipta dilindungi oleh undang-undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun, tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Penulis

Maslathif Dwi Purnomo

Editor:

Faisal Riza

Desain:

Khafid

xi + 152 hlm; 14 x 20,5 cm

ISBN : 978-602-1290-46-0

Cetakan Pertama, 2017

Diterbitkan oleh:

Naila Pustaka

Kemutug 32 Ring Road Selatan

Banguntapan – Bantul – Yogyakarta 55191

Telp. 081217163820 HP. 081555788548

Email: naila.pustaka@gmail.com



PERSEMBAHAN



Kupersembahkan Karya Tulis ini kepada:

1. Bapakku H. Asmuly dan Ibuku Hj. Siti Masrifah. Do'a dan keikhlasan merakalah aku ada sampai hari ini
2. Mertuaku H. Syafi'i dan Hj. Sriyanah. Do'a dan dukungan merekalah kami sekeluarga mampu menjalani semuanya.
3. Istriku tercinta, terkasih dan tersayang **MUZDALIFAH, S.Pd** yang selalu mendampingi dalam suka maupun duka, membuatkanku kopi yang nikmat guna penyelesaian karyaku ini
4. Putraku yang hebat dan cerdas **MASFAHAD MAULANA AL-KAUTSARI**, yang sekarang sudah berumur 5 Tahun, sudah kelas TK B dan selalu punya banyak inovasi yang berkualitas dan luar biasa diusianya yang baru seumur itu..

5. Putriku yang Cerdas dan hebat **MAS IZZAH AISYAH RIZKIYYAH**, yang sekarang baru berumur 2 Tahun, sungguh Putri yang amat sangat cantik jelita, sedap dipandang mata, dan selalu ceria dengan berbagai aktifitas yang membuatku bahagia.



PRAKATA PENULIS



Alhamdulillahirobbil 'Alamin saya haturkan kehadiran Allah SWT. Yang telah memberikan kekuatan kepada saya untuk dapat menulis berbagai topik tentang bahasa sehingga bisa saya wujudkan menjadi kumpulan karya tulis yang selanjutnya disebut dengan buku ini. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Rosulullah Muhammad SAW. Semoga dengan berhidmat kepadanya saya dan kita semua tetap mampu memegang teguh ajarannya sampai akhir hayat nanti.

Sebagai seorang akademisi, saya ingin terus berkarya dengan memproduksi tulisan-tulisan khususnya terkait dengan bidang ilmu yang saya tekuni yakni Bahasa (Linguistik). Karena bagi saya harta yang sangat berharga adalah karya tulis yang akan dibaca dan dikritisi oleh orang lain sehingga menjadi acuan dan sumber bagi perkembangan ilmu pengetahuan berikutnya. Suatu penghargaan yang luar biasa bagi saya jika banyak orang yang mau membaca hasil karya saya

ini dan memberikan saran, pendapat dan tentunya kritik secara luas demi perbaikan tulisan-tulisan saya dikemudian hari. Dan tentunya semua itu akan menjadi motivasi tersendiri bagi saya untuk terus berkarya dimasa yang akan datang.

Mendalami ilmu Bahasa bagi saya merupakan suatu kewajiban, karena bahasa tidak hanya dipandang sebatas alat untuk berkomunikasi saja, akan tetapi lebih luas Bahasa mampu menjadi sumber dan pendorong pembentukan sebuah tindakan, yang kemudian dari tindakan itu berubah menjadi kebiasaan sesuai lokasi (Field), Pelaku (Tenor) dan Kondisi atau keadaan (Mode), selanjutnya Sebagai kontinyuitas dari kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan di Masyarakat maka selanjutnya akan terbentuk sebuah Budaya, dan pada akhirnya kekuatan Budaya itulah yang akan menjadi sebuah identitas atau ideologi bagi sebuah komunitas berbahasa.

Dalam buku ini, saya ingin mengajak pembaca untuk melirik sedikit namun pasti kepada ranah Kuasa bahasa dalam dimensi Sosial, Politik, Budaya serta Pendidikan dewasa ini di Negara yang kita cintai bersama ini. Saya yakin bahwa Ilmu Bahasa tentu saja tidak dapat dipisahkan dari komunitas sosial, karena diwilayah sosiallah Bahasa bisa berdayaguna dan bermanfaat. Segala sesuatu tindakan sosial tentu tidak lepas dari Bahasa sebagai instrumennya, karena sebagai instrumen Bahasa selalu lunak untuk digunakan menyesuaikan kepentingan-kepentingan yang

terkandung dalam peristiwa sosial. Dalam konteks ini Bahasa bisa menjadi penentu keberhasilan seseorang, menjadi piranti dan penyelamat bagi keinginan pemakainya serta menjadi *kartu As* bagi segala bentuk keinginan dan tujuan. Oleh karenanya nuansa positif dan negatif pun akan diperoleh oleh Bahasa tergantung seperti apa dan bagaimana pengguna memanfaatkan bahasa.

Dari dimensi Politik, Bahasa berperan sangat signifikan. Tujuan politik dapat saja menemukan dermaga untuk belabuhnya manakala Bahasa yang digunakan tepat dan sesuai dengan kaidah. Akan tetapi sebaliknya, tujuan politik dapat saja menemui jalan buntu dan gagal secara total jika pilihan bahasa yang digunakan tidak tepat dan keluar dari jalurnya. Oleh karenanya sudah bisa dipastikan kehati-hatian penggunaan bahasa dalam dimensi politik mutlak perlu diperhatikan oleh seorang politikus, sehingga ia tidak akan terjerembab kedalam lubang dari hasil penggunaan bahasanya dalam dimensi politik.

Dalam ranah Budaya, Bahasa betul-betul memiliki kuasa yang maha dahsyat. Bahasa tidak hanya berperan sebagai alat komunikasi penyampai ide dalam komunitas budaya tertentu, akan tetapi bahasalah penentu keberlanjutan Budaya dan bahkan menjadi budaya itu sendiri. Lihat saja Budaya Indonesia tidak akan dikenal oleh khalayak ramai jika Bahasa yang digunakan untuk mempopulerkan budaya tersebut tidak pas dengan kepentingan substantif budaya tersebut.

Disisi lain, Bahasa mampu membuat budaya yang baru dari hasil pemantiknya yang dinamakan *Lexicogrammar*. Serta pada kesempatan yang lain, justru bahasa dapat lahir dari akulturasi budaya yang tercipta dari pergumulan ideologis antar pelaku bahasa. Ya, Menarik tentunya membahas ini secara mendalam.

Sementara itu dalam dimensi Pendidikan, Peran Bahasa adalah sebagai panglima bagi dtegakkanya normatifitas tujuan pendidikan dan kebijakan oleh para pemangku kepentingan dalam dunia pendidikan. Isu-isu pendidikan akan dapat dengan mudah menjadi Dajjal bagi para insan pendidikan manakala penggunaan bahasa sebagai alat penyampai kepentingan itu tidak dihitung secara matang, sehingga konsekwensinya tujuan dari pendidikan yang disampaikan justru akan menjadi momok bagi insan akademis dalam dunia pendidikan itu sendiri. Sebaliknya jika penggunaan bahasa dalam dunia pendidikan lebih bersifat dinamis, humanis, santun dan beradap, maka dengan sendirinya tujuan dan maksud dari substansi pendidikan akan dapat terwujud dengan baik.

Selanjutnya ucapan terimakasih ingin saya berikan kepada teman-teman diskusi sambil ngopi saya (Faisal Riza, Fadhli Khan, Jufri Naldo, Andi Wiliandi, Yaser 'Arafat) yang selalu setia menemani ngopi sambil menggali inspirasi demi selesainya penulisan buku ini. Teman-teman saya yang jauh jaraknya diluar kota Medan (Fridiyanto di Malang, Hasymi Prihatien Siregar di Rantau Prapat, Silahuddin Is di Banda Aceh dan

Ahmad Yunus Harahap di Takengon) yang selalu setia ketika saya ajak dialog walau kadang dalam keterbatasan konektivitas internet namun tetap semangat dan inspiratif.

Akhirnya, selamat membaca bagi kolega-kolega saya dan pembaca lain pada umumnya, semoga kritik dan saran dapat diberikan setelah anda semua membaca buku karya saya sendiri yang tak seberapa ini. Saya menyadari bahwa kelelahan mencari ekonomi tambahan menjadikan kurang fokusnya saya menulis buku ini sehingga menjadi sempurna. Namun walau demikian besar harapan saya buku ini mampu menjadi teman setia para pembaca yang budiman sekalian sehingga kita tetap bisa berjumpa walau jauh jarak diantara kita.

Medan, Desember 2016

Hormat Saya,

Maslathif Dwi Purnomo



KATA PENGANTAR



DAFTAR ISI • • •

Persembahan	i
Prakata Penulis	iii
Kata pengantar	ix
Daftar Isi	xi

BAB I: KUASA BAHASA DALAM RANAH BUDAYA

A. Bahasa dan Budaya Kekerasan	1
a. Kesadaran Berbahasa	2
b. Kekerasan Simbolik	5
c. Kesimpulan.....	7
B. Budaya dalam Santun Bahasa	8
a. Bahasa Sebagai Budaya Bangsa	8
b. Bahasa Sebagai Realitas Sosial	11
c. Ranah Santun Bahasa	13
d. Kesimpulan	14
C. Budaya dalam Kearifan Bahasa	15
a. Bahasa dalam Peristiwa Sosial Budaya.....	17
b. Bahasa Dalam Budaya Birokrasi	19
c. Kesimpulan.....	25

BAB II: KUASA BAHASA DALAM REALITAS POLITIK (KASUS PILKADA SUMUT)

A. Pilkada Sumut Dan Pertarungan Bahasa	27
a. Bahasa dan Kekuasaan.....	28
b. Bahasa Elit Politik Sumut Menjelang Pilkada	30
c. Kesimpulan	33
B. Efektifitas Bahasa Politik Cagubsu Jelang Pilkada.....	33
a. Bahasa dalam Komunikasi Politik ...	35
b. Bahasa Politik Cagubsu; Efektifkah?	38
c. Kesimpulan	41
C. Etika Dan Estetika Bahasa Politik Cagubsu	42
a. Etika Bahasa Politik Cagubsu.....	43
b. Estetika Bahasa Politik Cagubsu.....	47
c. Kesimpulan	50
D. Budaya Politik Damai Dalam Kearifan Bahasa	50
a. Bahasa Dalam Peristiwa Sosial Budaya	53
b. Bahasa Dalam Pergumulan Politik di Indonesia	55
c. Kesimpulan	61

BAB III: KUASA BAHASA DALAM BINGKAI PENDIDIKAN

A. Pendidikan Berbudaya Melalui Kesantunan Bahasa.....	63
a. Bahasa sebagai Budaya Bangsa.....	64
b. Bahasa Sebagai Realitas Sosial	66
c. Pendidikan Berbudaya Melalui Bahasa...	67
d. Kesimpulan	69

B. Pendidikan Karakter Remaja dan Realitas Bahasa	69
a. Tafsir Badai di Era Remaja.....	70
b. Tafsir Linguistik Karakter Remaja...	73
c. Kesimpulan	75
C. Makna Jujur dalam Ujian Nasional	76
a. Idealitas Pendidikan	77
b. Realitas Empirik Yang Terlupakan ..	79
c. Kesimpulan	83
D. UN dan Pendidikan Belah Jengkol	84
a. Sistem yang dipaksakan.....	85
b. Pendidikan Belah Jengkol.....	88
c. Kesimpulan.....	90

BAB IV: KUASA FRASA “AYO KERJA” DALAM REVOLUSI MENTAL

A. Refleksi Kemerdekaan	91
a. Potret Bangsa Indonesia	92
b. Cita-cita Luhur Bangsa.....	96
c. Kesimpulan	98
B. Dinamika Kebangsaan	99
a. Sebuah Anti Tesis Gerakan 4 November 2016	100
b. Perlunya Ketegasan Pemerintah.....	103
c. Kesimpulan.....	105

BAB V: KUASA BAHASA DALAM KOMUNIKASI POLITIK DI INDONESIA

A. Komunikasi Politik Jokowi	107
------------------------------------	-----

a. Bahasa Dalam Lingkaran Komunikasi Politik	108
b. Komunikasi Assertif Jokowi	110
c. Kesimpulan	115
B. Jokowi Meredam Aksi	116
a. Jokowi Tetap di Jakarta	117
b. Safari Politik “Sejuk” Jokowi	120
c. Kesimpulan	123
C. Ahok dan Kegaduhan Bahasa	124
a. Sebaiknya Ahok Diam	124
b. Fungsi Ujaran Dalam Politik	125
c. Ujaran Politik “Gaduh” Ahok	127
d. Kesimpulan	130

BAB VI: KUASA BAHASA DALAM DINAMIKA KEBANGSAAN

A. Promosi Kebhinekaan	133
a. Kognisi Sosial yang Berhasil	134
b. Membumikan Wacana Kerakyatan..	138
c. MONAS; Bukti Solidaritas Umat Islam..	141
d. Kesimpulan	146

DAFTAR PUSTAKA	147
TENTANG PENULIS	149

BAB I

KUASA BAHASA DALAM RANAH BUDAYA

A. Bahasa Dan Budaya Kekerasan

Banyak komunikasi yang dilakukan dalam komunitas di masyarakat menggunakan kata-kata yang menggambarkan kekerasan, seperti *tabok*, *pukul*, *jitak*. Bukankah itu semua menunjukkan dengan gamblang gambaran budaya masyarakat kita yang suka kekerasan?. Fenomena kekerasan dalam masyarakat kontemporer merupakan gugatan terhadap diktum bahwa bangsa ini adalah bangsa yang memiliki budaya luhur dan penuh sopan santun. Fakta mengkonfirmasi bahwa gaya penggunaan bahasa yang bernuansa kekerasan sudah sering kita dengar dan saksikan, disamping itu, hamper semua peradaban-peradaban di dunia dibangun dengan begitu banyak darah, korban nyawa dan harta benda.

Demikian halnya di Indonesia, kata integrasi, kedamaian bukan barang sederhana yang mudah ditemukan, karena telah terjadi pergeseran-pergeseran nilai, struktur sosial dan kebudayaan yang mapan nampak tidak lagi ramah, kita gagal memberikan efek

sejuk dan harmonis dalam masyarakat kita yang pada gilirannya menghasilkan frustrasi budaya. Salah satu yang signifikan berkontribusi dalam memicu kekerasan adalah persoalan bahasa. Lalu, apakah dalam konteks ini bahasa berperan mendamaikan atau justru memicu kekerasan?

a. Kesadaran berbahasa

Rahardjo (2003: 46) mengatakan bahwa bahasa adalah bagian terpenting yang berperan membentuk budaya sebuah bangsa. Bahasa merupakan piranti sosial yang mampu menjadikan masyarakat memiliki identitas. Melalui komunikasi oleh anggota masyarakat bahasa berperan selain sebagai alat komunikasi yang menunjukkan identitas dan karakter seseorang, tinggi rendahnya kualitas komunikasi lisan maupun tulisan seseorang dapat dilihat dari bahasa yang digunakan. Semakin baik bahasa yang digunakan dalam komunikasi oleh pembicara maupun penulis, maka semakin mudah pula pendengar dan pembaca mendapatkan maksud dari pesan tersebut. Sebaliknya, apabila pembicara atau penulis menggunakan bahasa yang asal-asalan bahkan tidak sesuai dengan struktur kalimat yang seharusnya, maka interpretasi dari makna ungkapan tersebut akan lain dari apa yang diinginkan dan tidak jarang akan menimbulkan konflik serta kekerasan.

Dalam berkomunikasi verbal maupun tekstual, masyarakat cenderung menggunakan bahasa yang

serampangan dan asal-asalan, hal ini diakibatkan karena komunikasi menginginkan kemudahan dalam memilih kalimat yang digunakan. Tetapi kalimat tersebut tanpa disadari menimbulkan arti berbeda bagi pendengar dan pembaca. Rahardjo (2003: 50) berpendapat bahwa kesalahan penggunaan kata dalam bahasa lisan maupun tulisan akan berakibat fatal bagi makna yang terkandung, apalagi penghilangan beberapa kata dalam suatu ungkapan dan kalimat tertentu secara langsung akan menimbulkan interpretasi yang berbeda dari pembaca dan pendengar.

Pandangan Rahardjo yang mengatakan bahwa kesalahan penggunaan kata dalam bahasa lisan maupun tulisan akan berakibat fatal bagi makna yang terkandung didalamnya jelas semakin membuktikan bahwa penggunaan bahasa yang tidak tepat sering menimbulkan konflik, sebab setiap kata yang menjadi ungkapan mengandung makna dan makna itu terbentuk berdasarkan persepsi dan interpretasi orang yang terlibat dalam proses komunikasi. Ketidaktepatan pilihan kata yang digunakan akan menghasilkan persepsi yang tidak sesuai dengan harapan para komunikasi. Kesalahan persepsi akan menjadi hambatan yang besar dalam proses komunikasi, bila hambatan yang ada tidak dikelola secara baik maka akan menimbulkan konflik, permusuhan, dan bahkan perang.

Beberapa waktu lalu, kita mendengar penggunaan kata “bangsat” dan “setan” oleh anggota

DPR telah memicu timbulnya konflik antara elit politik di Indonesia. Apapun alasannya, penggunaan kata kasar oleh anggota DPR yang terhormat tidak bisa diterima. Anggota DPR seharusnya menggunakan bahasa yang santun sebab keberadaan mereka merupakan representasi dari rakyat Indonesia. Mereka harus memberikan contoh yang baik kepada publik tentang bagaimana berkomunikasi yang baik. Mereka berbicara bukan mewakili suara mereka sendiri tetapi mereka mewakili suara rakyat sebab mereka dipilih secara langsung oleh rakyat. Wajar saja bila masyarakat memprotes penggunaan kata “bangsat” dan “setan” sebab kedua makna kata itu sangat bertentangan dengan identitas terhormat yang melekat pada anggota dewan.

Kress (1985: 28) mengatakan bahwa bahasa adalah nafas dalam komunikasi, karena tidak ada komunikasi dalam situasi apapun yang lepas dari bahasa sebagai alatnya. Oleh karenanya, bahasa merupakan bagian penting dari kehidupan. Orang tidak bisa hidup tanpa bahasa sebab dalam setiap gerak kehidupan manusia berkaitan dengan bahasa. Karena begitu dekatnya hubungan bahasa dan manusia, sebagian dari kita cenderung kurang menyadari bahasa yang digunakan. Salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran bahasa adalah mempelajari bahasa.

Bahasa dan identitas bahasa sangat berkaitan erat dengan penggunaannya. Bahkan bahasa dapat merepresentasikan identitas penggunaannya. Kata-kata

yang terucap dari mulut seseorang dapat memberikan gambaran karakter, kepribadian, sikap, dan pandangan hidup. Jika seseorang menggunakan bahasa kasar maka ia cenderung mempunyai karakter kasar pula. Sebaliknya, jika menggunakan bahasa sopan, maka ia cenderung mempunyai karakter yang sopan pula. Dengan demikian perlunya kesadaran berbahasa yang baik dan mampu merepresentasikan citra diri dan karakter kita sebagai bangsa yang sopan dan beradab.

b. Kekerasan simbolik

Sumarsno (2002: 109) memberikan pengertian bahwa kekerasan simbolik adalah kekerasan yang dilakukan dengan menggunakan kata-kata kasar kepada seseorang. Kekerasan simbolik sama dampaknya dengan kekerasan fisik, kekerasan simbolik dapat merusak jiwa dan kepribadian seseorang. Lebih parahnya lagi, korban kekerasan simbolik cenderung mewarisi pengalaman kekerasan simboliknya yang alaminya. Akibatnya, orang yang sudah terbiasa dengan kekerasan simbolik akan cenderung mempunyai karakter kasar, emosional, anarkis, dan brutal.

Dalam realitas di masyarakat dapat ditemukan betapa banyak kata atau istilah yang menggambarkan kekerasan, seperti tabok, pukul, jitek, dan lain-lain. Mengapa demikian banyak kata yang berhubungan dengan tindak kekerasan tersebut? Mengikuti teori Boas tentang hubungan bahasa dan budaya, bukankah itu

semua menunjukkan dengan gamblang gambaran budaya masyarakat kita yang suka kekerasan?

Berbahasa selalu bersifat publik, artinya bahasa selalu tumbuh bersama di tengah masyarakat. Wittgenstein (1951: 98) dalam teori *Language Game*-nya, menyatakan manusia memperlakukan bahasa bagaikan sebuah permainan di mana ada pemain, penonton dan wasit. Sebuah permainan selalu memiliki aturan yang disepakati. Demikian juga berbahasa, tak sesiapapun bisa dengan seenaknya dan secara anarkis memberi makna dan memahami kata apalagi memaksakan makna sesuai yang dikehendaki tanpa melalui proses konvensi yang merupakan ciri fundamental bahasa.

Kita sering menjumpai berbagai kalimat yang sesungguhnya ambigu secara semantik dan salah penempatan secara pragmatik serta lebih bersifat mendiskreditkan seseorang atau komunitas tertentu ditempat-tempat umum serta kantor-kantor baik pemerintah maupun swasta. Bahkan ironisnya, kalimat-kalimat tersebut justru sering juga kita jumpai di institusi pendidikan dan bahkan di lembaga yang bergerak khusus di bidang bahasa. Kalimat-kalimat tersebut antara lain sebagai berikut: “Pemulung masuk digebuk”, “Ngebut Benjol”, “Dilarang Kencing Di sini, Kecuali Anjing!”, “Masuk Tanpa salam, Keluar Tanpa Kepala”, “Dilarang Merokok”, “Tidak Menerima Sumbangan Dalam Bentuk Apapun”, “Ada uang Ada barang” “Tamu Harus Lapor!”, “Yang Membawa HP

Harus Dimatikan”

Masih banyak kalimat-kalimat yang sengaja ditulis oleh masyarakat dalam kondisi tertentu yang bersifat ambigu dan kesannya merendahkan salah satu pihak dari proses komunikasi ini. Hal-hal diatas tentunya menimbulkan tanda tanya yang besar buat kita, apakah masih layak bangsa ini disebut sebagai bangsa yang beradab, bangsa yang mengedepankan kesopanan, keluwesan, serta selalu santun dalam menggunakan kata dan kalimat?

c. Kesimpulan

Kuasa Bahasa juga mampu membuat sebuah budaya kekerasan di Masyarakat. Budaya kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat melalui bahasa jauh lebih membekas dan berbahaya disbanding dengan kekerasan yang dilakukan secara fisik, karena kekerasan memelaui bahasa akan masuk kedalam sendi-sendi pemikiran dan mempengaruhi cara berfikri yang kemudian menimbulkan gejolak-geolak aksi yang lebih dahsyat lagi. Oleh karenanya bahasa yang dapat menimbulkan konflik dan kekerasan dalam masyarakat harus semaksimal mungkin dihindari. Penghindaran terhadap pemilihan kata yang dapat memicu konflik dan kekerasan bukan saja harus dilakukan oleh para elit politik dan pejabat negara di negara ini, tetapi juga seluruh lapisan masyarakat bangsa ini harus menyadari betapa pentingnya memilih kata yang sopan, lugas, dan tidak merendahkan orang lain maupun golongan

tertentu dalam setiap peristiwa komunikasi yang diciptakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tentu tidak sedang mewariskan bahasa dan budaya kekerasan pada generasi ini kan? Kalau begitu mari berbahasa yang damai, berbudaya damai!.

B. Budaya Dalam Santun Bahasa

Para orang tua, Guru, Dosen, Ustadz, Kyai, selalu memberikan nasehat agar kita senantiasa menggunakan bahasa yang santun dalam kehidupan sehari-hari. Nasehat ini sedemikian kuatnya sehingga jika kita berbahasa kasar dalam komunikasi dengan mereka maka sebutan dan julukan yang buruk akan kita terima. Realitas ini nyata terjadi dalam kehidupan sehari-hari bahkan justru telah menjadi budaya. Artinya sesungguhnya keinginan untuk berbahasa yang santun tidak berbanding searah dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Kenapa ini terjadi? Kesalahan konsep dan cita-cita luhurkah, atau justru tidak adanya contoh yang nyata kepada generasi muda tentang praktek berbahasa yang santun, atau memang budaya kita orang Indonesia yang hanya pandai berkonsep saja dan susah menerapkannya?

a. Bahasa sebagai Budaya Bangsa

Chaer dan Leoni (2004: 15) memberikan pendapat bahwa bahasa dipelajari sebagai suatu proses sosial yang membentuk budaya, karenanya bahasa tidak mungkin dikaji lepas dari faktor sosial budaya

yang berlaku. Bahasa bukanlah melulu alat komunikasi yang steril, melainkan juga untuk menunjukkan identitas sosial budaya, untuk memelihara hubungan sosial budaya dan acapkali merupakan peristiwa sosial budaya. Dalam dimensi ini tentulah kita akan kehilangan identitas sosial dan budaya manakala suatu komunikasi yang terjadi lepas dari peristiwa berbahasa dan konteks bahasa itu sendiri. Setiap situasi yang terjadi di masyarakat hampir selalu tercermin di dalam praktik berbahasa. Sebab, salah satu peran bahasa adalah untuk membangun dan memelihara hubungan sosial, untuk pengungkapan peranan-peranan sosial, termasuk peranan komunikasi yang diciptakan oleh bahasa itu sendiri. Karenanya, situasi yang aman dan damai akan melahirkan simbol-simbol kebahasaan yang mantap dan stabil atau konstan dalam kosa katanya. Sebaliknya, situasi yang bergejolak dan tidak menentu juga akan tercermin dalam ungkapan-ungkapan bahasa yang bersifat ambigu dan makna yang simpang siur. Kesimpangsiuran dan keambiguan makna yang demikian ini merupakan fenomena kebahasaan yang timbul karena adanya gejolak kehidupan di masyarakat.

Masyarakat terus berkembang, dan didalam perkembangan itu banyak hal-hal yang pastinya akan berubah, begitu pula dengan bahasa, bahasa akan berubah dan selalu mengalami perubahan bahkan sampai pada tingkat kepunahan, semua itu bergantung pada realitas sosial yang secara dinamis terus berubah dimasyarakat, oleh karena lahan bahasa adalah

masyarakat sosial, maka sehingga bahasa dan realitas sosial tidak bisa dipisahkan. Karena itu, perubahan bahasa terjadi karena perubahan sosial baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Sebaliknya, perubahan sosial berimplikasi pada perubahan bahasa. Karenanya, bahasa tidak hanya dibentuk dan ditentukan, tetapi juga membentuk dan menentukan realitas sosial. Bahasa bukan sekadar alat untuk mengungkapkan pikiran, tetapi wahana komunikasi umat manusia. Rahardjo (2003:81) memberikan penapat bahwa kehadiran bahasa dalam kehidupan manusia tidak bisa dianggap secara tiba-tiba, tetapi melalui proses sistem kode atau lambang yang disepakati oleh warga suatu masyarakat atau kelompok secara bersama-sama. Karenanya, bahasa juga dianggap berdimensi sosial. Sebab, bahasa merupakan aspek kegiatan kehidupan sosial manusia.

Tidak banyak yang menyadari bahwa perkembangan bahasa—tentu saja termasuk perubahannya---mengungkapkan banyak tentang keadaan masyarakat tempat bahasa digunakan. Sumarsono dan Partana, (2002:338) mensinyalir bahwa Masalah-masalah yang berkaitan dengan perkembangan bahasa memang tidak hanya ditinjau semata-mata dari sisi teknis, misalnya bagaimana menyebarkan kosa kata, ejaan, pemenggalan kata dan pola kalimat yang benar. Tetapi dari sisi lain, bahasa dapat ditinjau berkaitan dengan perkembangan dalam masyarakat yang lebih mendasar, misalnya

mengenai dinamika perubahan sosial, pembentukan dan pergeseran nilai-nilai sosial, pembentukan budaya, bahkan sebagai *lokomotif* politik. Semua yang terjadi di masyarakat terungkap sejelas-jelasnya dalam bahasa. Dengan kata lain, bahasa merupakan cermin paling jelas keadaan masyarakat penggunaannya. Dengan kata lain ke arah mana bahasa akan dibawa tergantung dari masyarakat penggunaannya, ke arah terbentuknya budaya kekerasankah, atau sebaliknya kearah terbentuknya budaya berbahasa yang arif dan dapat mencerminkan budaya bangsa secara sempurna.

b. Bahasa Sebagai Realitas Sosial

Bahasa yang digunakan di masyarakat belakangan ini sering menunjukkan adanya perbedaan antara idealitas dan realitas. Idealitas yang sesungguhnya merupakan bentuk sebenarnya dalam penggunaan bahasa dimasyarakat sering mengalami *collaps position* (posisi yang salah arah) dimana sering ditemukan penyalahgunaan fungsi bahasa yang digunakan dimasyarakat. Kalimat-kalimat seperti "*hanya Anjing yang kencing disini*", "*Tikus kantor seharusnya dibunuh*", merupakan kalimat yang ditujukan untuk manusia akan tetapi menggunakan hewan sebagai representasi. Hal ini tentunya mengalami disfungsi kalimat, namun anehnya hal semacam ini seakan sudah layak digunakan dimasyarakat dan dianggap sebagai sesuatu yang lumrah. ini tentunya berbahaya apabila digunakan secara terus menerus.

Masyarakat akan kehilangan kearifan berbahasa manakala kalimat-kalimat tersebut masih digunakan. Malah dikhawatirkan bahasa yang digunakan dalam masyarakat akan lebih cenderung mengarah kepada Sarkasme dan bisa dipastikan akan kehilangan nilai kearifannya.

Menurut Munsi dan Alif (2005: 76) Bahasa adalah representasi suatu bangsa, baik buruknya suatu bangsa terindikasi dari seberapa jauh bangsa itu merawat dan memperhatikan bahasa, karena baiknya bahasa akan sangat berpengaruh pada baiknya peristiwa sosial yang terjadi dengan bahasa sebagai istrumennya. Dari sini jelas bahwa dalam kaitanya, berbahasa adalah suatu peristiwa sosial, bahwa antara bahasa dan konteks sosial tidak bisa dipisahkan, sampai akhirnya berbahasa dalam kontek sosial melahirkan suatu kebudayaan dimasyarakat. Hal ini bisa dipahami karena bahasa hakikatnya adalah sarana untuk menyampaikan sikap pribadi dan hubungan antar pribadi yang terjadi dalam interaksi masyarakat. berbahasa dalam ranah ini secara *tali temali* sekaligus membentuk peristiwa sosial dan budaya. pun juga sebaliknya setting sosial dan kondisi budaya mendorong pemilihan ragam bahasa (*language choice*) yang sesuai dengan konteksnya. Jadi benarlah bahwa komunikasi interpersonal lebih banyak digunakan dimasyarakat dan mempengaruhi kondisi bahasa, pembentukan sosial dan budaya masyarakat.

c. **Ranah Santun Bahasa**

Betulkah kita adalah bangsa yang berbudaya? Ramah sikap, sopan perbuatan dan santun dalam berbicara dan berkata-kata (berbahasa). Sudah diketahui dunia internasional bahwa keramahtamahan orang Indonesia selaku bangsa Timur tidak hanya pada sesama anggota keluarga dan masyarakat, namun juga kepada orang lain. Slogan “Tamu adalah raja”, menjadi bukti bahwa orang Indonesia memiliki komitmen untuk bersikap memuliakan orang lain yang hadir di tengah kita.

Tampaknya, doktrin tersebut diatas perlu ditinjau ulang, kita sebagai masyarakat yang berbudaya dengan ciri khas ramah dalam sikap, sopan dalam perbuatan, serta santun dalam tutur kata perlu ditinjau ulang, sebab akhir-akhir ini bahasa kekerasan cenderung dijadikan cara menyampaikan kepentingan. Trend tawuran antar pelajar yang sebenarnya dipicu oleh persoalan sepele, demonstrasi mahasiswa yang sering berakhir ricuh dan merusak fasilitas umum, serta cara-cara main hakim sendiri oleh masyarakat terhadap orang yang terindikasi berbuat kriminal semakin menunjukkan bahwa kita sebenarnya sudah keluar dari slogan sebagai Masyarakat Indonesia yang senang menghormati orang lain. Hal ini disebabkan karena slogan ramah bersikap, sopan bertindak dan santun dalam tutur kata semakin sulit dicari contoh empiriknya di masyarakat, karena hampir setiap peristiwa menghebohkan selalu dipicu oleh budaya

kekerasan dan berakhir dengan cara kekerasan pula.

Akibat pergeseran identitas sebagai masyarakat Indonesia yang ramah dalam sikap, sopan dalam perbuatan dan santun dalam tutur kata memunculkan terjadinya budaya yang keluar dari *rel* ketimuran. sehingga kita saat ini tidak lagi dikenal sebagai bangsa yang ramah dan sopan dalam menerima tamu, akan tetapi Negara kita sudah dikenal dengan sebutan sarang *macan* sehingga tidak sedikit orang asing yang enggan dan takut masuk ke Negara kita. Dari sini jelas bahwa Pendidikan berbudaya kita sebagai bangsa timur yang selama ini dipegang teguh sudah gagal akibat keramahan sikap, kesopanan perbuatan dan kesantunan berbahasa yang perlahan-lahan namun pasti mulai ditinggalkan oleh masyarakat kita. Sungguh ironis.

d. Kesimpulan

Sungguh kuasa bahasa salah satunya merupakan piranti sosial dan budaya. Sedemikian hebatnya sehingga bahasa mampu membentuk realitas sosial yang pada saat bersamaan juga memperkuat budaya yang berlaku dimasyarakat. Pemilihan dan penggunaan bahasa yang tidak sesuai dengan konteks situasi dan kondisi akan menimbulkan berbagai konflik, baik konflik *horizontal* antara pengguna bahasa (baca: pembicara dan pendengar) maupun konflik vertikal antara pemegang *policy* -kebijakan-- (baca: Pemerintah, Elit politik) dengan obyek khalayak ramai (masyarakat). Hal tersebut lebih lanjut tentu akan

menimbulkan konflik sosial dan budaya. Karenanya, kecermatan dalam pemilihan dan kesantunan dalam penggunaan bahasa mutlak diperlukan dalam situasi dan kondisi tertentu dan dipahami sebagai sebuah peristiwa yang lazim terjadi.

C. Budaya Dalam Kearifan Bahasa

Bahasa dalam konteksnya bukan hanya peristiwa komunikasi verbal - tekstual semata, bahasa tidak hanya digunakan secara monoton untuk menyampaikan sesuatu *ansih* melalui kata - kata maupun tulisan. Setiap situasi yang terjadi di masyarakat hampir selalu tercermin di dalam praktik berbahasa. Sebab, salah satu peran bahasa adalah untuk membangun dan memelihara hubungan sosial, untuk pengungkapan peranan-peranan sosial, termasuk peranan komunikasi yang diciptakan oleh bahasa itu sendiri melalui wacana verbal maupun tektual, Sinar (2008: 8). Karenanya, situasi yang aman dan damai akan melahirkan simbol-simbol kebahasaan yang mantap dan stabil atau konstan dalam kosa katanya. Sebaliknya, situasi yang bergejolak dan tidak menentu juga akan tercermin dalam ungkapan-ungkapan bahasa yang bersifat ambigu dan makna yang simpang siur. Kesimpangsiuran dan keambiguan makna yang demikian ini merupakan fenomena kebahasaan yang timbul karena adanya gejolak kehidupan di masyarakat.

Masyarakat terus berubah, begitu juga bahasa, sehingga bahasa dan realitas sosial tidak bisa

dipisahkan. Karena itu, perubahan bahasa terjadi karena perubahan sosial baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Sebaliknya, perubahan sosial berimplikasi pada perubahan bahasa. Karenanya, bahasa tidak hanya dibentuk dan ditentukan, tetapi juga membentuk dan menentukan realitas sosial. Bahasa bukan sekadar alat untuk mengungkapkan pikiran, tetapi wahana komunikasi umat manusia. Kehadiran bahasa dalam kehidupan manusia tidak bisa dianggap secara tiba-tiba, tetapi melalui proses sistem kode atau lambang yang disepakati oleh warga suatu masyarakat atau kelompok secara bersama-sama. Karenanya, bahasa juga dianggap berdimensi sosial. Sebab, bahasa merupakan aspek kegiatan kehidupan sosial manusia.

Tidak banyak yang menyadari bahwa perkembangan bahasa—tentu saja termasuk perubahannya---mengungkapkan banyak tentang keadaan masyarakat tempat bahasa digunakan. Masalah-masalah yang berkaitan dengan perkembangan bahasa memang tidak hanya ditinjau semata-mata dari sisi teknis, misalnya bagaimana menyebarkan kosakata, ejaan, pemenggalan kata dan pola kalimat yang benar. Tetapi dari sisi lain, bahasa dapat ditinjau berkaitan dengan perkembangan dalam masyarakat yang lebih mendasar, misalnya mengenai dinamika perubahan sosial, pembentukan dan pergeseran nilai-nilai sosial, pembentukan budaya, bahkan sebagai *lokomotif* politik. Semua yang terjadi di

masyarakat terungkap sejelas-jelasnya dalam bahasa. Dengan kata lain, bahasa merupakan cermin paling jelas keadaan masyarakat penggunaannya. Dengan kata lain ke arah mana bahasa akan dibawa tergantung dari masyarakat penggunaannya, ke arah terbentuknya budaya kekerasankah, atau sebaliknya kearah terbentuknya budaya damai melalui kearifan berbahasa.

a. Bahasa Dalam Peristiwa Sosial Budaya

Dalam kajian sociolinguistik, Soemarsono dan Partana (2002: 234) berpendapat bahwa bahasa dipelajari sebagai suatu proses sosial yang membentuk budaya, karenanya bahasa tidak mungkin dikaji lepas dari faktor sosial budaya yang berlaku pada saat itu. Bahasa bukanlah melulu alat komunikasi yang steril, melainkan juga untuk menunjukkan identitas sosial budaya, untuk memelihara hubungan sosial budaya dan acapkali merupakan peristiwa sosial budaya. Dalam dimensi ini tentulah kita akan kehilangan identitas sosial dan budaya manakala suatu komunikasi yang terjadi lepas dari peristiwa berbahasa dan konteks bahasa itu sendiri.

Realitas yang terjadi di masyarakat menunjukkan adanya perbedaan antara idealitas dan realitas. Idealitas yang sesungguhnya merupakan bentuk sebenarnya dalam penggunaan bahasa dimasyarakat sering mengalami *collaps position* (posisi yang salah arah) dimana sering ditemukan

penyalahgunaan fungsi bahasa yang digunakan dimasyarakat. Kalimat-kalimat seperti *"hanya Anjing yang kencing disini"*, *"Tikus kantor seharusnya dibunuh"*, merupakan kalimat yang ditujukan untuk manusia akan tetapi menggunakan hewan sebagai representasi. Hal ini tentunya mengalami disfungsi kalimat, namun anehnya hal semacam ini seakan sudah layak digunakan dimasyarakat dan dianggap sebagai sesuatu yang lumrah. ini tentunya berbahaya apabila digunakan secara terus menerus. Masyarakat akan kehilangan kearifan berbahasa manakala kalimat-kalimat tersebut masih digunakan. Malah dikhawatirkan bahasa yang digunakan dalam masyarakat akan lebih cenderung mengarah kepada Sarkasme dan bisa dipastikan akan kehilangan nilai kearifannya.

Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat mengamati bahwa gaya bahasa seseorang atau pilihan ragam bahasa (*language choice*) seseorang akan sangat terkait dengan faktor "luar bahasa". Artinya dalam konteks ini tidak seorang pun akan menggunakan bahasa yang sama (bahasa formal) dengan lawan berbicara yang berbeda, baik dari sisi umur, tingkat pendidikan, tingkat sosial, jenis kelamin, kekerabatan, pekerjaan dan sebagainya. Seseorang akan mengatakan: *"terbang kemana aja kau bro, kok lama kali ga muncul"*, kepada tema sejawatnya yang sudah lama tidak dilihatnya. Hal ini tentu berbeda apabila dia bertemu dengan dosennya yang sudah lama tidak datang mengajar ke kampus karena menjadi pembicara pada

salah satu seminar di kabupaten Toba samosir, tentu dia akan berkata: *“apa kabar mam, kami ga jumpa mam beberapa hari ini, mam sibuk ya”*. Hal tersebut jelas membuktikan bahwa pilihan ragam bahasa (*language choice*) sangat bergantung pada setting dan stratifikasi sosial dimana bahasa itu digunakan. Walaupun terjadi diferensiasi dalam penggunaan bahasa dalam komunikasi yang lebih dipengaruhi faktor stratifikasi sosial, namun penggunaan bahasa diatas cenderung masih memiliki sifat kearifan berbahasa karena tidak mendiskreditkan salah satu lawan bicara dan termasuk dalam kategori win-win solution.

b. Bahasa Dalam Budaya Birokrasi

Dalam suatu kesempatan ketika saya sedang menghadiri acara di kantor Gubernur Sumatera Utara dalam rangka menyambut kunjungan kerja Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) beberapa waktu lalu, dalam kesempatan itu H. Syamsul Arifin,SE (Gubernur Sumatera Utara Periode 2009-2013) menyampaikan pidatonya yang menurut saya sangat spektakuler, dinamis, dan mampu mencairkan suasana, pak Gubsu dengan piawainya mengajak audien untuk larut dalam saru pokok persoalan ekonomi melalui sajian apik yang dikemas dengan menggunakan bahasa yang lugas, luwes, terarah dan memasyarakat. memulai sambutannya pak Gubsu menyapa audien dengan sebuah pantun ciri khas melayu “biarlah logam tapi logam diatas buah manggis, biarlah hitam tetapi saya

hitam yang manis” sontak para audien bertepuk tangan mendengar pantun pak Gubsu tersebut. belum berhenti sorak sorai audien, Gubernur yang memang terkenal lugas dan pandai berpantun ini melayangkan jurus pantun mautnya kembali “Tanjung balai memang kota kerang, walaupun kerang tapi manis rasanya, saya ini bukan cuma jual tampang, tapi berbakti utk kemajuan sumatera utara”. mendengar lontaran pantun tersebut, sontak gemuruh sorak sorai audien menggelegar di ruangan yang penuh dengan hawa dingin AC tersebut. selanjutnya, sang pemimpin tertinggi Sumatera Utara kala itu kemudian meneruskan pidato sambutannya dihadapan Menteri Koperasi dan UKM dan para audien tidak terkecuali penulis yang mengikuti acara tersebut sampai dengan selesai.

Cuplikan realitas diatas menunjukkan kepada kita bahwa bahasa bukan hanya alat komunikasi verbal-tekstual yang hanya tunduk pada aturan-aturan gramatikal semata, namun bahasa adalah alat komunikasi dan alat untuk mengkomunikasikan sesuatu kepada orang lain pada situasi dan kondisi yang tidak terikat, artinya penggunaan bahasa sebagai alat mengkomunikasikan sesuatu tidaklah harus hilang karena sekatan tempat dan situasi dimana bahasa itu digunakan, apabila selama ini kita hanya mendengar pidato sambutan yang disampaikan oleh seorang pejabat sekelas Kepala Desa, Camat, Bupati, Wali kota, Gubernur, Menteri bahkan Presiden cenderung lebih mengedepankan nilai-nilai kebenaran grammatikal,

eksklusif, tertata rapi, penuh rasa santun dan terikat, sehingga pendengar dalam ranah ini dipaksa untuk mengikuti alur bahasa yang jauh dari mengapresiasi sesuatu.

Strukturalisme bahasa dalam pidato-pidato resmi yang kerap kali kita dengar disampaikan oleh pejabat-pejabat negara seakan sudah menjadi hal wajib dilakukan dalam suasana resmi tanpa disadari bahwa sebenarnya kita telah berada dalam ranah pembelengguan berbahasa. Bahasa resmi bukanlah harus diidentifikasi dengan menyekat bahasa kedalam ranah sempit dengan berdalih pada ketentuan kondisi yang memang sengaja diciptakan, namun lebih jauh seharusnya berbahasa resmi lebih dikedepankan pada bagaimana bahasa yang digunakan untuk menyampaikan sesuatu itu mampu mengantarkan pokok permasalahan yang ingin disampaikan kepada audien. Yasraf (dalam Sobur 2004: 7) mendeskripsikan bahwa bahasa merupakan ironi bagi bertemunya simbol dan makna yang terkandung didalamnya. Artinya jika penyampaian ide, maksud dan tujuan tertentu yang menggunakan bahasa sebagai instrumennya cenderung monoton dan memaksa, maka ide, makna dan tujuan itu data bergeser dari maksud semula. Namun jika penggunaan bahasa bersifat simpel, lugas dan penuh dengan kekerabatan akan lebih mudah diterima oleh audien yang tetntunya secara otomatis audien akan bisa menangkap pesan penting yang ingin disampaikan.

Sebagai contoh Petikan pantun yang disampaikan oleh seorang Gubernur Sumatera Utara diatas ternyata tidaklah menghilangkan esensi keseriusan dan stressing pokok permasalahan yang ingin disampaikan melalui bahasa yang digunakan. pantun sebagai bahasa berfungsi sebagai media untuk menyalurkan ide pokok permasalahan yang ingin disampaikan oleh sang Gubernur kepada audien yang sedang ia hadapi. dalam situasi ini timbullah interaksi *mind* dan *thought*, interaksi *mind* timbul karena audien mengerti dengan ide pokok yang ingin disampaikan oleh pembicara sehingga audien mampu menelaah secara terbuka pokok permasalahan tersebut. sementara itu interaksi *thought* lebih mengarah pada keikutsertaan perasaan audien terhadap realitas yang disampaikan oleh pembicara. dalam hal ini telah terjadi *transfer of knowledgedan transfer of sense* melalui bahasa yang digunakan oleh pembicara.

(Berbahasa memang seharusnya memperhatikan situasi dan kondisi sosial., karena Rahardjo (2002: 90) berpendapat bahwa bahasa adalah cermin budaya (*language is a social culture*) yang tentunya mencerminkan situasi dan kondisi sosial dimana bahasa itu digunakan. penggunaan bahasa tidaklah harus tersekat oleh kepentingan dan keinginan sesaat, karena bahasa bersifat luas dan memiliki fleksibilitas kata yang tidak terhingga, sehingga kalau penggunaan bahasa dipaksakan harus mengikuti aturan – aturan tertentu disetiap kondisi maka hal ini bisa menimbulkan hirarki

konflik antara pembicara dan pendengar. selanjutna, jika hirarki konflik itu muncul maka yang terjadi adalah mis-understanding antara pemvicara dan pendengar, sehingga pesan utama atau ide pokok yang ingin disampaikan dalam pembicaraan tersebut menjadi tidak dimengerti oleh pendengar. bukankah kondisi seperti ini justru akan menimbulkan konflik bahasa? inilah yang selanjutnya perlu direnungkan lebih jauh.

Berbahasa akan lebih indah jika ia ditempatkan pada ranah dimana bahasa itu digunakan dengan melihat situasi dan kondisi pendengarnya, tidak selamanya pidato - pidato pejabat yang disampaikan didepan rakyatnya selalu menggunakan bahasa yang monoton, grammatikal, struktural dan eksklusif sehingga susah dimengerti ide pokonya oleh para pendengarnya, akan tetapi justru bahasa yang memasyarakatlah yang akan lebih mudah dicerna dan mampu membawa pendengar masuk kedalam ranah *mind* dan *thought* terhadap pokok masalah yang disampaikan.

Bahasa bukanlah alat untuk mengklasifikasikan masyarakat, kelompok, suku ataupun ras. dalam bahasa tidak dikenal istilah hirarkisme bahasa, bukanlah menjadi suatu keniscayaan apabila seorang pejabat harus berbicara dengan gaya bahasa pejabatnya yang pelan-pelan, teratur, berwibawa dan sok-sok ilmiah. namun juga bukan menjadi kewajiban jika seorang tukang becak harus berbicara kasar, spontan, pasaran dan *ndeso*, baik pejabat maupun tukang becak sama-

sama memiliki bahasa dan berhak menggunakan bahasa sesuai dengan kondisinya masing-masing, pada saat tertentu seorang tukang becak juga berhak menggunakan bahasa halus, sopan, terarah, luwes, lugas, dan sebaliknya seorang pejabat juga tidak disalahkan apabila menggunakan bahasa yang ndeso, spontan dan “kasar”, karena keduanya adalah insan bahasa yang berhak memiliki dan menggunakan bahasa tersebut sebagai alat komunikasi dan mengkomunikasikan sesuatu. lembaga ataupun institusi apapun tidak berhak melarang penggunaan bahasa yang seperti itu.

Mari kita ingat sewaktu Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sang pahlawan demokrasi menjadi presiden, beliau telah mendekonstruksi tata aturan berbahasa bagi pejabat yang sebelumnya terkenal dengan tata aturan yang baku dan protokolisme, menjadi memasyarakat dan selalu berpihak kepada masyarakat. Melalui bahasa Gus Dur yang kelihatannya *entheng* ternyata mengandung makna yang dalam tanpa harus membingungkan audien yang mendengarkannya. bahasa yang digunakan Gus Dur telah merombak sentralisme dan sakralisme bahasa yang selama ini digunakan oleh para pejabat di negeri tercinta ini. Gus Dur mengetahui betul bahwa akibat dari politisasi bahasa yang digunakan oleh para pejabat Orde Baru itulah masyarakat Indonesia menjadi masyarakat minder, dangkal pemikirannya, dan kurang progresif terhadap realitas yang terjadi. *Al-hasil* keterpurukan

dari semua sisilah yang menghinggapi masyarakat Indonesia saat itu. Gus Dur sangat paham akan kondisi realitas itu, sehingga sewaktu beliau menjadi presiden termasuk agenda utamanya adalah merombak kebakuan sentralisme bahasa. bahasa *ceplas-ceplos* yang dipraktekkan oleh Gus Dur mengindikasikan bahwa beliau bermaksud menunjukkan kepada masyarakat bahwa kita berhak menerima dan menolak sesuatu secara spontan karena itu adalah hak masyarakat sebagai warga bangsa dalam semua ranah, lebih lanjut lagi Gus Dur ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa Bahasa bukanlah alat pembelenggu pikiran dan keinginan yang ingin disampaikan. *subhanallah*, betapa mulia hati beliau.

c. Kesimpulan

Dari sini jelas bahwa dalam kaitanya, kuasa bahasa salah satunya adalah meralasikan peristiwa sosial dan budaya, bahwa antara bahasa dan konteks sosial tidak bisa dipisahkan, sampai akhirnya berbahasa dalam kontek sosial melahirkan suatu kebudayaan dimasyarakat. Hal ini bisa dipahami karena bahasa hakikatnya adalah sarana untuk menyampaikan sikap pribadi dan hubungan antar pribadi yang terjadi dalam interaksi masyarkat. berbahasa dalam ranah ini secara *tali temali* sekaligus membentuk peristiwa sosia dan budaya. pun juga sebaliknya setting sosial dan kondisi budaya mendorong pemilihan ragam bahasa (*language choice*) yang sesuai dengan konteksnya. Jadi benarlah

bahwa komunikasi interpersonal lebih banyak digunakan dimasyarakat dan mempengaruhi kondisi bahasa, pembentukan sosial dan budaya masyarakat.

BAB II

KUASA BAHASA DALAM REALITAS POLITIK (KASUS PILKADA SUMUT)

A. PILKADA SUMUT DAN PERTARUNGAN BAHASA

Banyak cara yang dilakukan oleh Calon Gubernur Sumatera Utara yang akan memperebutkan Kursi Gubernur Sumut periode 2013 - 2018. Diantaranya adalah memasang spanduk, poster, pamflet, banner dan foto dengan ukuran besar di jalan raya dan sudut-sudut Kota. Tak hanya gambar saja yang dipasang, akan tetapi disertai juga dengan semboyan dan slogan yang mencitrakan tentang diri mereka bahwa bakal calon Gubernur tersebut akan membawa Sumut sesuai dengan apa yang mereka tulis di gambar dan foto-foto tersebut. Ini menjadi menarik untuk diamati, meminjam istilah yang lazim kita dengar bahwa "*Mulutmu adalah Harimaumu*" mengimplikasikan banyak makna tentang apa yang ditulis untuk mengiringi pemasangan foto dan poster-poster tersebut.

Saking dalamnya makna dari semboyan dan slogan-slogan yang tertulis diberbagai poster itu,

menjadikan Sumut seakan sedang mengalami pertarungan Bahasa antar elit yang mencalonkan diri menjadi Gubernur demi meraih simpati masyarakat. Sehingga sebagai masyarakat biasa yang cinta akan pembangunan daerah, tentunya sangat banyak berharap bahwa para calon Gubernur itu akan dapat mewujudkan dan merealisasikan janji yang sudah mereka tulis melalui poster, pamflet, banner, spanduk dan foto-foto tersebut. Namun, dari catatan yang ada selama ini kebanyakan slogan dan semboyan-semboyan itu hanya bahasa lipstick belaka dan susah untuk diwujudkan.

a. Bahasa dan Kekuasaan

Sekilas tidak ada hubungan sama sekali antara bahasa dan kekuasaan. Keduanya merupakan dua hal terpisah. Ini tentu tidak salah jika bahasa dimaknai secara konvensional, yakni bahasa dipandang sebagai sistem lambang yang terurai mulai dari unit yang paling kecil menuju ke yang terbesar, yakni bunyi (phones), morfem (morphemes) dan kata (words). Sedangkan kekuasaan dimaknai sebagai praktik politik oleh para politisi. Jika dimaknai seperti itu, maka tidak mungkin antara bahasa dan kekuasaan dapat bertemu, karena dari sudut pandang disiplin ilmiah bahasa adalah wilayah kajian linguistik, sedangkan kekuasaan adalah wilayah kajian ilmu politik.

Perjumpaan antara bahasa dan kekuasaan dimulai setelah para kaum post-strukturalisme seperti Jurgen Habermas, Jean Baudrillard, Antonio Gramsci,

Michel Foucault dan lain-lain menegaskan betapa pentingnya relasi antara bahasa dan kekuasaan. Bahkan Jean Baudrillard menegaskan bahwa “The real monopoly is never that of technical means, but that of speech”. Sejak saat itu, diskusi tentang relasi antara bahasa dan kekuasaan sangat semarak. Sebelumnya kehadiran karya Fairclough (1989) “Language and Power”, Benedict Anderson (1990) “Language and Power: Exploring Political Cultures in Indonesia”, Pierre Bourdieu (1984) “Language and Symbolic Power” juga telah membuka ruang diskusi ilmiah tentang relasi bahasa dan kekuasaan. Dampaknya, penelitian tentang relasi bahasa dan kekuasaan berkembang sehingga melahirkan karya-karya akademik yang cukup banyak berupa makalah, buku-buku ilmiah, tesis, dan bahkan disertasi.

Dalam dunia politik, peranan bahasa sangat besar. Proses politik merupakan praktik komunikasi, bagaimana mendayagunakan bahasa sebagai alat komunikasi politik yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Bahasa digunakan untuk mengontrol dan mengendalikan masyarakat melalui pengontrolan makna. Para tokoh politik mempergunakan bahasa bukan saja untuk menyatakan pendapatnya melainkan untuk menyembunyikannya. Hal itu karena di balik pikiran itu terdapat kepentingan-kepentingan yang harus dipertahankan. Untuk menyembunyikan pikiran-pikiran politik tersebut, bahasa politik harus ditata sedemikian rupa karena dalam struktur linguistiknya penuh dengan muatan kekuasaan yang tersembunyi.

Dalam sudut pandang politik kekuasaan, Bahasa adalah senjata mematikan bagi kekuasaan, seperti yang dikemukakan Barnes (2004:2) bahwa politik adalah suatu seni atau kegiatan untuk memperoleh kekuasaan dan menambah kekuasaan. Dengan demikian, politikus harus menguasai bahasanya untuk alasan penting karena siapapun yang menguasai bahasa, ia akan berkuasa. Oleh karena itu bahasa politik harus mencerminkan secara ideal visi dan misi para elit politik dalam meraih simpati masyarakat. Jika tidak maka dengan bahasa yang salah penempatan juga akan mengakibatkan seseorang tercerabut dari kekuasaan. Contoh konkretnya kita tentu masih ingat bagaimana presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang gemar membuat *blunder* bahasa antara lain “Anggota DPR kok seperti taman kanak-kanak”, “Gitu saja kok repot”, “Ga jadi presiden ga pathe’en”. Pernyataan tersebut menyebabkan anggota DPR gerah dan akhirnya melawan Gus Dur. Kontroversi bahasa pada akhirnya membuat Gus Dur jatuh dari kekuasaan. Dari sini jelas bahwa dengan penataan bahasa yang baik seseorang bisa meraih dan mempertahankan kekuasaan, pun juga sebaliknya dengan kesalahan penataan bahasa seseorang bisa tercerabut dari kekuasaannya.

b. Bahasa Elit Politik Sumut Menjelang Pilkada

Bahasa politik sangat erat kaitannya dengan upaya untuk merebut simpati rakyat. Ia hadir dan dibutuhkan untuk menumbuhkan pencitraan tertentu

agar rakyat terpengaruh dan tersugesti oleh propaganda dan ikon-ikon politik yang ditawarkan. Dalam konteks demikian, seorang politisi yang cerdas, dengan sendirinya perlu memiliki kecerdasan linguistik dalam upaya membangun komunikasi dan interaksi dengan publik. Ini artinya, tuturan (*speech*) politik yang mereka lontarkan idealnya mengandung muatan dan misi kerakyatan melalui bahasa yang sederhana, gampang dicerna, dan terhindar dari kesan bombastis.

Bahasa politik sungguh harus bisa mengkomunikasikan maksud dan tujuan dari para elit politik kepada rakyat sebagai subyek ide maksud dan tujuan tersebut. Penggunaan bahasa yang lugas, sederhana, gampang dicerna dan tidak terlalu *membabi buta* akan dengan mudah dicerna oleh rakyat, karena ketika sedang membuat pernyataan – pernyataan politik --walaupun para elit politik tidak berhadapan langsung secara visual dengan rakyat-- akan tetapi sejatinya mereka sedang berkomunikasi dengan rakyat lewat pernyataan – pernyataan yang disampaikan, hal inilah yang menurut Brown & Yule (1983) dikatakan sebagai “*Interactional function*” dalam proses *Interactional function*, pembicara --para elit politik-- melalui pernyataan-pernyataannya harus mampu mengkomunikasikan ide dengan bahasa yang bisa dicerna oleh rakyat. Karena pada dasarnya ketika para elit politik membuat pernyataan maka sesungguhnya mereka telah melakukan fungsi seperti disebut oleh Halliday (1973) sebagai fungsi *interpersonal meaning*.

Namun, sungguh disayangkan, ketika Pemilu di Sumut baru memulai babak baru, rakyat di propinsi ini disuguhi dengan permainan bahasa elit politik yang penuh dengan “kamufase”. Poster, foto serta gambar-gambar yang dipasang di jalan raya disuluruh penjuru kota dan kabupaten seakan hanya mengesankan mereka ingin mendapatkan simpati masyarakat. Ironisnya lagi, proses mendapatkan simpati masyarakat dilakukan dengan memaksakan diri membaur dengan adat dan budaya masyarakat di daerah tertentu. Para bakal calon Gubernur dengan sekuat tenaga sengaja ingin melakukan pencitraan kepada masyarakat melalui bahasa slogan yang mereka utarakan dalam setiap poster, banner, spanduk ataupun pamflet-pamflet yang sudah marak terpampang di seluruh penjuru kota dan kabupaten se-Sumatera utara. Tak ayal, perang bahasa pun terjadi antar bakal calon gubernur walaupun masih secara normatif namun memiliki makna semantik yang dalam dan berimplikasi pada psikologis masyarakat. Bahkan ada sebagian masyarakat yang marah kepada salah satu calon Gubernur yang dengan jelas-jelas memakai pakaian adat mereka, padahal calon tersebut bukanlah dari suku ataupun golongan masyarakat tersebut. Ini membuktikan bahwa para elit politik di Sumut ternyata masih suka melakukan kamufase diri melalui bahasa yang sesungguhnya jauh dari kesan akan merealisasikan janji-janji politiknya. Padahal rakyat Sumut ini sudah lama menunggu realisasi janji-janji

yang selalu digelontorkan dari mimbar-mimbar kampanye seperti pada Pemiluakda terdahulu.

c. Kesimpulan

Kuasa Bahasa politik sesungguhnya harus berbasis kerakyatan, karena dalam konteks ini, bahasa merupakan piranti komunikasi politik, baik verbal maupun nonverbal, yang menjadikan rakyat sebagai subjek yang perlu diangkat harkat dan martabatnya menuju nilai-nilai kemanusiaan sejati. Rakyat tak lagi dimanfaatkan dan dimobilisasi untuk kepentingan-kepentingan sempit dan sesaat, tetapi benar-benar memanusiakan mereka melalui konsistensi antara kata dan tindakan. Rakyat tak lagi butuh janji-janji politik yang mengapung-apung dalam slogan, tetapi butuh realisasi dan bukti konkret. Bukan janji, melainkan bukti. Hiperbolisme dan eufemisme bahasa melalui penggunaan ungkapan yang cenderung manis dan berlebihan justru akan menjadi bumerang bagi politisi kita ketika mereka gagal mewujudkan janji-janji itu. Dan ini harus menjadi pekerjaan rumah para elit politik yang akan maju dalam Pilkada SU 2013 mendatang. Wallahu A'alam

B. Efektifitas Bahasa Politik Cagubsu Jelang Pilkada

Pilkada merupakan pesta demokrasi tingkat daerah yang ditunggu-tunggu masyarakat, oleh karenanya berbagai persiapan dilakukan oleh yang memiliki kepentingan dalam event lima tahunan ini.

mulai dari Partai Politik, Ormas, LSM, OKP, Pengusaha, Politikus, Pejabat pemerintahan hingga yang lebih teknis seperti Tukang Sablon dan Tukang Bejak, semua elemen tersebut menyiapkan diri untuk menyambut perhelatan akbar perebutan kursi Sumut 1 mendatang. Penggalangan dukungan juga tengah terjadi dengan berbagai cara dan upaya dilakukan oleh para elit politik yang berkeinginan untuk maju sebagai Calon Gubernur. berbagai spanduk, poster, banner serta tampilan visual iklan di jalan sudah dipasang oleh masing-masing tim sukses mereka dengan disertai berbagai Slogan politik yang mencerminkan visi dan misi para bakal calon Gubernur tersebut.

Berbagai poster, banner, spanduk, serta tampilan visual di jalan-jalan raya tersebut tak pelak menjadi pemandangan menarik bagi masyarakat, beragam pendapat muncul di masyarakat, ada yang mengatakan bahwa pemasangan poster, banner spanduk dan tampilan-tampilan visual dari bakal calon Gubernur sangat bagus karena sebagai media sosialisasi Bakal Calon Gubsu, ada yang berpendapat wajar dan biasa-biasa saja, namun tidak sedikit juga yang berpendapat bahwa tampilan visualisasi para Bakal Calon Gubsu tersebut hanya membuang-buang waktu, tenaga dan materi saja, karena sebenarnya rakyat sudah mengetahui siapa yang paling pas dan cocok untuk menjadi pemimpin Sumut mendatang. berbagai pendapat ini mengisyaratkan tentang kondisi sebenarnya dari mutu bahasa komunikasi politik

para Bakal Calon Gubernur Sumut yang ingin maju pada pertarungan Pilkada 2013 mendatang. Masih efektifkah pola Bahasa politik yang gunakan oleh para Bakal Calon tersebut dalam meraih simpati masyarakat? Mari kita lihat bersama-sama.

a. Bahasa Dalam Komunikasi Politik

Bahasa mempunyai kaitan yang erat dalam proses komunikasi. Tidak ada satu peristiwa komunikasi pun yang tidak melibatkan bahasa. Komunikasi pada hakikatnya adalah proses penyampaian pesan dari pengirim kepada penerima. Hubungan komunikasi antara pengirim dan penerima, dibangun berdasarkan penyusunan kode atau simbol bahasa oleh pengirim (*chiffrement*) dan pembongkaran kode atau simbol bahasa oleh penerima (*dechiffrement*)

Mengingat kenyataan bahwa dalam berkomunikasi kita dihadapkan oleh varian penerima yang sangat beragam, maka keberhasilan komunikasi akan sangat ditentukan oleh bagaimana cara kita menyampaikan pesan. Tidak jarang dalam kenyataan sehari-hari kita dapat bahwa komunikasi yang kita lakukan tidak berhasil akibat ketidaktepatan cara berkomunikasi yang kita lakukan. Wardhaugh dalam bukunya *An Introduction to Sociolinguistics* (1986) menjelaskan bahwa ketika orang akan mulai berbicara paling tidak ada tiga hal yang mesti diperhatikan agar komunikasinya berlangsung efektif. *Pertama*, apa yang akan dibicarakan. *Kedua*, dengan siapa dia akan bicara,

dan *ketiga*, bagaimana cara membicarakannya. Dalam hal ini terkait dengan pemilihan ragam bahasanya, jenis kalimat, kosa kata, bahkan tinggi rendahnya suara saat berbicara. Keputusan mengenai mana yang akan dipakai sangat tergantung pada sejauh mana hubungan sosial dengan lawan bicara.

Pakar hermeneutika Gadamer (1977) menjelaskan bahwa ada makna tersembunyi ketika orang berkomunikasi yang saling dipahami (*hidden communication*). Itulah sebabnya, hal lain yang penting diperhatikan adalah memahami konteks pembicaraan. Sejauhmana *hidden communication* dapat dipahami itulah yang menentukan efektivitas dan keberhasilan dalam berkomunikasi. komunikasi yang berhasil adalah komunikasi yang berbekal kemampuan menyimpulkan apa yang dilakukan oleh partisipan terhadap bentuk bahasa dan konteks penggunaannya. Karena budaya kita berkomunikasi cenderung menggunakan tindak tutur tidak langsung (*indirect speech act*), maka perlu kemampuan menarik kesimpulan yang tepat dari apa yang dibicarakan.

Berdasarkan penjelasan di atas, kita dapat mengambil pemahaman bahwa keberhasilan dalam berkomunikasi disebabkan oleh beberapa hal, yaitu: (a) kemampuan menarik kesimpulan dalam proses komunikasi; (b) ketepatan pemilihan kosa kata; (c) kecermatan dalam melihat konteks dan situasi komunikasi; dan (d) ke-efektifan dalam berbahasa baik yang mencakup siapa mitra bicara, apa topik

pembicaraan dan bagaimana cara berkomunikasi. Apabila komunikasi berhasil dilakukan, maka pesan yang terkandung akan dengan mudah dapat diterima dan dilaksanakan sesuai dengan keinginan, namun sebaliknya Ketidakberhasilan dalam berkomunikasi dalam banyak hal akan menimbulkan masalah dan bahkan konflik.

Demikian halnya yang terjadi dalam interaksi politik. Interaksi politik merupakan interaksi khusus yang berbeda dengan interaksi sosial pada umumnya. Dalam interaksi politik bahasa mengemban fungsi sebagai wahana penyampai kebijaksanaan, memperoleh penghargaan dan untuk menyakinkan. Selain itu bahasa dalam komunikasi politik juga memiliki karakteristik khusus, karena bahasa dalam ranah ini sering dijadikan alat untuk mencapai kekuasaan, mempertahankan kekuasaan, dan juga tak jarang menurunkan kekuasaan.

Interaksi politik secara umum memiliki ciri-ciri tertentu dalam tindak komunikasinya. Komunikasi politik tidak bisa dilepaskan dari penggunaan bahasa yang mengarah pada penyampaian pesan, himbauan, harapan, permintaan, dan keinginan untuk pengaruh dan mempengaruhi. Dalam menjalankan fungsinya sebagai alat komunikasi politik, bahasa dikemas dengan menggunakan lambang-lambang atau pesan-pesan yang dapat mewakili ide atau pikiran para penuturnya. Oleh karena itu bahasa dalam komunikasi politik sudah sepantasnya menampilkan hal-hal yang bersifat

Persuasif dan lebih memiliki “greget” simetris dalam ranah pencapaian tujuan dari penutur kepada penerima pesan..

b. Bahasa Politik Cagubsu; Efektifkah?

Berdasarkan penjelasan di atas, saya berasumsi bahwa terdapat beberapa bentuk bahasa komunikasi politik yang digunakan oleh para Calon Gubernur yang akan bertarung dalam Pilkada SU 2013 nanti, bentuk-bentuk bahasa komunikasi tersebut disesuaikan dengan kondisi dan keadaan para calon saat ini. Bahasa komunikasi politik bagi *incumbent* tentu akan berbeda dengan bahasa komunikasi politik yang digunakan oleh para pesaing lainnya. Demikian halnya calon Gubernur yang sudah lama malang melintang menduduki jabatan struktural di lingkungan Pemda dan Pemprov akan lebih sering menggunakan bahasa propaganda yang menampilkan kepiawaian mereka dalam menjalankan roda pemerintahan. Lain halnya dengan para calon yang berasal dari kalangan luar atau para pengusaha, bahasa yang digunakan oleh kalangan ini lebih cenderung pada bahasa propadanda yang bersifat pengungkitan terhadap kinerja penguasa sebelumnya serta prospektif visi dan misi mereka kedepan.

Sumarlam (2012: 42) mendeskripsikan bahwa Ada beberapa tehnik dalam penyampaian bahasa komunikasi politik. Pertama, tehnik *Glittering Generalitis*, tehnik ini lebih bertujuan untuk menumbuhkan rasa emosional yang tinggi dengan bahasa yang

dipakai dalam komunikasi politik tanpa memperhatikan fakta dan kenyataan yang terjadi lapangan. Keunggulan tehnik ini adalah bahasa yang digunakan cenderung mampu mengarahkan orang banyak untuk menerima informasi tanpa mempertimbangkan fakta yang sebenarnya. Tehnik ini juga sedang digunakan oleh beberapa Bakal Calon Gubsu yang dapat kita jumpai di beberapa poster dan baliho sebagai berikut: “Membangun dalam Kebhinekaan”, “Ayo Sumut Bangkit; Perubahan Menuju Sumut Sejahtera”, “Romo Siap menjadi Gubsu”, “Bersama Membangun Sumut yang Mantap; Maju, Aman, Tertib, Asri dan Bersih”, “Tegas dan Bersahaja”, “Bangkit dan Bersatu”

Kedua, tehnik penyampaian bahasa komunikasi politik yang bertujuan untuk menyandarkan nama calon tertentu kepada kelompok atau tokoh tertentu dalam rangka pencitraan positif terhadap calon tersebut, tehnik ini lebih dikenal dengan sebutan *Glory Association*. Dalam tehnik ini para calon Gubernur sengaja memilih kelompok massa atau tokoh masyarakat yang memiliki kapasitas tinggi dan berpengaruh dimasyarakat untuk disandingkan dengan nama calon tersebut guna memperoleh citra positif dari masyarakat. Contoh pemakaian tehnik ini dapat dilihat dari beberapa baliho dan spanduk dalam even menjelang Pilgubsu 2013 ini seperti: “Sahabat semua Partai dan Etnis”. “Sahabat RE”, “

Ketiga adalah Tehnik *Card Stacking*, bahasa komunikasi politik dalam tehnik ini lebih mengarah

pada ungkapan-ungkapan bernada kesiapan para calon untuk memimpin dengan memaparkan keberhasilan-keberhasilan pada apa yang pernah diraihinya. Teknik ini biasanya digunakan oleh para *incumbent* atau calon yang saat ini sedang memimpin dan ingin dipilih untuk periode berikutnya. Pemakaian bahasa dalam teknik ini dapat dilihat dari bahasa calon Gubsu sebagai berikut: “Jangan tunda-tunda biar cepat penggunaannya” (terdapat pada anjuran untuk membayar pajak), dalam persepsi bahasa, kalimat ini mengandung unsur propaganda dengan ingin menunjukkan kepada khalayak ramai bahwa saat ini Sumut sedang dalam keadaan membangun dan perlu dukungan dari masyarakat dengan membayar pajak.

Teknik Card stacking juga dilakukan melalui penyebaran selebaran –selebaran yang berisi pemaparan keberhasilan seseorang selama memimpin suatu daerah atau wilayah tertentu, seperti pada selebaran atau brosur salah satu bakal Calon Gubernur Sumut dapat kita lihat banyak foto-foto yang menggambarkan berbagai kegiatan selama calon tersebut memimpin daerahnya, selain itu juga dipaparkan berbagai program dan terobosan yang telah dilakukannya selama menjabat, diantaranya dapat kita lihat dari slogan “Pelopor GDSM (Gerakan Deli Serdang Membangun)”, Lanjutkan Program GDSM” dan lain-lain.

Demikianlah beberapa Bahasa komunikasi politik para Bakal Calon Gubsu yang banyak menghiasi

jalan-jalan raya diberbagai daerah di Sumut. Semua bahasa tersebut digunakan sebagai jargon politik yang dinilai oleh para pamakainya akan mampu mendapatkan dan meraih simpati masyarakat, sehingga masyarakat akan mendukung dan memilih mereka pada pemilu pada Sumut mendatang. Masyarakatlah yang akan menilai sejauhmana efektifitas teknik berbahasa yang digunakan oleh para bakal calon Gubsu tersebut. Penilaian masyarakat akan berdasar pada Track Record dan sejarah masing-masing calon selama ini, sehingga bahasa yang digunakan oleh para Cabugsu akan dikonfirmasi secara subjektif oleh masyarakat, dan hasilnya hanya masyarakatlah yang mengetahuinya.

c. Kesimpulan

Kuasa bahasa dalam komunikasi politik mutlak dilakukan. berbagai gaya, bentuk, peyorasi kata, eufemisme kata, serta pemilihan kata yang sesuai dengan keadaan sebenarnya dan merupakan representasi dari pemikiran serta visi dan misi kedepan sangat mempengaruhi keberhasilan dalam meraih simpati masyarakat. Seperti halnya jelang pemilu pada Sumut saat ini, berbagai poster dan baliho yang terpampang dan menjadi konsumsi khalayak ramai saat ini telah merepresentasikan pemikiran, visi dan misi para Cabugsu yang akan maju pada pertarungan Pilgubsu 2013 mendatang. Setiap kata dan kalimat yang dibuat oleh para Cabugsu tersebut akan dikonfirmasi

langsung oleh masyarakat kepada setiap tindak dan tanduk para calon baik yang sudah dilakukan maupun yang sedang dilakukan saat ini. Sehingga apabila bahasa komunikasi politik para Cabugsu tersebut ternyata nisbi dan jauh dari realitas kepribadian calon, maka rakyat tidak akan bersimpati. Namun sebaliknya jika bahasa komunikasi politik yang digunakan oleh para calon sesuai dengan realitas yang ada, maka rakyat dengan mudah akan bersimpati dan menyatakan dukungan nyata. Wallahu A'lam.

C. Etika dan Estetika Bahasa Politik Cagubsu

Komunikasi politik sedang dibangun oleh masing-masing kandidat. Penyampaian visi, misi, dan orientasi oleh para kandidat semakin marak menghiasi spanduk dan baliho yang dipampang di jalan-jalan raya. Pemandangan ini cukup menarik perhatian, karena para kandidat menggunakan bahasa yang sabaik mungkin ditata guna meraup simpati masyarakat calon pemilih mereka. bahkan berbagai latar belakang bahasa simbol kesukuan pun tak ayal menjadi pilihan dengan harapan akan mendapat suara terbanyak dari suku yang bahasanya digunakan.

Dalam tulisan ini akan diungkap fenomena-fenomena menarik terkait dengan masa pemilihan Gubernur Sumatera Utara periode 2013-2018. Tulisan ini difokuskan pada etika dan estetika bahasa politik calon Gubernur Sumut. Etika dan estetika bahasa politik tersebut meliputi pemilihan ragam kata (Diksi), simbol

(meliputi: Pakaian adat, Pakaian kebesaran, pilar kedaerahan) serta latar belakang Gambar yang didalamnya terdapat foto calon Gubernur. Hal ini tentunya menarik karena dengan kajian mendalam tentang etika dan estetika bahasa politik calon Gubernur tersebut akan dapat kita lihat sejauhmana kualitas pemahaman Cagubsu terhadap keadaan Sumatera Utara, juga akan terlihat Visi dan misi pembangunan para calon Gubsu, serta dari mana para calon Gubsu akan memulai pekerjaan mereka apabila terpilih menjadi Gubernur nantinya.

a. Etika Bahasa Politik Cagubsu

Etika secara terminologi adalah nilai kesopanan yang terkandung dalam sikap dan perilaku seseorang. Dalam kajian bahasa, Etika dianggap sebagai cara penyampaian pesan (maksud) dalam peristiwa komunikasi. Penyampaian pesan yang memiliki nilai kesopanan (Etika) lebih dapat segera ditangkap maknanya oleh penerima pesan secara menyeluruh dan sempurna. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa masyarakat lebih senang melihat penampilan menarik dengan bahasa yang beretika dari seorang calon pemimpin ketimbang mereka yang menampilkan bahasa *slorooan* dan jauh dari nilai kesopanan. Maka Kesuksesan penyampaian pesan dalam komunikasi akan berdampak pada perubahan tujuan sebagaimana termaktub dalam peristiwa komunikasi tersebut.

Begitu juga dengan para calon Gubernur Sumut

yang saat ini sedang menggalang dukungan dari para konstituen mereka. penguatan dukungan dari masyarakat yang mereka harapkan saat ini sedang mereka lakukan dengan menampilkan bahasa yang mengandung nilai etika (kesopanan) tinggi, lihat saja kalimat “Mohon Do’a Restu dan Dukungan” yang ditampilkan bersama dengan foto kandidatnya sangat bernilai etika yang tinggi. Kata “Mohon” adalah Euphisme dari kata Minta dan ingin. Kata “Mohon” memiliki derajat yang lebih tinggi karena kehalusan dari kata itu sendiri, sehingga biasanya orang akan tergugah hatinya apabila mendengar kata “Mohon” terucap dari seseorang. Pemilihan Kalimat “Mohon Do’a Restu dan Dukungan” mengisyaratkan kesungguhan dari pengucapnya, calon tersebut benar-benar siap karena telah mengetahui banyak persoalan-persoalan Sumut dan akan dapat menyelesaikannya sesuai harapan masyarakat, jadi tinggal tinggal do’a dan dukungan masyarakat sumutlah yang akan mengantarkan calon tersebut menjadi orang nomor 1 di provinsi ini. Namun pertanyaannya kemudian adalah, apakah etika bahasa melalui pemilihan kalimat tersebut benar-benar mampu meraih simpati masyarakat? Jawabannya tentu akan bisa kita lihat dari hasil pemilu mendatang.

Kalimat lain dari bahasa politik cagubsu yang memiliki nilai etika tinggi bisa kita lihat dari kalimat sebagai berikut: “Gubernur,,, Insyallah”. Nilai etika dari kalimat ini terletak dari kata “Insyallah”. Ini mengisyaratkan bahwa seakan calon gubernur tersebut

tidak ingin takabbur dan benar-benar ingin menjadi Gubernur atas izin Allah. Pemilihan ini tepat karena masyarakat sumut adalah masyarakat religi dan memegang teguh nilai-nilai religiusitas. Sehingga pemilihan kalimat ini menjadi bernilai etika tinggi karena makna yang terkandung didalam kalimat yang dipakai sebagai semboyan politik menyentuh nilai-nilai agama. Disisi lain, pembuat kalimat tersebut sepertinya ingin menyatukan persepsi umat Islam agar memilih Gubernur dari kalangan Islam dengan penampilan sebagaimana diperlihatkan oleh calon gubernur itu sendiri. Ini tentunya tidaklah berlebihan karena background calon tersebut memang sejatinya diusung dari partai politik Islam, sehingga kesungguhan calon tersebut ingin menjadi gubernur diperlihatkan dengan konsistensi menggunakan jalan yang bernuansa Islami bahkan sampai pada pemilihan kalimatnya. Nah sekarang tinggal masyarakatlah yang menilai. Apakah etika bahasa tersebut benar-benar mampu menyentuh perasaan masyarakat khususnya umat Islam di Sumut ini atau justru sebaliknya?

Etika bahasa lain yang dapat kita amati adalah bahasa simbol yang diperlihatkan oleh para calon Gubernur Sumut melalui performasi meletakkan kedua tangan dengan posisi menyatu didepan dada (baca: Penghormatan). Cukup banyak calon melakukan hal tersebut, fenomena ini bisa kita dapati pada gambar spanduk-spanduk yang ditempel di becak-becak motor serta baliho-baliho dipenjuru kota dan kabupaten.

Performasi ini muncul sebagai indikasi bahwa para calon gubsu tersebut adalah orang-orang yang luwes dan sopan serta memiliki kerendahan hati. Performasi seperti ini sepertinya menjadi penguat kesopanan dari slogan dan semboyan politik yang ditampilkan. Bahkan penampilan seperti ini sudah menjadi *trend* tidak hanya bagi calon gubernur Sumut sekarang, namun sudah menjadi performasi para politikus secara nasional di negeri ini.

Sesungguhnya ini membuktikan bahwa etika bahasa baik simbol maupun non simbol adalah bagian dari instrument para politikus dalam menyampaikan ide dan pikiran mereka dalam ranah politik, jauh hari Norman Failough (1980) sudah mengingatkan bahwa didalam realitas politik, bahasa mengambil peran yang sangat signifikan antara sebagai penentu tersampainya sebuah tujuan atau justru menjadi pemicu kegagalan sebuah tujuan. Oleh karena itu jika Etika bahasa yang digunakan dalam konteks Pilkada Sumatera Utara kali ini hanyalah lisptik belaka selama masa kampanye dan proses pemilihan, sedangkan realitas yang terjadi justru sebaliknya ketika sudah terpilih mereka lupa dengan etika bahasa yang mereka buat sendiri. Akibatnya banyak janji-janji politik terabaikan, banyak perubahan sikap para politikus yang pada masa kampanye sopan, santun, beretika, lugas dan luwes berubah menjadi seperti harimau yang siap memangsa apa saja yang ada di depan mereka asal perutnya kenyang. Maka hal in sungguh sangat disayangkan.

b. Estetika Bahasa Politik Cagubsu; Orientasi Kedaerahan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, Estetika diterjemahkan sebagai sesuatu yang memiliki keindahan. Sementara itu, estetika bahasa bergerak pada cerminan bahasa simbol melalui visualisasi yang sengaja ditampilkan dan penuh dengan makna persuasi. Karena itu estetika bahasa juga merupakan kajian menarik yang perlu digali maknanya. Tanpa terkecuali pada momentum Pilkada Sumut saat ini, meskipun pilkada ini adalah pemilihan Gubernur, yang tentunya *scope* (wilayah)nya bukanlah daerah tetapi Provinsi, namun sepertinya para calon Gubernur lebih senang mengangkat isu-isu kedaerahan sebagai lokomotif politik mereka. Penampilan yang menarik berlatar belakang identitas kedaerahan kerap menghiasi spanduk dan baliho kampanye para calon Gubsu.

Salah satunya adalah Danau Toba, Danau ini dijadikan latar oleh salah satu kandidat Gubsu -- tentunya dengan berbagai kalimat dan kata yang menghiasinya-- mengindikasikan bahwa kandidat Gubsu tersebut bermaksud mengembangkan sektor pariwisata sebagai aset provinsi yang tentunya sangat prospektif karena saat ini kurang diperhatikan. Hal ini menjadikan spanduk maupun baliho yang dipasang oleh calon Gubsu tersebut menjadi memiliki nilai estetika dan sarat pesan didalamnya. Latar dalam gambar lainnya adalah Rumah adat Batak, istana maimun, Masjid Raya Al-Mahsun dan lainnya. kandidat

yang menggunakan hal-hal diatas sebagai salah satu latar dalam gambar spanduknya mengisaratkan bahwa pelestarian budaya lokal perlu dilakukan sebagai salah satu kekuatan pembangunan masyarakat yang berbudaya dan bermartabat. Hal semacam ini sangat cocok dilakukan, karena kondisi masyarakat kontemporer saat ini lebih senang menerima masuknya budaya asing tanpa adanya filterisasi terhadap budaya asing itu sendiri, sehingga sedikit demi sedikit namun pasti budaya local mulai ditinggalkan dan akhirnya dikhawatirkan akan mengalami sirna permanen.

Selanjutnya, kandidat yang bermaksud memprioritaskan sektor Pertanian dan perkebunan masyarakat Sumut lebih senang dengan langsung menampilkan visualisasi gambar keadaan pertanian dan perkebunan di Sumatera Utara. Penampilan visualisasi Pertanian dan perkebunan sumut sangat bernilai estetika tinggi karena mampu menampilkan keadaan yang sebenarnya dari pola kehidupan masyarakat sumut pada umumnya. Harapan yang ingin dicapai oleh kandidat yang menggunakan visualiasi ini barangkali sama dengan harapan masyarakat sumut yaitu kesejahteraan dan kemakmuran dalam sandang, pangan, dan papan yang digerakkan melalui sektor utama pertanian dan perkebunan. Yang menjadi pertanyaan adalah, sejauhmana kandiati yang menggunakan visualisasi gambar ini mengetahui betul tentang kondisi realitas dan permasalahan pertanian dan perkebunan masyarakat Sumut? Atau latar dari

visualisasi yang ditampilkan melalui spanduk dan baliho ini justru hanya sebagai lipstick kampanye penggalangan dukungan dalam masa pemilihan kepala daerah saat ini saja? Kita tunggu saja tanggal mainya.

Nuansa estetika lain dapat kita jumpai juga dari pakaian adat yang digunakan oleh beberapa kandidat. Kandidat yang berasal dari suku Melayu lebih menonjolkan pakaian adat melayu dalam beberapa foto di baliho dan spanduk mereka, sementara itu kandidat dari suku batak lebih senang dengan *ulos* yang melingkar di pundak dan bahu mereka, dan juga kandidat yang memiliki suku jawa tidak ketinggalan menggunakan *blangkon* lengkap dengan pakaian kebesaran adat jawanya dalam setiap gambar yang terpampang dalam spanduk dan balihonya. keberagaman ini menimbulkan keunikan tersendiri dari proses pemilukada sumut saat ini. Hal semacam ini tentunya semakin membuktikan bahwa Sumut adalah cerminan Indonesia kecil dari sudut pandang keragaman suku, adat dan budaya namun tetap mengedepankan nilai-nilai hormat menghormati serta toleransi yang tinggi antar warga masyarakatnya. Satu hal yang perlu diperhatikan dari fenomena pemakaian pakaian dan kebesaran adat oleh para Cagubsu saat ini adalah bahwa siapapun dan dari suku manapun Gubernur terpilih nantinya harus mampu menanggalkan kepentingan suku dan ras mereka demi pembangunan Sumut kedepan yang lebih baik dan bermartabat.

c. Kesimpulan

Akhirnya, Kuasa bahasa terletak pada seberapa jauh ia dapat melakukan tugas penyampaian ide dan pikiran yang tertuang sebagai visi, misi dan orientasi para kandidat Gubernur Sumatera Utara dalam pemilu pada saat ini semoga saja menjadikan masyarakat Sumut semakin objektif untuk memilih siapa calon yang paling pas untuk memimpin provinsi besar ini lima tahun mendatang. Beragam etika dan estetika bahasa politik yang digunakan oleh para kandidat tersebut tak pelak hanyalah sebagai upaya untuk meyakinkan masyarakat bahwa mereka siap lahir dan batin untuk menjadi Gubernur Sumut selama lima tahun mendatang. Kejelihan dan obyektifitas masyarakat sangat diperlukan agar nantinya kita tidak salah memilih pemimpin seperti Katak dalam tempurung, karena jika tidak penyesalanlah yang akan berbuah dari kesalahan memilih pemimpin yang hanya pandai berkamuflase bahasa dan pandai menggunakan etika dan estetika bahasa sebagai lokomotif persuasi politik mereka. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita semua dalam setiap usaha untuk kemakmuran dan kedamaian dunia khususnya Sumatera Utara, Amin.

D. Membangun Budaya Politik Damai Dalam Kearifan Bahasa

Bahasa dalam konteksnya bukan hanya peristiwa komunikasi verbal - tekstual semata, bahasa

tidak hanya digunakan secara monoton untuk menyampaikan sesuatu *ansih* melalui kata - kata maupun tulisan. Setiap situasi yang terjadi di masyarakat hampir selalu tercermin di dalam praktik berbahasa. Sebab, salah satu peran bahasa adalah untuk membangun dan memelihara hubungan sosial, untuk mengungkapkan peranan-peranan sosial, termasuk peranan komunikasi yang diciptakan oleh bahasa itu sendiri. Karenanya, situasi yang aman dan damai akan melahirkan simbol-simbol kebahasaan yang mantap dan stabil atau konstan dalam kosa katanya. Sebaliknya, situasi yang bergejolak dan tidak menentu juga akan tercermin dalam ungkapan-ungkapan bahasa yang bersifat ambigu dan makna yang simpang siur. Kesimpangsiuran dan keambiguan makna yang demikian ini merupakan fenomena kebahasaan yang timbul karena adanya gejolak kehidupan di masyarakat.

Masyarakat terus berubah, pun juga bahasa, sehingga bahasa dan realitas sosial tidak bisa dipisahkan. Karena itu, perubahan bahasa terjadi karena perubahan sosial baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Sebaliknya, perubahan sosial berimplikasi pada perubahan bahasa. Karenanya, bahasa tidak hanya dibentuk dan ditentukan, tetapi juga membentuk dan menentukan realitas sosial. Bahasa bukan sekadar alat untuk mengungkapkan pikiran, tetapi wahana komunikasi umat manusia. Kehadiran bahasa dalam kehidupan manusia tidak bisa dianggap secara tiba-tiba, tetapi melalui proses sistem

kode atau lambang yang disepakati oleh warga suatu masyarakat atau kelompok secara bersama-sama. Karenanya, bahasa juga dianggap berdimensi sosial. Sebab, bahasa merupakan aspek kegiatan kehidupan sosial manusia.

Tidak banyak yang menyadari bahwa perkembangan bahasa—tentu saja termasuk perubahannya---mengungkapkan banyak tentang keadaan masyarakat tempat bahasa digunakan. Masalah-masalah yang berkaitan dengan perkembangan bahasa memang tidak hanya ditinjau semata-mata dari sisi teknis, misalnya bagaimana menyebarkan kosakata, ejaan, pemenggalan kata dan pola kalimat yang benar. Tetapi dari sisi lain, bahasa dapat ditinjau berkaitan dengan perkembangan dalam masyarakat yang lebih mendasar, misalnya mengenai dinamika perubahan sosial, pembentukan dan pergeseran nilai-nilai sosial, pembentukan budaya, bahkan sebagai *lokomotif* politik. Semua yang terjadi di masyarakat terungkap sejelas-jelasnya dalam bahasa. Dengan kata lain, bahasa merupakan cermin paling jelas keadaan masyarakat penggunaannya. Dengan kata lain ke arah mana bahasa akan dibawa tergantung dari masyarakat penggunaannya, ke arah terbentuknya budaya kekerasankah, atau sebaliknya ke arah terbentuknya budaya damai melalui kearifan berbahasa.

a. Bahasa Dalam Peristiwa Sosial Budaya

Dalam kajian sosiolinguistik, bahasa dipelajari sebagai suatu proses sosial yang membentuk budaya, karenanya bahasa tidak mungkin dikaji lepas dari faktor sosial budaya yang berlaku pada saat itu. Bahasa bukanlah melulu alat komunikasi yang steril, melainkan juga untuk menunjukkan identitas sosial budaya, untuk memelihara hubungan sosial budaya dan acapkali merupakan peristiwa sosial budaya. Dalam dimensi ini tentulah kita akan kehilangan identitas sosial dan budaya manakala suatu komunikasi yang terjadi lepas dari peristiwa berbahasa dan konteks bahasa itu sendiri.

Realitas yang terjadi di masyarakat menunjukkan adanya perbedaan antara idealitas dan realitas. Idealitas yang sesungguhnya merupakan bentuk sebenarnya dalam penggunaan bahasa dimasyarakat sering mengalami *collaps position* (posisi yang salah arah) dimana sering ditemukan penyalahgunaan fungsi bahasa yang digunakan dimasyarakat. Kalimat-kalimat seperti "*hanya Anjing yang kencing disini*", "*Tikus kantor seharusnya dibunuh*", merupakan kalimat yang ditujukan untuk manusia akan tetapi menggunakan hewan sebagai representasi. Hal ini tentunya mengalami disfungsi kalimat, namun anehnya hal semacam ini seakan sudah layak digunakan dimasyarakat dan dianggap sebagai sesuatu yang lumrah. ini tentunya berbahaya apabila digunakan secara terus menerus. Masyarakat akan kehilangan kearifan berbahasa manakala kalimat-kalimat tersebut masih digunakan.

Malah dikhawatirkan bahasa yang digunakan dalam masyarakat akan lebih cenderung mengarah kepada Sarkasme dan bisa dipastikan akan kehilangan nilai kearifannya.

Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat mengamati bahwa gaya bahasa seseorang atau pilihan ragam bahasa (*language choice*) seseorang akan sangat terkait dengan faktor “luar bahasa”. Artinya dalam konteks ini tidak seorang pun akan menggunakan bahasa yang sama (bahasa formal) dengan lawan berbicara yang berbeda, baik dari sisi umur, tingkat pendidikan, tingkat sosial, jenis kelamin, kekerabatan, pekerjaan dan sebagainya. Seseorang akan mengatakan: *“terbang kemana aja kau bro, kok lama kali ga muncul”*, kepada tema sejawatnya yang sudah lama tidak dilihatnya. Hal ini tentu berbeda apabila dia bertemu dengan dosennya yang sudah lama tidak datang mengajar ke kampus karena menjadi pembicara pada salah satu seminar di kabupaten Toba samosir, tentu dia akan berkata: *“apa kabar mam, kami ga jumpa mam beberapa hari ini, mam sibuk ya”*. Hal tersebut jelas membuktikan bahwa pilihan ragam bahasa (*language choice*) sangat bergantung pada setting dan stratifikasi sosial dimana bahasa itu digunakan. Walaupun terjadi diferensiasi dalam penggunaan bahasa dalam komunikasi yang lebih dipengaruhi faktor stratifikasi sosial, namun penggunaan bahasa diatas cenderung masih memiliki sifat kearifan berbahasa karena tidak mendiskreditkan salah satu lawan bicara dan termasuk

dalam kategori win-win solution.

Dari sini jelas bahwa dalam kaitanya, berbahasa adalah suatu peristiwa sosial dan budaya, bahwa antara bahasa dan konteks sosial tidak bisa dipisahkan, sampai akhirnya berbahasa dalam konteks sosial melahirkan suatu kebudayaan dimasyarakat. Hal ini bisa dipahami karena bahasa hakikatnya adalah sarana untuk menyampaikan sikap pribadi dan hubungan antar pribadi yang terjadi dalam interaksi masyarakat. Berbahasa dalam ranah ini secara *tali temali* sekaligus membentuk peristiwa sosial dan budaya. pun juga sebaliknya setting sosial dan kondisi budaya mendorong pemilihan ragam bahasa (*language choice*) yang sesuai dengan konteksnya. Jadi benarlah bahwa komunikasi interpersonal lebih banyak digunakan dimasyarakat dan mempengaruhi kondisi bahasa, pembentukan sosial dan budaya masyarakat.

b. Bahasa Dalam pergumulan Politik di Indonesia

Politik tentu tidak asing lagi bagi telinga rakyat Indonesia, setelah lepas dari hegemoni kekuasaan orde baru, kemudian masuk kedalam era baru yang lebih dikenal dengan era reformasi, dan sampai sekarang kita masih berada di era reformasi. Masyarakat telah disuguhi dengan perubahan-perubahan diberbagai sektor, Tentunya implikasi dari perubahan tersebut membawa dampak yang besar disemua lini penting negeri ini, khususnya politik. Realisasi sistem politik

yang lebih *systemic*, transparan, akuntabel, kredibel, jujur dan selalu berpedoman pada kepentingan rakyat bukan kepentingan sesaat para penguasa menjadi misi dari perubahan politik di era ini. Usaha untuk memerankan peran politik sebaik mungkin terlihat dari usaha-usaha yang dilakukan oleh para elit politik di negeri ini dengan menempatkan sesuatu pada tempatnya, ranah hukum bekerja maksimal dengan dibentuknya Mahkamah konstitusi, Komisi Pemberantasan Korupsi (baca: KPK), dan reformasi ditubuh Polri sebagai aparat garda depan penegak hukum di negeri ini. Begitu juga ranah Ekonomi, ranah pendidikan, pemerintahan, kesemua ranah tersebut mengalami perubahan mendasar demi mewujudkan perubahan yang lebih baik yang berorientasi pada kepentingan rakyat dan menumbuhkan martabat bangsa. Hal diatas diupayakan sebagai *mindset* bangsa ini untuk mewujudkan demokrasi yang dicita-citakan.

Dalam dunia politik, peranan bahasa sangat besar. Proses politik merupakan praktik komunikasi, bagaimana mendayagunakan bahasa sebagai alat komunikasi politik yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Tokoh-tokoh politik mempergunakan bahasa bukan saja untuk menyatakan pendapatnya melainkan untuk menyembunyikannya. Hal itu karena di balik pikiran itu terdapat kepentingan-kepentingan yang harus dipertahankan. Untuk menyembunyikan pikiran-pikiran politik tersebut, bahasa politik harus ditata sedemikian rupa karena

dalam struktur linguistiknya penuh dengan muatan kekuasaan yang tersembunyi. Selain itu, tak jarang para politikus di negeri ini juga menggunakan bahasa sebagai senjata utama untuk *mendiskreditkan* (baca: melemahkan) lawan politiknya, pembunuhan karakter (*character assassination*) terhadap lawan politik selalu dilontarkan dengan menggunakan bahasa, sementara itu pilihan bahasa yang digunakan untuk pelemahan dan pembunuhan karakter tersebut juga bervariasi, ada yang *fulgar*, sindiran, jargon politik yang berlawanan dengan makna sebenarnya (*opposite meaning*) serta penyebutan julukan yang beraneka ragam terhadap lawan politik masing-masing. Disamping itu, Bahasa juga memegang peranan penting dalam upaya untuk meyakinkan massa terhadap visi, misi dan orientasi yang ingin diwujudkan oleh elit politik atau partai politik tertentu. Maka dalam hal ini, jelas bahwa bahasa adalah faktor yang urgen dalam pembentukan *mindset* masyarakat dalam ranah politik di negeri kita ini.

Bahasa sejatinya merupakan piranti komunikasi universal yang sudah ada sejak peradaban umat manusia itu lahir. Sebagai piranti komunikasi, bahasa akan terus berkembang seiring dengan dinamika zaman dan masyarakat penggunaannya. Bahasa, dengan demikian, akan terus ada dan eksis hadir di tengah-tengah peradaban umat manusia sebagai media komunikasi dan interaksi dalam berbagai ranah kehidupan, termasuk dalam ranah politik dan perubahannya. Bahasa sebagai alat penyampaian ide,

tujuan, serta kepentingan tentunya mengambil bagian dari perubahan ini, tidak ada satupun perubahan ranah politik dinegeri ini yang luput dari bahasa sebagai alat komunikasinya. Bahasa selalu menjadi otak dari pembentukan karakter politik yang ingin dibangun oleh para elit politik. Karenanya, mustahil penyampaian visi, misi, orientasi, ide gagasan dan kepentingan yang ingin disampaikan oleh para elit politik sampai kepada rakyat tanpa melalui penggunaan bahasa. karenanya pilihan bahasa (*Language choice*) haruslah mampu merepresentasikan maksud yang ingin disampaikan.

Sementara itu dalam sudut pandang politik kekuasaan, Bahasa adalah senjata mematikan bagi kekuasaan, seperti yang dikemukakan Barnes (2004: 78) bahwa politik adalah suatu seni atau kegiatan untuk memperoleh kekuasaan dan menambah kekuasaan. Dengan demikian, politikus harus menguasai bahasanya untuk alasan penting karena siapapun yang menguasai bahasa, ia akan berkuasa. Akan tetapi, pendapat Barnes tersebut dapat sebaliknya, dengan bahasa seseorang dapat tercerabut dari kekuasaannya. Contoh konkretnya adalah pernyataan Abdurahman Wahid (Gus Dur) yang gemar membuat *blunder* bahasa, "Anggota DPR kok seperti taman kanak-kanak", "Gitu saja kok repot", "Ga jadi presiden ga pathe'en". Pernyataan tersebut menyebabkan anggota DPR gerah dan akhirnya melawan Gus Dur. Kontroversi bahasa pada akhirnya membuat Gus Dur jatuh dari kekuasaan. Pernyataan Gus Dur dianggap oleh DPR saat itu

sebagai suatu ‘keterkejutan’ bahasa. Barangkali hal semacam ini (Keterkejutan) lebih dikarenakan kungkungan (hegemoni) bahasa yang telah diderita oleh rakyat Indonesia selama kekuasaan orde baru, sehingga para elit politik saat itu merasa bahwa apa yang dikatakan oleh Gus Dur merupakan suatu hal yang tabu dan melanggar aturan – aturan *maksim pragmatisme* bahasa yaitu *maksim norma* dan *maksim kesantunan berbahasa*.

Bahasa politik sangat erat kaitannya dengan upaya untuk merebut simpati rakyat. Ia hadir dan dibutuhkan untuk menumbuhkan pencitraan tertentu agar rakyat terpengaruh dan tersugesti oleh propaganda dan ikon-ikon politik yang ditawarkan. Dalam konteks demikian, seorang politisi yang cerdas, dengan sendirinya perlu memiliki kecerdasan linguistik dalam upaya membangun komunikasi dan interaksi dengan publik. Ini artinya, tuturan (*speech*) politik yang mereka lontarkan idealnya mengandung muatan dan misi kerakyatan melalui bahasa yang sederhana, gampang dicerna, dan terhindar dari kesan bombastis.

Bahasa politik sungguh harus bisa mengkomunikasikan maksud dan tujuan dari para elit politik kepada rakyat sebagai subyek ide maksud dan tujuan tersebut. Penggunaan bahasa yang lugas, sederhana, gampang dicerna dan tidak terlalu *membabi buta* akan dengan mudah dicerna oleh rakyat, karena ketika sedang membuat pernyataan – pernyataan politik --

walaupun para elit politik tidak berhadapan langsung secara visual dengan rakyat-- akan tetapi sejatinya mereka sedang berkomunikasi dengan rakyat lewat pernyataan - pernyataan yang disampaikan, hal inilah yang dalam ilmu sosiolinguistik dikatakan sebagai "*Interactional function*". dalam proses *Interactional function*, pembicara -- para elit politik-- melalui pernyataan-pernyataannya harus mampu mengkomunikasikan ide dengan bahasa yang bisa dicerna oleh rakyat.

Namun, sungguh disayangkan, ketika Pemilu sudah menjelang babak-babak akhir, rakyat di negeri ini disuguhi dengan permainan bahasa politik "kekerasan" antar parpol atau antar caleg. Perang iklan di media yang memanas atau maraknya baliho politik melalui tampilan wajah narsis yang elitis dan tidak pede, merupakan salah satu indikator, betapa politisi kita selama ini abai terhadap bahasa politik yang berbasis kerakyatan. Mesin politik yang mereka gunakan untuk mendulang suara rakyat tidak lagi digerakkan dengan semangat dan nurani kerakyatan, tetapi semata-mata untuk menjegal dan melumpuhkan lawan politik yang hendak menjadi rivalnya. Rakyat yang sudah lama menunggu realisasi janji-janji yang selalu digelontorkan dari mimbar-mimbar kampanye justru dikebiri dan dimarginalkan. Sehingga konsekwensinya, sampai saat ini kita belum bisa secara utuh melihat realisasi dari janji-janji para pemimpin negeri ini yang dulu disampaikan pada saat pemilu tahun 2009. Hal ini

barangkali disebabkan salah satu faktornya adalah *kamuflase bahasa* pada saat mereka berkampanye, dan ini sungguh sangat berbahaya.

Akhirnya, Bahasa politik sesungguhnya harus menunjukkan kearifan serta berbasis kerakyatan, karena dalam konteks ini, bahasa merupakan piranti komunikasi politik, baik verbal maupun nonverbal, yang menjadikan rakyat sebagai subjek yang perlu diangkat harkat dan martabatnya menuju nilai-nilai kemanusiaan sejati. Rakyat tak lagi dimanfaatkan dan dimobilisasi untuk kepentingan-kepentingan sempit dan sesaat, tetapi benar-benar memanusiakan mereka melalui konsistensi antara kata dan tindakan. Rakyat tak lagi butuh janji-janji politik yang mengapung-apung dalam slogan, tetapi butuh realisasi dan bukti konkret. Bukan janji, melainkan bukti. Hiperbolisme, eufemisme serta kamuflase bahasa melalui penggunaan ungkapan yang cenderung manis dan berlebihan justru akan menjadi bumerang bagi politisi kita ketika mereka gagal mewujudkan janji-janji itu setelah mereka menjabat.

c. Kesimpulan

Kuasa bahasa merupakan piranti sosial, politik, dan budaya. Bahasa mampu membentuk realitas sosial yang pada saat bersamaan juga memperkuat budaya yang berlaku dimasyarakat. Dalam ranah politik, bahasa juga memegang peranan yang sangat penting, karena melalui pengolahan dan pemilihan bahasa yang

cermat maksud dan tujuan politik tertentu akan dapat dengan mudah memperoleh simpati masyarakat.

Pemilihan dan penggunaan bahasa yang tidak sesuai dengan konteks situasi dan konteks budaya akan menimbulkan berbagai konflik, baik konflik *horizontal* (sejajar) antara pengguna bahasa (baca: pembicara dan pendengar) maupun konflik vertikal (tegak lurus, ke atas dan kebawah) antara pemegang *policy* -kebijakan-- (baca: Pemerintah, Elit politik) dengan obyek khalayak ramai (masyarakat). Hal tersebut lebih lanjut tentu akan menimbulkan konflik sosial, politik bahkan budaya. Karenanya, kecermatan dalam pemilihan dan penggunaan bahasa mutlak diperlukan dalam situasi dan kondisi tertentu dan dipahami sebagai sebuah peristiwa yang lazim terjadi. Kita tentunya senantiasa menginginkan bangsa kita berada dalam situasi yang damai melalui kearifan bahasa masyarakat dan para elit politik di negeri ini. Semoga.

BAB III

KUASA BAHASA DALAM BINGKAI PENDIDIKAN

A. Pendidikan Berbudaya Melalui Kesantunan Bahasa

Para orang tua, Guru, Dosen, Ustadz, Kyai, selalu memberikan nasehat agar kita senantiasa menggunakan bahasa yang santun dalam kehidupan sehari-hari. Nasehat ini sedemikian kuatnya sehingga jika kita berbahasa kasar dalam komunikasi dengan mereka maka sebutan dan julukan yang buruk akan kita terima. Realitas ini nyata terjadi dalam kehidupan sehari-hari bahkan justru telah menjadi budaya. Artinya sesungguhnya keinginan untuk berbahasa yang santun tidak berbanding searah dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Kenapa ini terjadi? Kesalahan konsep dan cita-cita luhurkah, atau justru tidak adanya contoh yang nyata kepada generasi muda tentang praktek berbahasa yang santun, atau memang budaya kita orang Indonesia yang hanya pandai berkonsep saja dan susah menerapkannya?

a. Bahasa Sebagai Budaya Bangsa

Bahasa dipelajari sebagai suatu proses sosial yang membentuk budaya, karenanya bahasa tidak mungkin dikaji lepas dari faktor sosial budaya yang berlaku. Bahasa bukanlah melulu alat komunikasi yang steril, melainkan juga untuk menunjukkan identitas sosial budaya, untuk memelihara hubungan sosial budaya dan acapkali merupakan peristiwa sosial budaya. Dalam dimensi ini tentulah kita akan kehilangan identitas sosial dan budaya manakala suatu komunikasi yang terjadi lepas dari peristiwa berbahasa dan konteks bahasa itu sendiri. Setiap situasi yang terjadi di masyarakat hampir selalu tercermin di dalam praktik berbahasa. Sebab, salah satu peran bahasa adalah untuk membangun dan memelihara hubungan sosial, untuk pengungkapan peranan-peranan sosial, termasuk peranan komunikasi yang diciptakan oleh bahasa itu sendiri (Rahardjo 2002: 116). Karenanya, situasi yang aman dan damai akan melahirkan simbol-simbol kebahasaan yang mantap dan stabil atau konstan dalam kosa katanya. Sebaliknya, situasi yang bergejolak dan tidak menentu juga akan tercermin dalam ungkapan-ungkapan bahasa yang bersifat ambigu dan makna yang simpang siur. Kesimpangsiuran dan keambiguan makna yang demikian ini merupakan fenomena kebahasaan yang timbul karena adanya gejolak kehidupan di masyarakat.

Perubahan bahasa selalu terjadi karena perubahan sosial baik yang disengaja maupun yang

tidak disengaja. Begitu juga salah satu faktor perubahan sosial adalah akibat dari berkembangnya bahasa. Karenanya, bahasa tidak hanya dibentuk dan ditentukan, tetapi juga membentuk dan menentukan realitas sosial. Bahasa bukan sekadar alat untuk mengungkapkan pikiran, tetapi instrumen komunikasi manusia secara global. Kehadiran bahasa dalam kehidupan manusia telah melalui proses sistem kode atau lambang yang disepakati oleh warga suatu masyarakat atau kelompok secara bersama-sama. Karenanya, bahasa pasti berdimensi sosial. Sebab bahasa merupakan salah satu aspek kegiatan kehidupan sosial manusia.

Bahasa dapat ditinjau berkaitan dengan perkembangan dalam masyarakat yang lebih mendasar, misalnya mengenai dinamika perubahan sosial, pembentukan dan pergeseran nilai-nilai sosial, pembentukan budaya, bahkan sebagai *lokomotif* politik. Semua yang terjadi di masyarakat terungkap sejelas-jelasnya dalam bahasa. Dengan kata lain, bahasa merupakan cermin paling jelas keadaan masyarakat penggunaannya. Dengan kata lain ke arah mana bahasa akan dibawa tergantung dari masyarakat penggunaannya, ke arah terbentuknya budaya kekerasankah, atau sebaliknya ke arah terbentuknya budaya berbahasa yang arif dan dapat mencerminkan budaya bangsa secara sempurna.

b. Bahasa Sebagai Realitas Sosial

Bahasa yang digunakan di masyarakat belakangan ini sering menunjukkan adanya perbedaan antara idealitas dan realitas. Idealitas yang sesungguhnya merupakan bentuk sebenarnya dalam penggunaan bahasa dimasyarakat sering mengalami *collaps position* (posisi yang salah arah) dimana sering ditemukan penyalahgunaan fungsi bahasa yang digunakan dimasyarakat. Kalimat-kalimat seperti “*hanya Anjing yang kencing disini*”, “*Tikus kantor seharusnya dibunuh*”, merupakan kalimat yang ditujukan untuk manusia akan tetapi menggunakan hewan sebagai representasi. Hal ini tentunya mengalami disfungsi kalimat, namun anehnya hal semacam ini seakan sudah layak digunakan dimasyarakat dan dianggap sebagai sesuatu yang lumrah. ini tentunya berbahaya apabila digunakan secara terus menerus. Masyarakat akan kehilangan kearifan berbahasa manakala kalimat-kalimat tersebut masih digunakan. Malah dikhawatirkan bahasa yang digunakan dalam masyarakat akan lebih cenderung mengarah kepada Sarkasme dan bisa dipastikan akan kehilangan nilai kearifannya.

Dari sini jelas bahwa dalam kaitanya, berbahasa adalah suatu peristiwa sosial, bahwa antara bahasa dan konteks sosial tidak bisa dipisahkan, sampai akhirnya berbahasa dalam kontek sosial melahirkan suatu kebudayaan dimasyarakat. Hal ini bisa dipahami karena bahasa hakikatnya adalah sarana untuk

menyampaikan sikap pribadi dan hubungan antar pribadi yang terjadi dalam interaksi masyarakat. berbahasa dalam ranah ini secara *tali temali* sekaligus membentuk peristiwa sosial dan budaya. pun juga sebaliknya setting sosial dan kondisi budaya mendorong pemilihan ragam bahasa (*language choice*) yang sesuai dengan konteksnya. Jadi benarlah bahwa komunikasi interpersonal lebih banyak digunakan dimasyarakat dan mempengaruhi kondisi bahasa, pembentukan sosial dan budaya masyarakat.

c. Pendidikan Berbudaya Melalui Bahasa

Betulkah kita adalah bangsa yang berbudaya? Ramah sikap, sopan perbuatan dan santun dalam berbicara dan berkata-kata (berbahasa). Sudah diketahui dunia internasional bahwa keramahan orang Indonesia selaku bangsa Timur tidak hanya pada sesama anggota keluarga dan masyarakat, namun juga kepada orang lain. Slogan “Tamuk adalah raja”, menjadi bukti bahwa orang Indonesia memiliki komitmen untuk bersikap memuliakan orang lain yang hadir di tengah kita.

Tampaknya, doktrin tersebut diatas perlu ditinjau ulang, kita sebagai masyarakat yang berbudaya dengan ciri khas ramah dalam sikap, sopan dalam perbuatan, serta santun dalam tutur kata perlu ditinjau ulang, sebab akhir-akhir ini bahasa kekerasan cenderung dijadikan cara menyampaikan kepentingan. Trend tawuran antar pelajar yang sebenarnya dipicu

oleh persoalan sepele, demonstrasi mahasiswa yang sering berakhir ricuh dan merusak fasilitas umum, serta cara-cara main hakim sendiri oleh masyarakat terhadap orang yang terindikasi berbuat kriminal semakin menunjukkan bahwa kita sebenarnya sudah keluar dari slogan sebagai Masyarakat Indonesia yang senang menghormati orang lain. Hal ini disebabkan karena slogan ramah bersikap, sopan bertindak dan santun dalam tutur kata semakin sulit dicari contoh empiriknya di masyarakat, karena hampir setiap peristiwa menghebohkan selalu dipicu oleh budaya kekerasan dan berakhir dengan cara kekerasan pula.

Akibat pergeseran identitas sebagai masyarakat Indonesia yang ramah dalam sikap, sopan dalam perbuatan dan santun dalam tutur kata memunculkan terjadinya budaya yang keluar dari *rel* ketimuran. sehingga kita saat ini tidak lagi dikenal sebagai bangsa yang ramah dan sopan dalam menerima tamu, akan tetapi Negara kita sudah dikenal dengan sebutan sarang *macan* sehingga tidak sedikit orang asing yang enggan dan takut masuk ke Negara kita. Dari sini jelas bahwa Pendidikan berbudaya kita sebagai bangsa timur yang selama ini dipegang teguh sudah gagal akibat keramahan sikap, kesopanan perbuatan dan kesantunan berbahasa yang perlahan-lahan namun pasti mulai ditinggalkan oleh masyarakat kita. Sungguh ironis.

d. Kesimpulan

Kuasa bahasa melalui Pemilihan dan penggunaan bahasa yang tidak sesuai dengan konteks situasi dan kondisi akan menimbulkan berbagai konflik, baik konflik *horizontal* antara pengguna bahasa (baca: pembicara dan pendengar) maupun konflik vertikal antara pemegang *policy* -kebijakan-- (baca: Pemerintah, Elit politik) dengan obyek khalayak ramai (masyarakat). Hal tersebut lebih lanjut tentu akan menimbulkan konflik sosial dan budaya. Karenanya, kecermatan dalam pemilihan dan kesantunan dalam penggunaan bahasa mutlak diperlukan dalam situasi dan kondisi tertentu dan dipahami sebagai sebuah peristiwa yang lazim terjadi.

B. Pendidikan Karakter Remaja dan Realitas Bahasanya

Masa remaja merupakan masa yang sangat penting, sangat kritis dan sangat rentan. Hal ini dikarenakan apabila manusia melewati masa remaja dengan kegagalannya dimungkinkan akan menemukan kegagalan dalam perjalanan kehidupan pada masa berikutnya. Sebaliknya bila masa remaja itu diisi dengan penuh kesuksesan, kegiatan yang sangat produktif dan berhasil guna dalam rangka menyiapkan diri untuk memasuki tahapan kehidupan selanjutnya dimungkinkan manusia itu akan mendapatkan kesuksesan dalam perjalanan hidup. Masa remaja menjadi kunci sukses dalam memasuki tahapan

kehidupan selanjutnya. Masa ini adalah masa peralihan dari anak-anak menjadi dewasa yang cenderung lebih suka mencoba hal-hal baru yang belum pernah dilakukan. Sehingga gaya hidup anak-anak pada usia remaja menarik untuk diamati, dicermati, diwaspadai, serta didampingi.

a. Tafsir Badai di Era Remaja

Ibarat berada didalam perahu, saat ini remaja sedang mendayung perahu itu ke sebuah pelabuhan yang namanya dewasa. Dalam perjalanan mendayung perahu remaja tersebut, mereka dihadapkan pada badai yang siap menghantam didepan. Mungkin para remaja tersebut sudah tahu adanya badai itu, namun tidak semua pendayung bisa melewati badai dan sampai pada tempat yang dituju.

Ada minimal tiga badai yang akan mengguncang generasi kita pada masa remaja. Pertama, *badai Pencarian jati diri*. Pada masa ini remaja cenderung bersikap dan bertindak sembrono, selalu ingin dibenarkan segala tindak tanduknya, tidak suka mendengarkan nasehat, serta selalu ingin mendapatkan penghargaan baik dari orang tua, teman sebaya, guru maupun orang lain. Sebenarnya fase pencarian jati diri ini mengandung makna dan tindakan yang positif apabila mampu dimengerti oleh para remaja, karena pada fase inilah remaja akan memperoleh banyak pengalaman dengan mengikuti aktifitas-aktifitas positif yang dapat membentuk karakter remaja kearah yang lebih baik. Namun sayang, justru kebanyakan para

remaja kita lebih senang memilih segmen kehidupan hura-hura dan hedonis pada fase ini.

Kedua, badai *Egosentrisme*. Pada masa ini Remaja cenderung lebih mengedepankan ego dengan menunjukkan emosi yang labil sehingga mudah dipengaruhi oleh faktor di luar dirinya. Remaja akan terdorong bertindak agresif hanya dengan dipanas-panasi oleh teman sepermainannya. Kasus membuktikan bahwa kebanyakan peristiwa tawuran antar pelajar hanya dipicu oleh masalah sepele akan tetapi dikemas dalam wadah yang namanya harga diri, dan harga diri inilah yang kemudian menyulut emosi para pelajar sehingga tak ayal menimbulkan tawuran antar pelajar.

Ketiga, badai *Informasi*. Sekarang ini Remaja bisa dengan mudah memahami informasi tentang apapun. Bisa dipastikan, hampir semua remaja di kota maupun di pelosok kampung sudah familier dengan handphone, bahkan bisa berganti-ganti model sesuai trend terbaru. Internet sudah bisa diakses sampai ke pelosok, dimana saja dan kapan saja. Internet menyediakan beragam informasi dan pengetahuan sesuai kebutuhan penggunaannya. Lain halnya Televisi juga sudah menjadi penyedia layanan informasi yang paling banyak dikonsumsi, terlebih banyak handphone yang sudah memiliki fasilitas gambar hidup itu. Media cetak beragam jumlahnya dan mampu memenuhi beragam hobi dan minat setiap orang. Kondisi pelayanan informasi yang maha dahsyat ini justru menjadi badai

bagi remaja karena perilaku penyimpangan yang acap kali dilakukan oleh remaja dalam menyikapi kecanggihan teknologi ini. Banyak kasus seperti video porno, Kekerasan antar remaja, kejahatan remaja seperti Pencurian HP, Penjambretan, Pemerkosaan, Perampasan dan kasus-kasus lain justru disebabkan karena salah dalam mencerna manfaat teknologi informasi yang sangat berkembang saat ini. Ini tentunya sangat berbahaya terhadap pembentukan karakter remaja saat ini.

Perubahan zaman yang serba canggih ini memiliki andil besar dalam membentuk sikap, perilaku serta moral remaja. Teknologi informasi yang tidak terkendali peran dan fungsinya turut memengaruhi pola perilaku remaja yang abai terhadap norma yang berlaku. Artinya, perilaku menyimpang tidak hanya semata-mata bersumber dari remaja itu sendiri. Tapi, adanya perubahan zaman secara potensial bisa memacu remaja bersikap dan berperilaku di luar batas normativitas. Keterbukaan informasi dan komunikasi seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mungkin bukan satu-satunya sebab, tapi ini merupakan salah satu sebab yang menentukan. Lebih menentukan lagi karena, satu sisi informasi menyerang deras ke relung hidup sampai yang paling privat dan sakral, pada sisi lain remaja kurang memiliki kemampuan otonom dalam memilih normativitas sikap dan perilaku. Lagi, satu sisi lembaga penyedia informasi menghantam keras ruang hidup di ranah publik, di sisi lain lembaga-

lembaga yang memiliki otoritas norma dan ajaran agama di masyarakat semakin melemah

b. Tafsir Linguistik Karakter Remaja

Secara ideal, seharusnya pada masa remaja telah mampu memandang suatu masalah dari berbagai sisi dan menyelesaikannya dengan mengambil banyak faktor sebagai dasar pertimbangan. Pun juga Moral remaja seharusnya menyesuaikan kebutuhan masyarakat dimana remaja itu berada. Bahkan jelas dikatakan dalam Islam bahwa Allah sangat senang terhadap remaja yang dekat dengan Masjid dan melakukan hal-hal kebaikan yang dapat menentramkan masyarakat. Secara ideal juga bahwa remaja adalah pemimpin masa depan yang saat ini sedang disiapkan untuk menggantikan generasi tua pada masa yang akan datang.

Sebagai generasi pengganti tentunya remaja harus memiliki kesiapan baik secara mental maupun moral yang diperlukan untuk meneruskan estafet kepemimpinan masa depan. Namun sayang, idealitas tersebut berbanding terbalik dengan kenyataan. Remaja kita saat ini secara kuantitas amat sangat sedikit yang memiliki kesiapan mental maupun moral yang diharapkan oleh masyarakat. Budaya meniru-niru trend terbaru menjadi salah satu pemicu menurunnya kesiapan mental dan moral remaja. Sehingga remaja masa kini memiliki budaya sendiri yang sengaja diciptakan sebagai langkah kontraproduktif dari

harapan masyarakat. Dengan kata lain, kalau tingkah pola remaja saat ini tidak nyeleneh dan suka-suka hati mereka maka dianggap tidak punya identitas dan norak atau kuno. Inilah karakter idela versi remaja yang lebih digandrungi saat ini.

Moralitas remaja yang semakin hari semakin merosot dapat disebabkan karena tiga hal sebagai berikut: *Pertama* Lingkungan yang kurang mendukung remaja untuk melakukan kegiatan positif. bahwa perilaku menyimpang yang dilakukan remaja acapkali dipengaruhi oleh lingkungan yang melingkupinya. Bagaimana tidak, lingkungan dimana remaja hidup dan bersosialisasi saat ini rata-rata sangat tidak mencerminkan kehidupan bernorma dan beretika. Oleh karena itu lingkungan di sekitar remaja di identikkan seperti katalisator yang memungkinkan remaja berperilaku menyimpang sesuai apa yang terjadi di lingkungan tersebut. Maka dalam hal ini remaja bisa ditempatkan sebagai korban dari lingkungannya.

Kedua, Kurangnya perhatian para penggiat Agama untuk lebih memfokuskan kepada pembentukan moral dan karakter remaja. Sehingga terkesan bahwa remaja saat ini seolah hanya dibiarkan saja tanpa ada upaya sistemik untuk menuntun mereka berperilaku positif sesuai harapan Agama. *Ketiga*, Menurunnya perhatian orang tua terhadap anaknya yang sudah beranjak remaja menjadi salah satu factor utama juga terjadinya penurunan moralitas remaja dewasa ini. Kita sering melihat para orang tua lebih

memilih berbelanja di Supermarket dan membeli baju di Mall daripada harus mengantar dan menemani anak mereka yang masih remaja mengikuti pengajian di Masjid.

Sejatinya ada tiga tugas pokok remaja dalam mencapai moralitas remaja ideal saat ini, yaitu: a) Mengenali jati diri dengan belajar pada Norma Agama dan Budaya baik Masyarakat. Pada fase ini segala tingkah laku remaja harusnya didasarkan pada Norma Agama dan adat istiadat yang berlaku dimasyarakat. b) Belajar bersungguh-sungguh dengan memantapkan kognitifitas remaja itu sendiri. Serta c) Memperbanyak kegiatan-kegiatan positif baik dilakukan secara kelompok maupun individu. Mudah-mudahan dengan langkah tersebut sedikit demi sedikit perilaku moralitas remaja yang cenderung menyimpang dewasa ini dapat teratasi sehingga kita tidak akan kehilangan generasi penerus pada masa yang akan datang.

c. Kesimpulan

Ironis memang, Remaja saat ini sedang berada dalam kungkungan badai yang mau tidak mau harus diarungi untuk mencapai pelabuhan dewasa. Namun sedikit saja remaja salah mendayung maka dia akan terjerumus kedalam lautan yang tentunya dapat menghancurkan masa depannya. Badai tersebut datang dari berbagai aspek, antara lain kecanggihan teknologi informasi tak *ayal* telah mempengaruhi pola tingkah dan perilaku remaja. Sehingga tifold sedikit

penyimpangan terhadap kecanggihan teknologi informasi tersebut sudah familiar bagi mereka dalam mengarungi kehidupan. Disisi lain, perilaku hedonis yang sungguh telah menghinggapi para remaja adalah sebagai akibat dari kurangnya filterisasi terhadap perkembangan budaya yang ada. kurang berfungsinya institusi-institusi pembentuk norma dan menurunnya perhatian orang tua terhadap anak mereka yang menginjak remaja juga menjadi pemicu penyimpangan perilaku remaja saat ini. Sehingga prospek masa depan yang seharusnya menjadi tujuan utama hilang begitu saja dan berganti menjadi penyesalan masa depan yang tak berujung. *Na'udzubillah.*

C. Makna Jujur dalam Ujian Nasional

Tulisan ini saya buat pada saat mengamati pelaksanaan Ujian Nasional ada tahun 2012. **UN 2012, jujur...!** slogan inilah yang menghiasi di hampir setiap spanduk yang dipasang di sekolah-sekolah baik SMP, SMA, SMK atau yang sederajat di kota medan dan lainnya. Namun mungkinkah itu terealisasi?. Jawabannya coba kita tanya pada diri sendiri atau kalau tidak juga terjawab mari kita tanya pada rumput yang bergoyang (*lagu Ebit G. Ade*). Atau bahkan sebagian masyarakat dan *stake holder* tanpa ketinggalan para murid SMP, SMA, SMK dan sederajat justru malah bilang *sik-asik, sik-asik menghadapi UN 2012, walau katanya jujur tapi pasti mujur...* fenomena tersebut seakan menjadi jawaban akan *apatisme* masyarakat terhadap

Ujian Nasional. *Tak pelak* ini merupakan tantangan terbesar para pelaksana pendidikan di negeri ini. **UN 2012 Jujur.....! Mungkinkah...?**

a. Idealitas Pendidikan

Ada lima pilar yang harus dijadikan *mindset* pendidikan di Indonesia untuk mencapai hasil yang lebih baik dimasa yang akan datang. *pertama*, pendidikan harus berorientasi pada “*Discipline knowledge*”, artinya pendidikan harus menghasilkan orang-orang yang memiliki disiplin ilmu sesuai dengan apa yang diminati dan dikehendaki, namun tidak luput dari dasar-dasar ilmu yang lain yang berkorelasi dengan disiplin yang dikehendaki, dalam perspektif ini, seorang pengajar diwajibkan memiliki profesionalisme ke-ilmuan sesuai dengan bidang yang diajarkan. Apabila dia mengajar Bahasa Inggris, maka ia harus memiliki keahlian bahasa inggris baik secara formal maupun skill dan kecakapan, apabila ia mengajar ilmu IPA, maka dia juga harus memiliki keahlian secara formal dan skill tentang ilmu IPA tersebut. *Kedua*, pendidikan harus mampu melakukan langkah “*Synthesizing*” artinya setelah memperoleh pengetahuan yang sinambung dengan apa yang diharapkan, seorang terdidik harus mampu melakukan pemetaan terhadap suatu masalah dengan mengetahui akar pokok masalah dan mengetahui solusi yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut, dalam kaitannya dengan pilar yang kedua ini, lebih lanjut seorang terdidik akan tetap

mempertahankan suatu konsep lama yang masih baik dan senantiasa berupaya mencari konsep baru yang jauh lebih baik, (*Almuhafadhotu 'Ala Al-qodimi sholih, wal akhdzu bil jadidi Al-ashlah*).

Ketiga, seorang terdidik harus memiliki insting kreatifitas yang disebut dengan "*Creative Mind*" artinya menemukan hal-hal yang baru menjadi sebuah kelaziman bagi seorang yang memiliki pendidikan, dan itu bermuara dari dorongan seorang pengajar yang senantiasa memberikan gambaran-gambaran akan hal-hal yang baru, sehingga pelajar memiliki insting untuk berkreaitifitas dengan pengetahuan yang dimilikinya. *Keempat*, Pendidikan harus dilandasi dengan sikap saling menghargai, istilah ini kemudian disebut "*Respectful Mind*" artinya, apapun dasar keilmuan yang dimiliki, pendidikan harus berorientasi sama yaitu mencerdaskan, memahami, dan membuat mengerti tentang tujuan pendidikan itu sendiri. *Kelima*, Pendidikan harus berorientasi pada pembentukan karakter seseorang (*character building*). Seorang terdidik harus memiliki akhlak prilaku dan pola pikir terdidik juga, sehingga ia nanti akan bersifat terbuka dan menghargai orang lain. Dalam konteks ini lebih tepat disebut dengan istilah "*Etical Mind*". Hal ini harus dimiliki, karena dasar dari manusia yang terdidik dan memiliki pendidikan haruslah memiliki karakter yang jelas,yaitu karakter berakhlak mulia.

b. Realitas Empirik Yang Terlupakan

Berdasar pada lima pilar pendidikan yang harus menjadi *Mindset* tersebut diatas, saya mencoba mengkaitkan dengan kondisi realitas pendidikan di Negara kita saat ini, khususnya dengan berlangsungnya Ujian Nasional (UN) sebagai salah satu bentuk evaluasi pendidikan yang saat ini tengah berjalan di tingkat SMP, SMA, SMK dan sederajat. *Pertama*, jika pendidikan di Indonesia harus mengarah pada penguasaan ilmu secara professional (*Discipline Knowledge*). Mengapa Ujian Nasional harus dilaksanakan dan menjadi satu-satunya acuan kelulusan bagi seorang pelajar? (walaupun dalam konteks ini pemerintah berdalih bahwa Mapel lain juga menjadi dasar bagi kelulusan, tapi pada kenyataannya tidak). Bukankah materi-materi yang di ujikan dalam UN tersebut masih terlalu jauh dari merepresentasikan keluasan ilmu yang telah dipelajari oleh pelajar? Apakah tidak disadari bahwa dengan hanya mengujikan beberapa (6 Mapel untuk tingkat SMA/sederajat dan 4 Mapel untuk tingkat SMP/sederajat) mata pelajaran yang telah dipelajari oleh pelajar, akan menumbuhkan sikap meremehkan pelajaran lain yang telah dipelajari? Bisakah dikatakan mengarah pada profesionalisme, apabila seorang pelajar harus *mati-matian* mempelajari suatu mata pelajaran yang sama sekali tidak dia sukai dan tidak mengarah pada profesionalisme yang diharapkan? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang berkecamuk dipikiran saya, karena sepertinya masih terlalu jauh dari *mindset* yang

diharapkan yaitu “*Discipline Knowledge*” sebagai pilar yang ingin diterapkan dalam pendidikan di Indonesia saat ini.

Kedua, seorang yang terdidik nantinya diharapkan mampu melakukan pemetaan masalah dan mencari solusi yang tepat terhadap masalah tersebut (*synthesizing Mind*). Dalam perspektif ini, kembali saya mengajukan pertanyaan, mampukah seorang pelajar melakukan pemetaan masalah dengan hanya mengutamakan beberapa mata pelajaran yang di UN saat ini? Kenyataan dilapangan membuktikan, bahwa semenjak dijadikannya UN sebagai standar formal kelulusan oleh pemerintah, minat (*interest*) pelajar semakin berkurang untuk lebih mendalami pelajaran-pelajaran yang lain yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan Ujian Nasional, kendatipun telah ditegaskan oleh pemerintah, bahwa institusi pendidikan (baca: Sekolah) sebagai *stake Holder* pelaksana pendidikan memiliki kewenangan penuh untuk menentukan kelulusan melalui penetapan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, namun pada kenyataannya hal tersebut tidak mudah dilaksanakan, hal ini disebabkan karena tenaga untuk mengarah kesana sudah habis *disedot* oleh upaya stake holder untuk mensukseskan mata pelajaran Ujian Nasional yang akan dihadapi, sehingga konsekwensinya, Mata Pelajaran yang diberi ruang untuk lebih diperhatikan dengan cara mengadakan bimbingan belajar, try out, simulasi dan sejenisnya hanyalah mata pelajaran yang akan di UN-

kan saja, sementara Mata Pelajaran lain seakan tidak lebih hanya sebagai pelengkap saja tanpa ada upaya-upaya yang serius untuk membenahi kurikulum dan sistemnya. Karenanya, kembali saya bertanya apakah realitas ini akan mampu mengantarkan para pelajar sebagai seorang yang terdidik mampu melakukan pemetaan masalah? Tidakkah hal ironis yang nantinya akan kita dapatkan dari realitas ini?

Ketiga, jika melalui pendidikan seorang pelajar diharapkan mampu memiliki insting kreatifitas untuk menemukan dan membuat hal yang baru yang lebih baik lagi (*Creative Mind*) dengan pengajar sebagai motor penggerak timbulnya sebuah kreatifitas tersebut, maka pertanyaan saya adalah: Apakah spesialisai yang dilakukan saat ini terhadap Mata Pelajaran – Mata Pelajaran tertentu yang di UN-kan saja mampu mendorong daya imajinasi, kreasi dan aktifitas pelajar untuk menemukan hal yang baru? Tidakkah dikhawatirkan nantinya justru dengan spesialisai saat ini, malah akan mendorong pelajar melakukan segala cara untuk bisa berhasil dari terkaman mulut buaya (baca: UN) yang mau tidak mau harus dihadapi?. Penentuan standar kelulusan untuk Ujian Nasional yang telah ditetapkan, dalam kenyataannya justru malah menjadi bom waktu yang bisa meledak kapan saja, khususnya untuk institusi pendidikan dan pelajar. Sehingga dalam setiap pergantian tahun pelajaran yang menjadi fikiran adalah bagaimana caranya untuk dapat menjinakkan bom waktu yang siap meledak tersebut.

Konsekwensinya, parktis yang dibicarakan hanyalah hal-hal yang berkaitan dengan Ujian Nasional dan mengesampingkan hal lain yang justru lebih penting seperti pembinaan akhlak, kepribadian, prilaku dan pola pikir. Mungkinkah seorang pelajar yang sejatinya ingin mengembangkan ilmu keolahragaan nya mampu merealisasikan hal tersebut sedangkan waktunya habis tersita untuk memikirkan Ujian Nasional? Dan masih banyak hal lain yang merupakan bukti termarjinalkannya pelajaran-pelajaran lain hanya karena Ujian nasional.

Keempat, sungguh sangat membahagiakan apabila arah pendidikan kedepan di Indonesia diarahkan kepada pilar saling menghargai antara pengajar dengan pelajar (*Respectful Mind*). Namun mungkinkah itu terwujud apabila pemerintah akan tetap melaksanakan Ujian nasional yang dalam kenyataannya justru membuat pelajar tidak lagi menghargai pengajar dan pengajar hanya berorientasi pada kognitifitas pelajar saja? Hal ini sungguh dapat dibuktikan melalui implikasi negative adanya Ujian Nasional, temuan dilapangan membuktikan bahwa pelajar saat ini sudah mengelompokkan guru mana yang harus dihormati dan guru mana yang tidak wajib dihormati, tentunya jelas bahwa guru yang harus dihormati adalah guru yang mengajar mata pelajaran yang di Un-kan saja, dengan harapan pada saat Ujian nasional nantinya mereka akan mendapatkan bantuan jawaban dari guru tersebut. Sementara guru yang

mengajar mata pelajaran lain sudah beralih fungsi menjadi iklan reklame yang setiap hari di dengar dan dilihat namun sangat minim untuk di ikuti dan di ambil kata-kata serta nasehatnya. Ah, sungguh ironis.

Kelima, sebagai pondasi kehidupan bagi seorang yang terdidik, maka pelajar harus memiliki sikap yang didasarkan pada luhurnya akhlak dan etika (*Ethical Mind*), namun dalam praktik nyatanya, implikasi penentuan mata pelajaran khusus yang di ujikan dalam UN, justru malah memunculkan gejala-gejala sosial baru yang berhubungan dengan etika seorang pelajar, yang sungguh sama sekali jauh dari apa yang diharapkan. Apabila yang diharapkan bahwa melalui pendidikan seorang pelajar akan lebih semangat belajar, maka kenyataan membuktikan bahwa justru saat ini minat belajar pelajar semakin menurun karena mereka beranggapan tidak ada gunya belajar *toh* nanti akan dibantu juga. Dari sudut pandang penghormatan terhadap pengajar, sungguh ini telah mengalami degradasi, karena pelajar menjadi tidak hormat, meremehkan, dan bertindak sesuka hati. Sehingga prilaku pelajar kita saat ini jauh dari apa yang diktakan “berakhlakul karimah”. Ironis bukan?

c. Kesimpulan

Realitas diatas sungguh telah terjadi dilapangan, walaupun pengambil kebijakan (baca: Pemerintah = Kemdiknas) mencoba menutup mata dan telinga, namun ini sudah menjadi rahasia umum yang tidak

terelakkan di masyarakat. fenomena saling mengerti tentang praktik-praktik kecurangan dianggap sebagai hal biasa telah merajalela, karena kebanyakan masyarakat menganggap bahwa hal semacam itu lazim terjadi karena sistem yang memaksa demikian. Sungguh sangat memprihatinkan, sehingga dalam konteks ini benarkah Ujian Nasional kita patut diagungkan menjadi tolok ukur keberhasilan evaluasi pendidikan di Indonesia. bukankah hal semacam itu justru merusak mental, perilaku dan pola pikir masyarakat pendidikan kita. Akankah cita-cita lima pilar (*Discipline Knowledge, Synthesizing Mind, Creative Mind, Respectful Mind, dan Ethical Mind*) yang ingin diterapkan Pendidikan Nasional kita bisa terwujud dengan melihat realitas seperti diatas? Sungguh ini merupakan pekerjaan rumah yang tidak mudah untuk mencari jawabannya. *wallahu A'lam Bissowab....!*

D. UN dan Pendidikan Belah Jengkol

Usai sudah penyelenggaraan UN SMA, MA, SMK 2012 serentak diseluruh penjuru tanah air. Banyak berita negatif yang disiarkan oleh media tentang beredarnya kunci jawaban, kekurangan soal serta penyimpangan penyelenggaraan oleh penyelenggara. Namun ada juga berita positif mengenai penyelenggaraan UN, bahwa UN kali ini jujur, kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kejujuran, kredibilitas, dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi cita-cita luhur

pendidikan bangsa ini kearah pencapaian hasil pendidikan yang lebih baik lagi. Semoga ini bisa tercapai dengan baik. namun agak antagonis dari cita-cita itu barangkali adalah persepsi masyarakat yang saat ini sudah berkembang dan menjadi *spectrum* bahwa pelaksanaan UN hanyalah membuang-buang uang negara, dan yang diuntungkan hanyalah kelompok tertentu saja karena mendapatkan proyek besar dari pencetakan lembar soal dan jawaban dari UN ini. Efek samping lain juga dirasakan oleh masyarakat bahwa setelah pelaksanaan UN justru malah menimbulkan kecemasan bagi masyarakat dan orang tua murid karena tingkah para pelajar yang corat-coret baju dan pawai besar-besaran dijalan raya, dan tentunya ini tidak sedikit menimbulkan korban kecelakaan lalulintas. Lalu siapa yang harus disalahkan dalam hal ini? Pihak sekolah kah, polisikah, atau masyarakatkah, atau siapa..?

a. Sistem yang dipaksakan

Kebanyakan orang sering bilang, “anda tidak berpendidikan ya, kok ngomongnya kayak gitu”. “dia itu orang berpendidikan, makanya sopan dan bersahaja”. “para elit politik hendaknya belajar tentang pendidikan etika, supaya bisa santun dalam menyampaikan pendapat dan tidak menyinggung orang lain”. “dia tidak pernah mengenyam bangku sekolah, makanya dia kampungan cara berpikirnya”.

Ungkapan diatas seakan menjadi petunjuk bagi

kita bahwa sesungguhnya pendidikan itu bertujuan tidak hanya untuk mencerdaskan otak secara kognitif saja, tetapi juga pencapaian akhlak dan perilaku seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Karena sesungguhnya masyarakat menilai keberhasilan seseorang dalam pendidikan justru ketika seorang terdidik tersebut dapat bersosialisasi di masyarakat dengan mudah dan memiliki kesopanan serta perilaku yang terpuji menurut ukuran masyarakat. Dalam kata lain, karakter hasil dari suatu pendidikan harus bersentuhan dengan nilai-nilai kemasyarakatan. Namun persoalannya sekarang adalah, apakah Pendidikan berkarakter yang sedang digalakkan di Indonesia saat ini sudah memperhatikan hal-hal tersebut diatas? Atau justru malah lebih mengedepankan pada tata ukuran keberhasilan secara kognitif semata?

Tidak mudah menjawab pertanyaan diatas, karena pada kenyataannya sistem pendidikan di Indonesia saat ini terkesan dipaksakan dengan diadakannya Ujian Nasional sebagai standar kelulusan pendidikan. UN dengan berbagai persoalannya sebenarnya sudah mengabaikan keinginan masyarakat Indonesia untuk mendapatkan format yang lebih bagus bagi standar evaluasi pendidikan. Pada kenyataannya Ujian ini hanya terkesan sebuah formalitas tahunan belaka, karena nilai yang diperoleh tidak bisa menjadi acuan untuk masuk kejenjang yang lebih tinggi lagi. Kebanyakan perguruan tinggi malah terang-terangan

menolak nilai UN karena terlalu banyak terindikasi kecurangan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu standar masuk perguruan tinggi masih menggandakan jalur testing, baik tes secara bersama-sama (SNMPTN) atau tes secara mandiri yang dilakukan oleh masing-masing perguruan tinggi.

Hal senada juga berlaku di pendidikan tingkat menengah. Siswa yang lulus SMP dengan nilai UN tinggi tidak lantas dengan mudah bisa masuk ke SMA/MA/SMK favorit. Mereka harus melalui tes standar yang diadakan oleh masing-masing institusi tersebut untuk bisa masuk ke sekolah tersebut. Disini nilai UN tidak begitu dibutuhkan, justru siswa yang memiliki nilai UN tinggi akan dipertanyakan kredibilitasnya. Nah sepertinya dalam hal ini hasil UN berbanding terbalik dengan asumsi pihak sekolah pada umumnya. Suatu pertanyaan besar, kenapa hal itu terjadi, kenapa pihak sekolah menengah atas maupun kejuruan tidak percaya dengan hasil UN yang dicapai oleh para siswa SMP?

Masyarakat Indonesia sekarang tidaklah terlalu bodoh untuk dapat menilai sistem pendidikan yang diselenggarakan di negara ini. Oleh karena itu sistem pendidikan (termasuk didalamnya pelaksanaan UN) yang terkesan dipaksakan hendaknya segera diakhiri. Kalau tidak maka masyarakat akan semakin apatis dan tidak percaya terhadap output dari pendidikan di negara ini. Lalu mau dibawa kemana para generasi muda penerus bangsa ini nanti jika hasil

dari mereka belajar selama 12 tahun tidak dipercaya oleh masyarakat?

b. Pendidikan Belah Jengkol

Ditengah-tengah penyelenggaraan UN sering kita lihat baik di media cetak maupun elektronik para pejabat negara dan politisi meninjau pelaksanaan UN di beberapa sekolah. Ini tentunya membuat tanda tanya besar bagi kita, mengapa para pejabat dan politisi tersebut begitu getol meninjau pelaksanaan UN. Sebagai bentuk perhatiankah ataukah hanya memanfaatkan momentum UN ini sebagai instrumen agitasi? Kalaulah itu sebagai bentuk perhatian, mengapa harus pada saat pelaksanaan UN saja mereka getol meninjau ke lokasi? Akan lebih baik jika mereka meninjau sarana dan prasarana pendidikan di sekolah yang kebanyakan masih mengalami kesenjangan antara sekolah yang berada di kota dan sekolah yang berada di pelosok daerah.

Sepertinya even UN ini dari tahun ke tahun sudah dimanfaatkan sebagai ajang dari berbagai kepentingan, tidak hanya kepentingan material berupa proyek penyelenggaraannya, namun juga ajang sosialisasi popularitas elit dan politisi tertentu. Dalam hal ini pendidikan tidak lagi dijadikan sebagai instrumen pembentuk kepribadian yang baik, mencerdaskan anak bangsa dan pencapaian karakter yang diharapkan. Sepertinya sudah terjadi distorsi tujuan pendidikan yang sebenarnya. Namun anehnya

hal ini terkesan tidak disadari oleh pihak-pihak terkait. Pola saling memanfaatkan momentum inipun seakan sudah menjadi trend yang mengarah kepada pengambilan berbagai kepentingan , tak pelak penyelenggaraan UN inipun sudah menjadi ajang memperkenalkan diri kepada publik guna meraih simpati melalui sikap perhatian (yang sesungguhnya mungkin hanya kamufase semata) terhadap penyelenggaraan UN.

Campur aduknya berbagai kepentingan inilah yang sebenarnya menjadi pemicu rancunya penyelenggaraan UN selama ini. Berbagai kalangan seperti ini tidak mau kehilangan kuenya masing-masing, sehingga dengan berbagai upaya mereka berusaha mendapatkan apa yang mereka inginkan. Sehingga penyelenggaraan UN bukan hanya bermasalah pada sistem evaluasinya, namun juga bermasalah pada tujuan para pejabat diatas yang hanya tahu akan proyek pencetakan soal dan lembar jawaban saja, juga disertai oleh kepentingan beberapa pejabat dan politisi yang menjadikan even UN sebagai media propaganda dan agitasi, serta tidak kalah ironisnya kebocoran soal dan beredarnya jawaban yang tidak bisa ditutup-tutupi lagi menjadi fakta bahwa betapa UN ini sudah sangat sarat dengan berbagai kepentingan. Ya, ibarat jengkol yang dibelah-belah.. walau pahit rasanya namun semua juga ingin merasakannya.

d. Kesimpulan

Sepertinya pemerintah sudah harus mengevaluasi penyelenggaraan UN sebagai instrument evaluasi pendidikan di Negara ini. Masalah kurangnya pemerataan, sarana dan prasarana, kualitas tenaga pengajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, marginalisasi mata pelajaran yang lain, rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap hasil UN serta tidak tepatnya siswa yang lulus dengan predikat terbaik sampai pada indikasi penyelewengan UN sepertinya sudah cukup menjadi instrumen untuk menegaskan pelaksanaan UN dimasa yang akan datang. Pemerintah melalui kemdikbud harus mencari formula baru sebagai sistem evaluasi pendidikan di negeri ini. Jika tidak, praktik sama akan terulang pada penyelenggaraan UN dimasa yang akan datang. Banyak yang menyayangkan uang negara yang bernilai milyaran itu hilang hanya gara-gara demi prestise semu semata.

BAB IV

KUASA FRASA “AYO KERJA” DALAM REVOLUSI MENTAL

A. REFLEKSI KEMERDEKAAN

71 Tahun lalu, Bung Karno dengan gagah dan berwibawa memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Proklamasi itu menjadi titik tolak perubahan bangsa dari Negara terjajah menjadi Negara merdeka yang bebas mengatur dirinya sendiri tanpa campur tangan bangsa lain. Jatuh bangun perjalanan pembangunan bangsa ini, bongkar pasang sistem pemerintahan pun dilakukan demi menemukan model pemerintahan yang ideal untuk sebuah bangsa besar dengan latar belakang geografis kepulauan dan perbedaan suku, agama, ras dan golongan yang kental mewarnai dialektika kehidupan bangsa yang biasa kita sebut dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Tujuan akhir dari bangsa ini sebenarnya adalah mencapai kemakmuran bersama dalam rangka mencukupi hajat hidup irang banyak sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang dasar 1954. Akan tetapi kenyataan membuktikan

bahwa banyak sudah air mata rakyat negeri ini menetes karena berbagai penderitaan yang tak kunjung berakhir, cari uang susah karena himpitan ekonomi, krisis politik, Gempa bumi dimana-mana, kebakaran dimana-mana, koruptor merajalela dalam setiap sudut kehidupan birokrasi para pejabat serta dan seabrek masalah lain yang menimpa bangsa ini. Berbagai hal tersebut seakan mengindikasikan bahwa bangsa belum berhasil mewujudkan cita-cita kemerdekaan yang luhur dan dijunjung tinggi. Apakah ini indikasi bahwa penerus bangsa ini sudah ingkar dari janji kemerdekaan, lari dari tujuan kemerdekaan, serta tidak mampu mewujudkan keinginan kemerdekaan yang diraih dengan darah dan air mata 71 tahun silam?

a. Potret Bangsa Indonesia

Era Reformasi yang merupakan titik balik kembalinya kedaulatan ke tangan rakyat melalui mekanisme dan tatanan yang praktis representatif dengan diselenggarakannya pemilihan pemimpin negeri ini (baca; Presiden, Wakil Presiden, DPR, DPD, Kepala Daerah, DPRD) secara langsung melalui partisipasi utuh rakyat ternyata belum membuahkan hasil yang maksimal bagi seluruh sendi-sendi kehidupan bangsa ini, mari kita lihat dari sisi ekonomi, belum terciptanya iklim perekonomian yang kondusif dengan indikasi masih banyaknya pemodal asing yang memiliki perusahaan di negeri ini tanpa henti-hentinya mengeruk kekayaan alam Indonesia, antara lain kasus

freeport, sampai hari ini masih terjadi konflik vertikal antara perusahaan dan pekerja. Selain itu, program pemberdayaan ekonomi mikro rakyat melalui program-program seperti KUR, Pinjaman lunak dan lain-lain sepertinya hanya *kamuflase* dan sarat nuansa politik. Persoalan jaminan keamanan para TKI dan TKW diluar negeri yang masih minim sehingga mengakibatkan banyak TKI dan TKW terancam hukuman mati dan pancung dinegeri orang, bahkan lebih ironis lagi para TKI yang sudah meninggal pun menjadi komoditas dan diperjual belikan organ tubuhnya oleh bangsa lain.

Dalam ranah sosial - politik, pemerintah kita telah gagal dalam membangun hubungan sosial - politik yang harmonis, ini terbukti dari banyaknya keputusan-keputusan yang diambil pemerintah yang seharusnya lebih memperhatikan kepentingan sosial justru malah terjebak pada kepentingan politik dengan tujuan mempertahankan kekuasaan semata. *Reshuffle* kabinet kerja jilid II yang diharapkan bisa menjadi solusi alternatif bagi jalannya program-program pemerintah yang berpihak kepada rakyat, justru hanya menjadi *dagelan* politik dan lebih sarat pesan politik akomodatif kepentingan semata tanpa melihat keperluan penyelesaian persoalan bangsa yang semakin hari semakin kompleks.

Dalam konteks penegakan hukum, sepertinya Indonesia sudah kehilangan payung hukum yang semestinya dijadikan acuan dalam penegakan hukum di negeri ini. Hukum menjadi persoalan mudah bagi para

pemilik modal dan kekayaan, pengadilan menjadi tempat tawar-menawar harga dari pasal-perpasal, dan lebih ironis lagi, kasus-kasus yang ada sepertinya menjadi *politik bunyi-bunyian* yang sengaja dimunculkan untuk mengaburkan fakta dan realitas urgen akan kelemahan penegakan hukum di negeri ini. Tak pelak banyak kasus-kasus yang dipetikemaskan dan hilang dari peredaran sehingga masyarakat tak lagi tahu akan kelanjutan dari kasus-kasus tersebut.

Dalam ranah pertahanan dan Keamanan (Hankam), kita mulai dari pertahanan wilayah teritorial, Indonesia seperti kehilangan sertifikat batas negara, sehingga dengan mudahnya negeri tatangga (baca: Malaysia) mencaplok beberapa wilayah yang masuk menjadi bagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masih subur ingatan dibenak kita bagaimana pulau Sipadan dan Ligitan dapat lepas dari genggamannya Indonesia setelah kalah diplomasi di tingkat PBB, Masalah batas teritorial dilaut ambalat yang sampai hari ini masih belum ada penyelesaiannya, ditambah lagi akhir-akhir ini terjadi penggeseran tapal batas antara Indonesia dan Malaysia di propinsi Kalimantan yang dilakukan oleh warga Malaysia secara perlahan-lahan. Namun sepertinya pemerintah kita kurang tegas dalam mempertahankan batas wilayah negara, Padahal diakuinya suatu negara yang berdaulat adalah ketika adanya wilayah teritorial yang jelas dan tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun atau negara manapun.

Masih dalam arena Hankam, keamanan dalam negeri agaknya terus-menerus mengalami ujian dan cobaan, Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini mengalami guncangan keamanan yang justru datang dari dalam negeri sendiri, mari sama-sama kita ingat kasus Bom Bali tahun 2002 oleh sekelompok kawan yang mengatasnamakan Islam sebagai *manhaj* perjuangan mereka dengan dipelopori oleh Imam Samudra, Amrozi, Mukhlis dkk, mereka berhasil mengguncang keamanan Indonesia yang dikenal sebagai negara yang *gemah ripah loh jinaw toto tentrem kerto rahardjo* yang jauh dari perselisihan dan sengketa. Pemerintah secara tegas memberikan julukan kepada kelompok ini sebagai kelompok teroris dan harus diberantas habis. Namun *bak* kata pepatah *mati satu tumbuh seribu*, sampai hari ini gangguan dan ancaman teroris tersebut masih terus terjadi dimana-mana. Ancaman dari dalam yang lain adalah disintegrasi bangsa. Papua sampai hari ini masih bergejolak, Aceh yang sedang terjadi perang urat syaraf dan bahkan sudah mengarah ke fisik akibat adanya indikasi kecurangan dalam penyelenggaraan Pilkada, serta adanya Republik Maluku Selatan (RMS) yang hingga kini juga mengancam keutuhan bangsa ini. Kesemua hal tersebut nyata ada dan selalu mengancam keamanan bangsa ini.

Persoalan yang juga urgen adalah pemertahanan budaya, masih segar dalam ingatan kita betapa kita telah kehilangan muka dan seperti kebakaran jenggot

manakala kita menyaksikan fenomena pengakuan beberapa hasil budaya bangsa Indonesia oleh Malaysia, sebut saja Reog Ponorogo, Batik serta Tari Pendet Bali,. Kesemua produk budaya bangsa Indonesia tersebut dengan nyata telah di *klaim* sebagai produk budaya Negeri jiran tersebut, hal ini mungkin disebabkan kurangnya perhatian pemerintah dan masyarakat terhadap kebudayaan-kebudayaan Indonesia sehingga menjadikan kebudayaan-kebudayaan bangsa ini dengan mudah dapat dicuri oleh bangsa lain dan kemudian diakui menjadi kebudayaan mereka. Ironis lagi sampai pada kasus *update* hari ini artis kita Agnes Mo dan Raisa pun di klaim sebagai artis Malaysia. Sungguh aneh.

b. Cita-Cita Luhur Bangsa

Sesuai dengan amanat Proklamasi, cita-cita luhur bangsa ini adalah tercapainya kemakmuran, keadilan, kedamaian, keselarasan, keseimbangan dalam setiap sendi kehidupan baik politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun pertahanan dan keamanan. Namun ketika kita melihat realitas dalam potret Indonesia di atas, betapa ironisnya bahwa apa yang terjadi di negeri kita sampai saat ini masih jauh dari harapan dan cita-cita luhur yang ingin diwujudkan. Bangsa ini sedang mengalami krisis kepercayaan di segala bidang, krisis kepercayaan tersebut tidak hanya melanda rakyat terhadap pemerintah namun juga meleanda jajaran pemerintahan sendiri sehingga pemerintah kelihatan

ragu-ragu dan tidak -PD- apabila akan mengeluarkan kebijakan terhadap suatu persoalan. Lalu bagaimana bangsa ini bisa maju dan sejajar dengan bangsa-bangsa lain didunia apabila krisis kepercayaan tersebut masih terus melanda seluruh lapisan masyarakat negeri ini dan juga jajaran pemerintahannya?

Bangsa ini memang sudah sangat rindu kemakmuran rakyat secara ekonomi, keadilan hukum yang merata disemua *lini*, kedamaian kehidupan berbangsa dan bernegara yang bebas ancaman dari dalam maupun luar negeri mulai dari kepastian teritorial sampai kepada pengakuan produk budaya serta bebas menyuarakan aspirasi demi kemajuan, keselarasan dalam penataan ketatanegaraan baik dimensi politik maupun sosial, serta keseimbangan kontrol yang dilakukan oleh seluruh masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dan sebaliknya pemerintah selalu membuat kebijakan atas nama rakyat dan untuk kemajuan rakyat. Asa yang sungguh mulia dan ideal inilah yang dicita-citakan oleh bangsa yang besar dan merdeka 71 tahun silam ini.

Lantas, mampukah para para pemegang kekuasaan sekarang merelalisasikan harapan rakyat Indonesia? Jika rakyat saja sudah *apatis* dengan tingkah pola para pemangku kepentingan mulai dari anggota Legislatif, Pejabat Eksekutif serta Pelaku Yudikatif. Bukankah saat ini Negara kita tercinta ini sudah menjadi Negara diatas awan, yang tak punya bumi untuk dipijak, tak punya langit untuk dijunjung, tak

punya laut untuk dilayari para nelayan kita, serta tidak punya udara untuk dihirup rakyat dan dilalui pesawat-pesawat kita.

c. Kesimpulan

Bukankah setiap Pemilihan umum baik untuk pemilihan Legislatif maupun pemilihan Eksekutif dari tingkat Kabupaten/ Kota sampai Presiden dan wakil Presiden di Negeri ini hanya semacam *dagelan* politik yang *sok* demokratis dengan menghabiskan uang Negara yang sangat fantastis. Bukankah Negara ini sudah membudayakan kebohongan publik dengan banyaknya janji-jani politik yang pasti akan hilang ketika Pemilu telah usai. Bukankah kita sebagai Rakyat Indonesia hanya mendapatkan imbas dari sistem yang tidak jelas selama ini.... Tanya kenapa...???

B. DINAMIKA KEBANGSAAN

Jauh-jauh hari sejak direcanakannya Aksi Demonstrasi besar-besaran oleh beberapa elemen umat Islam ke Jakarta tanggal 4 November 2016 dalam rangka melakukan desakan agar Ahok yang telah menistakan Agama Islam melalui rentetan kalimat yang dihubungkan dengan Surat Al-Maidah Ayat 51 segera diadili secara hokum dan dipenjarakan. Maka umat Islam dari berbagai elemen di Negara ini mempersiapkan diri dengan berbagai cara. Ada yang melakukan diskusi mendalam dengan mengajak berbagai elemen masyarakat guna mendapatkan satu kata sepakat yaitu ikut serta melakuka aksi Demo ke Jakarta, ada juga yang langsung melakukan penasan dengan berdemonstrasi di depan kantor Gubernur, Kantor Wali Kota, kantr Bupati, Kantor Polda serta Kantor DPRD baik Propinsi maupun Kabupaten/ Kota.

Hal diatas menarik untuk dikaji mengingat, situasi saat ini adalah dalam nuansa Pilkada serentak diberbagai Wilayah di Indonesia termasuk juga Propinsi DKI Jakarta, dan dalam Pilkada apapun bisa dijadika senjata untuk memperole kemenangan dan mengalahkan lawan. Dalam kasus Ahok yang dikatakan menistakan Agama, asal muasalnya adalah Ujaran politik Ahok dalam sebuah pertemuan dengan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Seribu DKI Jakarta yang menyinggung Surat Al-Maidah Ayat 51 sebagai salah satu instrumen statemennya, sehingga berdasar pada itu muncullah banyak respon masyarakat

khususnya umat Islam yang menganggap bahwa ujaran politik Ahok terkait dengan itu telah menistakan Agama. Dan tentunya sesuai dengan Undang-Undang di Negara ini, barangsiapa yang dengan sengaja menistakan Agama maka harus diproses sesuai hukum dan dihukum sesuai dengan ketentuan.

Barangkali ini tidaklah berlebihan karena Agama beserta seluruh ajarannya adalah persoalan yang amat sangat privasi, sehingga ketika ada salah satu segi Agama saja yang dihinakan, maka akan cepat menimbulkan reaksi resistensi/penolakan terhadapnya. Nah, jika demikian maka Ahokpun menjadi sah untuk diproses secara hukum dan jika terbukti harus segera dilaksanakan hukumannya. Sehingga persoalannya menjadi jelas, bahwa keinginan umat Islam menyuarkan aspirasinya adalah dalam rangka membela Harga diri dan eksistensi Agama Islam dengan Kitab Sucinya dan bukan gerakan yang memang sengaja diciptakan dalam situasi Pilkada dan bertujuan untuk mendiskreditkan salah satu peserta Pilkada. Inilah yang perlu dikaji lebih dalam.

a. Sebuah Anti Tesis Gerakan 4 November 2016

Perspektif berbeda nampaknya sedang ditampilkan didepan publik oleh Ormas Islam di Negara tercinta kita ini. Perspektif berbeda itu datang dari ormas Islam Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah sebagai Ormas Islam terbesar di Indonesia. Kedua Ormas Islam tidak menginstruksikan

secara organisasi kepada seluruh anggotanya di Tanah air untuk ikut aksi bela Islam II di Jakarta tanggal 4 November 2016 nanti. Secara tegas NU melalui instruksi Ketua Umum PBNU melarang kaum Nahdliyyin, Pemuda-pemuda NU, Ansor Banser, PMII serta Banom-banom lainnya untuk ikut serta melakukan aksi 4 November di Jakarta. Begitu juga dengan Muhammadiyah telah melarang semua organ taktisnya untuk ikut berdemonstrasi dengan membawa atribut-atribut Organisasi Muhammadiyah.

Dari perspektif kedua Ormas Islam terbesar di Indonesia ini, jika saya melihat ada beberapa aksentuasi dan Rekognisi yang ingin dipahamkan oleh NU dan Muhammadiyah dalam konteks ini: Pertama, dari sudut pandang pemahaman membela Agama Islam dan Al-Qur'an, tidaklah harus ditunjukkan dengan menciptakan dan membuat gerakan yang justru akan menjadikan suasana mencekam di Negara ini apalagi saat ini sedang dalam nuansa Pilkada. Kedua, sepertinya NU dan Muhammadiyah ingin memisahkan persoalan Hukum dengan persoalan Politik dimana kedua persoalan itu tidak dapat disatukan bersama karena dapat mempengaruhi hak-hak seseorang untuk dapat berkontestasi dalam politik dan berlindung serta membela diri secara hukum. Ketiga, NU dan MU sepertinya melihat bahwa perosolan Ahok adalah murni persoalan Hukum, oleh karenanya harus diselesaikan secara Hukum, dan penyelesaian secara hukum harus dilakukan oleh pihak yang berwenang

dalam Hukum sesuai dengan proses yang telah diatur dalam Undang-Undang di Negara ini. Ke-empat, Jika Unjuk rasa atau aksi turun ke jalan seperti yang direncanakan tanggal 4 November 2016 harus dilakukan, hal itu semata-mata adalah demi mengawal persoalan hukum yang sedang diproses dan tentunya harus dilakukan dengan cara-cara damai, bijak dan mementingkan persatuan dan kesatuan bangsa serta terbebas dari nuansa *Truth Claim* dan *Lonely Claim*. Kelima, bahwa mengajak berjuang di jalan Allah untuk mempertahankan Agama adalah dengan jalan hikmah dan perkataan-perkataan yang baik dan jauh dari kesan provokatif serta mengedepankan nuansa kebangsaan dan kenegaraan sesuai dengan amanat para pendiri bangsa ini.

Mungkin tidaklah terlalu berlebihan jika NU dan Muhammadiyah menjadi garda terdepan dalam menjaga keutuhan dan kesatuan Negara ini. Hal ini mengingat bahwa kedua Ormas Islam besar di Indonesia ini adalah lahir dari embrio para Ulama yang mengerti betul tentang watak karakter dan perilaku bangsa Indonesia, sehingga patron gerakannya adalah patron keindonesiaan dan Ke-Nusantara. Sepertinya kedua Ormas Islam terbesar di Indonesia ini ingin mengingatkan kepada seluruh Umat Islam di Indonesia bahwa Jihad yang sesungguhnya adalah Jihad melawan kebodohan, menghilangkan kemiskinan, mencegah AIDS, melarang penyalahgunaan Narkoba, memberantas Judi, menghabisi korupsi, membuang jauh-jauh

budaya Pungli dan penyakit masyarakat lainnya, dan itu secara kontinyu masih sangat perlu dilakukan mengingat bangsa ini adalah bangsa yang majemuk dan masih membutuhkan peran dari berbagai pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan didalamnya.

b. Perlunya Ketegasan Pemerintah; Sebuah oto kritik

Profesor Muzakir dan Profesor Margarito, dua Pakar Hukum dari Universitas Gajah Mada dalam sebuah kesempatan beberapa waktu lalu mengatakan bahwa persoalan Ahok terkait dengan penistaan Agama Islam melalui penempelan Surat Al-Maidah ayat 51 dalam ujaran politiknya adalah murni persoalan hukum, oleh karena itu pihak yang berwenang harus segera melakukan proses-proses hukum yang diperlukan tanpa menunggu izin dari manapun termasuk dari Presiden. Hal ini dikarenakan bahwa persoalan hukum Ahok ini tidak akan mengganggu hak politiknya untuk tetap mengikuti kontestasi Pilkada DKI Jakarta meskipun dia telah bersataus terasangka. Oleh karena itu untuk menjaga keharmonisan dan kesatuan berbangsa dan bernegara sebaiknya pemerintah harus secara cepat melakukan tindakan-tindakan hukum terakait dengan persoalan ini, sehingga polemik di Masyarakat dapat dapat dianulir.

Persoalan hukum seharusnya dijauhkan dari persolaan politik. Persoalan hukum seharusnya tidak berlindung pada lembaga-lebaga politik. Hal ini untuk

menghindari tendensi bahwa hukum di Indonesia bisa dipermainkan secara politis oleh elemen-elemen Politik yang berpengaruh di Negara ini. Reaksi keras yang muncul dari beberapa elemen Umat Islam menjadi bukti bahwa mereka merasa tidak yakin dengan apa yang dilakukan oleh jajaran penegak hukum di Indonesia karena sesungguhnya Hukum di Indonesia masih dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan politik oleh para elitnya yang tentunya cenderung politis dan bernuansa kepentingan. Sebuah kritik besar bagi Pemerintah yang ternyata masih belum mampu memisahkan kedua persoalan ini, Hukum dan Politik.

Jika Pemerintah saat ini piawai dan respon terhadap dinamika Masyarakat, maka yang harus dilakukan adalah memberikan perintah kepada jajaran Penegak hukum untuk secara tuntas dan serius menangani masalah Ahok ini secara hukum dan menjauhkannya dari nuansa politik. Jika hal ini dilakukan maka saya yakin aksi-aksi seperti yang akan dilakukan pada tanggal 4 November 2016 tidak akan terjadi. Oleh karena tidak adanya respon cepat dan tanggap dari pemerintah dalam hal ini adalah Presiden terhadap masalah ini, maka berbagai spekulasi dimasyarakatpun bermunculan, spekulasi masyarakat terkait bahwa Presiden sengaja melindungi Ahok karena temannya serta mengerti betul tentang rahasia presiden menjadi viral dari mulut kemulut dan berkembang di masyarakat. Hal semacam ini, dalam kacamata demokrasi Indonesia menjadi tidak menarik

untuk dilihat, mengingat bangsa kita adalah bangsa yang mngedepankan *Tepo seliro, legowo dan baik sangka* kepada siapapun termasuk pmpinan Negara. Namun sungguh disayangkan, Presiden sepertinya kurang responsive dengan dinamika ini, sehingga yang dilakukan adalah melakukan safari politik demi menciptakan ketertiban semata namun tidak menindak akar masalah yang sesungguhnya sudah ada didepan mata. Sebuah oto kritik yang tajam dari masyarakat.

c. Kesimpulan

Indonesia sebagai bangsa yang merdeka selalu mencita-citakan terciptanya kemakmuran, keadilan, kedamaian, keselarasan, keseimbangan dalam setiap sendi kehidupan baik politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun pertahanan dan keamanan. Namun sayang akibat kecerobohan dan keserakahan para elit dan pejabat pemerintahan dinegeri ini, Indonesia menjadi goyang dan memiliki berbagai penyakit yang sudah kronis. Penyakit-penyakit tersebut dapat dideteksi seperti dalam bidang ekonomi yang belum mencapai standar kemakmuran, bidang sosial politik yang carut-marut, bidang hankam yang sungguh masih jauh dari harapan, bahkan sampai bidang kebudayaan yang teledor dan sangat kurang waspada. Berbagai penyakit tersebut sampai saat ini masih belum bisa disembuhkan. Akibatnya, bangsa ini mengalami krisis kepercayaan multidimensi serta ketidak-PD-an dalam bertindak dan melakukan perubahan. Wallahu A'lam Bisshowab.



BAB V

KUASA BAHASA DALAM KOMUNIKASI POLITIK DI INDONESIA

A. Komunikasi Politik Jokowi

Jokowi sebagai presiden dari 250 juta lebih rakyat Indonesia tidak menyia - nyiakan kesempatan untuk dapat selalu memberikan informasi terkait dengan maneuver-manuver yang telah, sedang dan akan dilakukannya. Semua maneuver sang presiden selalu dihitung secara akurat untung ruginya, sehingga selalu tepat sasaran dan sesuai dengan arah kerja yang telah dicanangkannya. Sebut saja, pembangunan beberapa titik Jalan TOL di Sumatera Utara yang memang sudah dirindukan oleh masyarakat Sumut, Rencana Renovasi Danau Toba di Simalungun dan Samosir, pembangunan barbagai fasilitas di Papua, Pembelian kapal besar pengangkut Sapi, rencana meneruskan kembali pekerjaan barbagai proyek yang *mangkrak* di era SBY seperti proyek Hambalang, proyek Jalan Tol Cimanggis - Cibitung, pembangunan rel kereta api yang nilainya tercatat 143 Trilyun dll, semua

itu diinformasikan kepada masyarakat dengan kemasan yang apik dan saat yang tepat. Belum lagi berbagai kunjungan ke daerah yang dapat menjadikan Jokowi mendapatkan berbagai Gelar raja baru sesuai dengan daerah yang dikunjunginya. Ini merupakan diktum bahwa Jokowi sedang melakukan Komunikasi dengan seni dan bahasa yang tingkat tinggi, tepat sasaran, dalam situasi dan kondisi yang tidak menimbulkan gejala secara politik maupun sosial.

a. Bahasa dalam Lingkaran Komunikasi Politik

Bahasa mempunyai kaitan yang erat dalam proses komunikasi. Tidak ada satu peristiwa komunikasipun yang tidak melibatkan bahasa. Komunikasi pada hahekatnya adalah proses penyampaian pesan dari pengirim kepada penerima. Hubungan komunikasi antara pengirim dan penerima dibangun berdasarkan penyusunan kode atau simbol bahasa oleh pengirim dan pembongkaran kode atau simbol bahasa oleh penerima. Mengingat kenyataan bahwa dalam berkomunikasi kita dihadapkan oleh varian penerima yang sangat beragam, maka keberhasilan komunikasi akan sangat ditentukan oleh bagaimana cara kita menyampaikan pesan. Tidak jarang dalam kenyataan sehari-hari kita dapati bahwa komunikasi yang kita lakukan tidak berhasil akibat ketidaktepatan cara berkomunikasi yang kita lakukan. Paling tidak ada tiga hal yang harus diperhatikan agar sebuah komunikasi berlangsung efektif. *Pertama*, apa

yang akan dibicarakan. *Kedua*, dengan siapa kita akan bicara, dan *ketiga*, bagaimana cara membicarakannya. Dalam hal ini terkait dengan pemilihan ragam bahasanya, jenis kalimat, kosa kata, bahkan tinggi rendahnya suara saat berbicara.

Komunikasi yang berhasil adalah komunikasi yang berbekal kemampuan menyimpulkan apa yang dilakukan oleh partisipan terhadap bentuk bahasa dan konteks penggunaannya. Karena budaya kita berkomunikasi cenderung menggunakan tindak tutur tidak langsung (*indirect speech act*), maka perlu kemampuan menarik kesimpulan yang tepat dari apa yang dibicarakan. Keberhasilan dalam berkomunikasi disebabkan oleh beberapa hal, antarlain; kemampuan menarik kesimpulan dalam proses komunikasi, ketepatan pemilihan kosa kata, kecermatan dalam melihat konteks dan situasi komunikasi, serta ke-efektifan dalam berbahasa baik yang mencakup siapa mitra bicara, apa topik pembicaraan dan bagaimana cara berkomunikasi. Apabila komunikasi berhasil dilakukan, maka pesan yang terkandung akan dengan mudah dapat diterima dan dilaksanakan sesuai dengan keinginan, namun sebaliknya Ketidakberhasilan dalam berkomunikasi dalam banyak hal akan menimbulkan masalah dan bahkan konflik.

Dalam interaksi politik, bahasa mengemban fungsi sebagai wahana penyampai kebijaksanaan, memperoleh penghargaan dan untuk menyakinkan. Selain itu bahasa dalam komunikasi politik juga

memiliki karakteristik khusus, karena bahasa dalam ranah ini sering dijadikan alat untuk mencapai kekuasaan, mempertahankan kekuasaan, dan juga tak jarang menurunkan kekuasaan. Interaksi politik secara umum memiliki ciri-ciri tertentu dalam tindak komunikasinya. Komunikasi politik tidak bisa dilepaskan dari penggunaan bahasa yang mengarah pada penyampaian pesan, himbauan, harapan, permintaan, dan keinginan untuk pengaruh dan mempengaruhi. Dalam menjalankan fungsinya sebagai alat komunikasi politik, bahasa dikemas dengan menggunakan lambang-lambang atau pesan-pesan yang dapat mewakili ide atau pikiran para penuturnya. Oleh karena itu bahasa dalam komunikasi politik sudah sepantasnya menampilkan hal-hal yang bersifat Persuasif dan lebih memiliki “greget” simetris dalam ranah pencapaian tujuan dari penutur kepada penerima pesan..

b. Komunikasi Assertif Jokowi

Dalam Ilmu komunikasi, komunikasi assertif adalah usaha komunikasi dengan menggunakan bahasa yang lembut dan tepat sasaran bertujuan mencapai kemenangan dan kesepahaman bersama-sama; *win – win solution*. Komunikasi assertif menempatkan diri sebaik mungkin untuk dapat diterima oleh lawan bicara maupun koleganya. Komunikasi assertif menekankan pada tercapainya tujuan bersama berdasarkan tawaran-tawaran dan kesepakatan yang dihasilkan dari proses

komunikasi tersebut. Komunikasi assertif menitikberatkan pada aspek *goal ending* dengan menutup celah permasalahan dan mengantinya dengan peluang yang walaupun sangat sedikit namun dapat menjadi instrumen sebuah kesepakatan bersama. Komunikasi assertif selalu bersifat komunal dimana antara penyampai hajat dengan yang menerima manfaat merasa tujuan mereka sama-sama tercapai. Komunikasi assertif bertindak sebagai penyelamat atas sebuah permasalahan yang dihadapi bersama.

Pola komunikasi assertif inilah yang menurut hemat saya sebagai salah satu model komunikasi yang telah digunakan oleh Jokowi dalam memimpin Negara ini, setidaknya sampai hari ini. Berbagai proyek besar bangsa ini dapat diselesaikan dengan sangat minim gejala politik maupun sosial yang dimungkinkan timbul akibat dari pengambilan kebijakan pemerintah dibawah komando Jokowi. Lihat saja, dalam ranah politik, Jokowi telah berhasil melakukan komunikasi assertif dengan baik kepada para elit Golkar dan PAN yang semula tidak mendukung pemerintahan Jokowi namun sekarang berbalik mendukung, langkahnya tentu dapat ditangkap dengan mudah yaitu Jokowi kemudian mengakomodir kader partai Golkar dan PAN masuk kedalam jajaran kabinet kerja hasil *reshuffle jilid II*. Publik tentu percaya bahwa Jokowi akan dengan mudah *menge-goal-kan* program-program yang dajukannya didepan anggota DPR RI karena sekarang sudah 80% anggota parlemen yang mendukung pemerintahannya.

Penyelesaian atas masalah-masalah pembebasan tanah untuk jalan Tol juga dilakukan Jokowi dengan pendekatan persuasive dan komunikasi assertif. Jika pemerintah sebelumnya hanya mengandalkan para kontraktor untuk menyelesaikan persoalan itu, maka sekarang Jokowi membentuk tim khusus untuk melaksanakan hal tersebut, *al-hasil* semua proyek yang *mangkrak* dan tidak selesai dari era pemerintahan terdahulu dapat dilanjutkan dan bahkan hampir rampung. Jokowi beranggapan bahwa jika ditangani dengan benar, maka semua proses terkait dengan komunikasi akan dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga pembangunan tidak terkendala lagi. Mengatasi masalah tanpa masalah inilah yang kemudian membuktikan bahwa Jokowi benar-benar piawai dalam melakukan komunikasi assertif dengan target *win-win* solution pada setiap penanganan masalahnya.

Di awal pemerintahan Joko Widodo, banyak bermunculan spanduk yang menyuarakan kekecewaan masyarakat Batak terhadap Jokowi karena tidak adanya Menteri yang berasal dari tanah Batak dalam Kabinet Kerja, padahal mayoritas pemilih di Sumut ini yang memilih Jokowi adalah masyarakat Batak. Namun dengan kepiawaian Jokowi, pada Reshuffle Kabinet jilid I lalu, Jokowi mengangkat Luhut Binsar Panjaitan sebagai Menkopolkam, satu Jabatan Strategis yang diberikan kepada putra daerah tanah Batak, sontak gebrakan yang dilakukan oleh Jokowi pun menuai

pujian yang luar biasa dari masyarakat Batak, dan ternyata Jokowi tidak sia-sia menunjuk Luhut Binsar Panjaitan sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, karena dalam kenyataannya Luhut telah berhasil meredam berbagai gejolak politik, hukum dan keamanan yang terjadi diberbagai belahan negeri ini. Mulai dari kasus papa minta saham, sampai kepada kasus terkini yaitu kekeliruan Jokowi menunjuk Menteri ESDM Archandra Thahar pun tak luput dari peran Luhut Binsar Panjaitan sebagai tamengnya. Sementara itu dalam perspektif masyarakat Batak, masuknya Luhut dalam kabinet kerja membawa dampak yang luar biasa bagi masa depan masyarakat Batak, hal ini dapat dilihat dari Mega proyek renovasi Danau Toba yang akan dibangun oleh Pemerintah sudah bisa dipastikan tidak lepas dari peran Luhut Binsar Panjaitan, meskipun banyak publik menilai ini hanyalah strategi Luhut untuk menaklukkan hati masyarakat Batak, namun faktanya dengan dimasukkannya Luhut kedalam Kabinet Kerja telah menunjukkan perubahan besar bagi kecemerlangan masa depan masyarakat Batak, dan tentunya itu sangat bermanfaat bagi Jokowi sebagai presiden. Sehingga konsekwensinya, Jokowi diberi kesempatan untuk menyandang Marga “Sidabutar” dan ditetapkan ketika kunjungannya dalam acara Karnaval Pesta Danau Toba pekan lalu.

Banyak orang menganggap bahwa kepemimpinan Jokowi berada dibawah “*Ketiak*” Ketua umum

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarno Putri, sehingga apapun program yang dibuat oleh Jokowi tidak lepas dari peran serta dan masukan dari Ketua Umum Partai tersebut. Memang, sekilas jika kita amati dari sudut pandang bahwa Jokowi adalah kader partai, maka akan sangat lazim jika segala program yang dibuat oleh Jokowi akan banyak dipengaruhi oleh kepentingan Partainya. Namun dalam sudut pandang komunikasi assertif, justru kedekatan Jokowi dengan partai pendukung dan pengusungnya menjadi sebuah keharusan, karena Jokowi harus punya basis dukungan secara politik jika sebuah program telah diluncurkan kepada publik, dan yang bisa memberikan pengertian secara politik kepada masyarakat adalah statemen-statemen yang dikeluarkan oleh partai politik melalui para politikus dari partai tersebut. Dalam konteks inilah Jokowi sedang melakukan komunikasi assertif dua arah, yaitu komunikasi kepada Masyarakat melalui realisasi program, serta komunikasi kepada Partai politik pendukungnya sebagai basis penguatan politik baik diperlemen maupun untuk menjelaskan secara politis kepada khalayak ramai. Nah, wal-hasil, banyak program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat umum dapat terealisasi dengan cepat dan tepat sasaran, antara lain program Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, pembangunan 1 juta rumah layak huni, Penerbitan Tax Amnesti, Ketegasan melaksanakan hukuman mati, dan lain-lain yang

membuktikan bahwa komunikasi assertif yang dilakukan oleh Jokowi telah membuahkan hasil.

c. Kesimpulan

Jokowi sebagai Presiden RI memang selalu menarik untuk dibicarakan. Gaya komunikasinya yang *kampungan, udik*, justru menyimpan sebuah kekuatan besar dan *dahsyat*. Kemampuan Jokowi memanfaatkan segala potensi yang ada disekitarnya kian membuktikan bahwa Jokowi adalah salah satu Presiden dengan *talenta* kemampuan komunikasi yang sangat baik. Tidak banyaknya gejolak sosial dan politik yang timbul akibat dari kebijakan yang diambil oleh Pemerintah dibawah komando Jokowi kian menguatkan diktum bahwa era pemerintahan Jokowi ini sesungguhnya sedang berada dalam era ke-emasan pemerintahan Indonesia. Permasalahan terbelahnya partai politik yang mendukung dan tidak mendukung pemerintahan Jokowi menjadi suatu ujian tersendiri bagi Jokowi untuk menyelesaikannya. Dan faktanya, ditengah periode pemerintahannya Jokowi mampu menarik simpati partai politik untuk kemudian bergabung dalam kabinet kerja dibawah komandonya. Sepertinya bagi Jokowi, penolakan dan pandangan kritis atas segala kebijakan yang ia ambil oleh sebagian kelompok masyarakat atau bahkan partai politik, hanya dianggapnya sebagai bumbu-bumbu demokrasi. Penyelesaian secara persuasive dengan melakukan komunikasi assertif pun menjadi solusi bagi masalah

penolakan yang ia hadapi. Hemat saya, masih banyak kekurangan yang dimiliki oleh Jokowi terkait dengan pola komunikasinya, namun tidak salah juga jika kiranya kita bersikap obyektif terhadap realitas yang terjadi selama ini dengan tidak mengesampingkan sikap kritis yang logis kepada pemerintahan Jokowi saat ini. Wallu A'lam.

B. Jokowi Meredam Aksi

4 November 2016, aksi demonstrasi oleh elemen umat Islam yang dipusatkan di Jakarta karena kasus penistaan Ayat Suci Al-Qur'an oleh salah satu kandidat Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadikan momentum ini punya nilai tersendiri, setidaknya bagi Presiden RI Joko Widodo. Berbagai upaya dilakukan Jokowi guna meredam aksi ini, mulai dari melakukan safari politik ke rumah Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto sampai bertemu dengan Ketua MUI dan para Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan Pengurus Pusat Muhammadiyah. Semua itu dilakukan Jokowi dalam rangka meredam hawa panasnya aksi 4 November 2016. Dan wal-hasil, kedua Organisasi Islam terbesar di Indonesia itupun mengeluarkan larangan kepada para anggotanya untuk membawa-bawa atribut oransi dalam aksi 4 November tersebut.

Langkah Jokowi sebagai Presiden Indonesia dalam meredam aksi 4 November ini cukup juga banyak mendapatkan kritik sosial dari berbagai elemen

dan tokoh. Sebut saja salah satu ujaran yang datang dari salah satu Pimpinan Pesantren besar di Indonesia, beliau mengatakan bahwa Jokowi seharusnya tidak perlu repot-repot untuk menggalang dukungan guna meredam atau kalau bisa menggagalkan aksi 4 November, akan tetapi seharusnya cukup dengan mencari akar masalah dan fokus kepada persoalan hukum sang pembuat masalah. Hal lain adalah adanya pendapat masyarakat bahwa langkah yang dilakukan Jokowi adalah bentuk solidariti dengan melindungi kawan yang dulu mendampnginya maju dalam Pilkada DKI Jakarta sebelum ia menjadi Presiden RI. Walaupun alasan ini terkesan tendensius, namun agaknya masuk akal mengingat Ahok adalah mantan Wakil Gubernur pada saat Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta.

a. Jokowi tetap di Jakarta

Tanggal 4 November 2016 seharusnya Jokowi melakukan kegiatan Kepresidenannya ke Bandung guna menghadiri Penandatanganan MoU antara Pemerintah RI dnegan ITB Bandung. Akan tetapi karena aksi massa Umat Islam, Jokowi memilih membatalkan kegiatan tersebut dan tetap berada di Jakarta kendatipun berada di bandara Soekarno Hatta. Hal ini dilakukan Jokowi sebagai salah satu langkah preventif terhadap persepsi Massa pengunjuk rasa dimana tujuan Demonstrasi adalah mendorong Presiden Jokowi untuk mendesak dan mengawal langkah Hukum bagi kasus Ahok terkait penistaan agama melalui Surat Al-Maidah

Ayat 51. Dan dengan keputusan Jokowi untuk tetap berada di Jakarta ini telah mematahkan persepsi negatife para pengunjung rasa bahwa Jokowi akan lari ke Bogor seperti yang terjadi pada Presiden Sukarno pada saat Demo Tritura masa lalu.

Dalam retorika *Public Interest*, langkah untuk tetap berada di Jakarta yang dilakukan oleh Jokowi sudah sangat tepat, walau berdasarkan prosedur keamanan dan keselamatan Presiden sebagai simbol Negara seharusnya Jokowi harus pergi keluar Negeri atau paling tidak pergi keluar Jakarta, namun sepertinya Jokowi sedikit memaksakan diri untuk berada di Jakarta dan pilihan tepat adalah berada di Bandara Soetta, dengan asumsi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka Jokowi akan dengan cepat dapat diselamatkan melalui Bandara dengan terbang ke luar negeri atau ke daerah lain dengan alasan keamanan. Pilihan ini sesungguhnya sudah berdasarkan keamanan tingkat tinggi, mengingat Aksi 4 November 2016 lalu adalah aksi terbesar sepanjang sejarah Keperesidenan Pasca Reformasi 1998, oleh karena itu berbagai spekulasi dan analisa intelijen pun mengarah kepada hal-hal diluar tujuan semestinya dalam aksi 4 November 2016 itu.

Jika dilihat dari analisa kepolisian, bahwa tujuan aksi tersebut adalah mendorong Presiden untuk melaksanakan proses hukum terhadap Ahok sebgai terlapor dalam kasus dugaan penistaan Agama Islam, nyatanya proses hukum telah sedang dilakukan oleh

Polri dengan memanggil 21 saksi sebelum aksi 4 November. Nah, dari kacamata inilah kemudian Polri mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya tujuan dari aksi itu sudah terjawab, namun seperti aksi tersebut harus dilakukan dengan tujuan utama lainnya yakni perlawanan terhadap Pemerintah yang sah. Dari sinilah kemudian Polri beserta TNI mengambil langkah prosedur keamanan tingkat tinggi yang diberlakukan kepada Presiden Jokowi yaitu dengan melarang Presiden berada di Istana Negara pada saat terjadinya Aksi tersebut.

Namun seperti Jokowi ingin membuktikan bahwa Komunikasi dengan Masyarakat harus tidak tertutup dengan mengedepankan kepentingan publik yang insidental dan lebih perlu penanganan secara serius, maka Jokowi memilih sedikit bergeser ke Bandara Soetta namun tetap berada di Jakarta. Ya, Jokowi seperti sudah mempersiapkan ini dengan matang, faktanya setelah pukul 20.00 Jokowi kemudian memberikan pernyataan resmi kepresidenan dan mengucapkan terimakasih kepada para Pelaku Aksi yang telah melakukan aksi dengan damai, tertib, aman dan nyaman walau ada sedikit insiden namun itu disinyakir tidak datang dari para pengunjung rasa, akan tetapi datang dari oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Kesungguhan Pemerintah ditunjukkan dengan Jokowi memerintahkan Kementerian Perhubungan untuk menyediakan transport gratis bagi pengunjung rasa yang berasal dari

luar Jakarta untuk pulang ke daerahnya masing-masing.

Aksi 4 November 2016 telah selesai dengan PR bagi pemerintah adalah melakukan proses hukum bagi Ahok sebagai terlapor dalam kasus dugaan penistaan Agama Islam melalui Penyangkutan Surat Al-Maidah ayat 51 dalam ujaran politiknya beberapa waktu lalu, dan prediksinya hanya dua, *Pertama* Ahok akan ditetapkan sebagai tersangka lalu menjalani proses hukum yang semestinya akibat kasus penistaan Agama Islam, atau yang *kedua* Ahok justru akan bebas dan kasusnya tidak dilanjutkan karena menurut hasil penyidikan dan gelar perkara tidak ditemukan adanya bukti yang mengarah pada dugaan kasus penistaan Agama Islam. Apapun itu, yang jelas sebagai presiden, Jokowi telah mengambil langkah strategis dengan memerintahkan Kapolri untuk mengusut tuntas kasus tersebut dengan transparan dan memberikan kesempatan kepada publik untuk mengkonsumsinya secara terbuka, sebuah seni komunikasi elegan yang sedang dimainkan oleh seorang Presiden Republik Indonesia untuk meredam aksi massa dengan jumlah yang cukup fantastis.

b. Safari Politik “Sejuk” Jokowi

Tepat sehari setelah Aksi 4/11 selesai, Presiden Jokowi melakukan safari Politik dengan mengunjungi Kantor PBNU di Jakarta. Dalam pertemuan itu Jokowi mengucapkan terimakasih kepada PBNU yang telah menghimbau warganya untuk bersama-sama menjaga

ketertiban dan suasana aksi agar tetap damai dari mulai sampai selesainya aksi. Sekilas jika ditinjau dari peserta aksi, PBNU tidak memiliki garis instruksi kepada para peserta aksi 4/11, sehingga ucapan Jokowi terlihat salah alamat, namun sepertinya Jokowi memahami betul teori Psikologi Massa, sehingga safari Politik “Dingin” nya diarahkan kepada PBNU dengan alasan *Pertama* NU adalah Organisasi besar yang memiliki anggota dengan berbagai macam ragam dan modelnya, sehingga bukan tidak mungkin bahwa yang melakukan Aksi 4/11 kemarin sebagian besar juga adalah warga NU walau tidak mengatasnamakan NU, oleh karena itu peranan PBNU melalui Himbauan damai dan sejuaknya akan dapat meredam tensi hawa panas gejala saat mau demo bagi warga NU yang ikut aksi 4/11 tersebut. *Kedua* Nahdlatul Ulama adalah organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia, sehingga menjadi layak jika seorang Presiden seperti Jokowi menggandeng PBNU untuk diajak bersama-sama mendinginkan Suasana bagi dialektika beragama di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Dengan kata lain, memang Jokowi sengaja mendatangi Kantor PBNU guna mendapatkan dukungan secara sosial Keagamaan bahwa apa yang dilakukan oleh Pemerintah saat ini adalah ingin mengakomodir semua kepentingan bangsa terkait dengan dialektika Bergama di Indonesia.

Hari kedua setelah aksi 4/11 Jokowi mendatangi kantor PP Muhammadiyah di Jakarta. Tidak jauh dari pembicaraan dengan Pengurus PBNU sehari sebelum-

nya, Jokowi juga menyampaikan hal-hal terkait peredaman gejolak dialektika keagamaan yang saat ini sedang panas akibat kasus dugaan penistaan Agama Islam oleh Ahok. Sehingga dalam pertemuan ini Jokowi mengajak kepada PP Muhammadiyah untuk bersama-sama memberikan pengertian kepada Masyarakat khususnya warga Muhammadiyah untuk selalu bertindak mengatasnamakan kepentingan bangsa dan Negara. Muhammadiyah sepertinya menyambut baik apa yang diinginkan oleh Presiden Jokowi dengan memberikan masukan kepada Presiden untuk selalu melakukan komunikasi kepada seluruh lapisan masyarakat dan melakukan proses hukum Ahok secara terbuka, adil dan mengedepankan asas kebersamaan.

Di hari yang lain, Jokowi juga telah mengundang Ormas Islam lainnya ke Istana Negara, Ormas Islam yang diundang Jokowi antara lain Al-Jam'iyatul Washliyah, Mathla'ul Anwar, Al-Ittihadiyah, Wahdatul Islamiyah, Al-Irsyad, ICMI dan lain-lain. Dalam pertemuan ini agenda Jokowi adalah mengajak kepada seluruh Ormas Islam yang ada di Indonesia untuk bersama-sama menciptakan suasana sejuk dan damai pasca aksi 4 November 2016. Langkah ini menjadi substansi dari safari politik "Sejuk" Jokowi dalam rangka mendinginkan suasana pasca aksi 4/11. Dalam konteks ini Jokowi sedang melakukan komunikasi akomodatif dengan mengajak seluruh lapisan masyarakat melalui Ormas Islam sebagai representasi dari masyarakat Islam di Indonesia guna

memahamkan masyarakat bahwa yang menjadi inti persoalan sudah dijalankan proses hukumnya sesuai dengan prosedur yang berlaku, dan selanjutnya adalah memberikan kepercayaan kepada pelaksana Hukum (Polri, Kejaksaan, Pengadilan) untuk bekerja dengan benar dan sesuai prosedur hukum.

c. Kesimpulan

Langkah-langkah yang dilakukan Jokowi diatas merupakan upaya secara komunikatif untuk menciptakan suasana sejuk pasca aksi 4 November 2016. Langkah-langkah ini menurut hemat saya menjadi menarik karena *Pertama* Jokowi ingin mengajak seluruh lapisan Masyarakat untuk mencintai NKRI, bahwa apapun yang terjadi NKRI haruslah menjadi tujuan akhir dari segalanya, dan siapapun yang berusaha untuk menggoyanginya haruslah menjadi musuh bersama dan perlu disadarkan secara bersama-sama pula. *Kedua* Jokowi berkomitmen untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu dengan memproses Ahok secara transparan dan dapat dikonsumsi publik, dan seluruh Ormas Islam harus mendukung itu dengan tetap mengedepankan nilai-nilai ke-Indonesiaan dalam pola dukungan kepada pemerintah. *Ketiga* Pemerintah melalui Presiden Jokowi sedang melakukan penguatan dukungan kenegaraan dari sektor Organisasi keagamaan Islam guna menampik usaha-usaha melawan Negara. *Keempat* Presiden Jokowi telah memberikan kesempatan kepada semua Ormas Islam

untuk tampil dipermukaan dalam dimensi dialektika kehidupan berbangsa dan bernegara melalui safari Jokowi ke Kantor PBNU, PP Muhammadiyah serta undangan ke Ormas-Ormas Islam lainnya ke Istana Negara. *Kelima* Sesungguhnya Jokowi sebagai Presiden Indonesia sangat membutuhkan peran serta Ummat Islam untuk menjaga Persatuan dan kesatuan bangsa. karena sesungguhnya peranan ummat Islam tidak bisa dilepaskan dari sejarah pembentukan bangsa yang besar ini. Oleh karena itu Presiden Jokowi harus belajar banyak dalam rangka merebut simpati masyarakat Islam khususnya di Indonesia ini.

C. Ahok dan Kegaduhan Bahasa

a. Sebaiknya Ahok Diam

Manuver politik atau apalah yang pantas disebut untuk ujaran-ujaran bahasa yang dikeluarkan oleh Sang Petahana Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yang jelas akibat dari ujaran itu sudah melukai publik khususnya umat Islam di seantero Nusantara. Wal-hasil, protes keras terkait ujaran itupun berdatangan dari berbagai elemen umat Islam, tidak hanya di Jakarta bahkan diluar Jakartapun semuanya menghujat, memaki, merespon negatif ujaran Ahok terkait dengan surat Al-Maidah ayat 51 yang diucapkan pada saat menghadiri sebuah acara di Kabupaten Kepulauan Seribu. Ya, barangkali ini adalah pembuktian bahwa ayat-ayat Allah SWT tidak boleh semena mena digunakan walau hanya untuk sebuah

ujaran pendek yang barangkali tidak bermaksud atau hanya sekedar *guyonan* saja. Sesungguhnya jika dilihat dari fungsi ujaran bahasa akan memiliki makna yang sangat luar biasa. Sekarang, reaksi itu telah muncul, dan konsekwensi logisnya adalah akan ada berbagai aksi dan tindakan nyata dalam rangka resistensi terhadap fenomena tersebut. Buntutnya, tidak hanya pertontonan aktifitas politik sebagai inti dari pesta demokrasi saja namun lebih dari itu gesekan religious, pemanfaatan opportunities dari proses ini juga akan mewarnai pesta demokrasi khususnya di Provinsi DKI. Sebuah efek yang manis untuk disimak kelanjutannya.

b. Fungsi Ujaran Dalam Politik

Dalam teori bahasa, Ujaran memiliki fungsi yang disesuaikan dengan kualitas ucapan, kuantitas penerima, tempat atau latar yang mendasari suatu ujaran dikeluarkan serta relasi akibat atau efek dari ujaran yang dikeluarkan itu. Fungsi Ujaran bahasa sesuai dengan paradigma yang mendasarinya terdiri dari 6 fungsi yaitu; Ekpressif, Direktif, Refrensial, Metalinguistik, Poetik dan phatik. Ke enam fungsi ujaran tersebut menurut Holmes dikategorikan sebagai dasar memahami fungsi ujaran yang digunakan oleh masyarakat komunitas bahasa. Jika merujuk kepada teori analisa *speech function* M.A.K Halliday, maka kita akan menemukan jenis fungsi ujaran dari dasar dimana segala yang terkategori dalam fungsi ujaran harus bernuansa memberikan informasi, memberikan

pelayanan serta sesuatu yang terbaik kepada lawan bicara. Dalam konteks ini jenis fungsi ujaran yang akan keluar adalah pernyataan (Statement), Pertanyaan (Question), Penawaran (Offer) serta Perintah (Command). Sedangkan berbagai fungsi ujaran tersebut akan terealisasi sesuai dengan suasana hati (Mood) masyarakat berbahasa yang dapat dikategorikan menjadi 3 yaitu; Deklarasi, Introgasi dan Afirmasi.

Dilihat dari penjelasan sekilas tentang fungsi ujaran diatas, betapa sesungguhnya setiap ujaran memiliki fungsinya masing-masing sesuai dengan pertimbangan jenis, tipe dan kelayakan secara sosialnya. Demikian juga ujaran-ujaran dalam ranah politik, ujaran-ujaran politik memiliki andil besar dalam pembentukan spektrum fungsinya, hal ini dapat didorong oleh faktor siapa, apa dan seperti apa situasi pendukung dari sebuah ujaran itu dikelurkan. Bisa saja fungsi ujaran dalam dimensi politik menjadi berbeda jika diterjemahkan oleh masyarakat yang memiliki *basic interest* diluar politik. Oleh karenanya fungsi ujaran yang sesungguhnya menjadi patokan akan mengalami distorsi fungsi yang selanjutnya terjadi pertentangan dalam hal pemberian makna dan interpretasinya.

Dalam teori dekonstruksi bahasa yang dimotori oleh George Jaques Derrida, interpretasi atau pemaknaan terhadap fungsi ujaran lebih didasarkan pada pemahaman publik terhadap sebuah ujaran sesuai dengan modal pengetahuan yang dimilikinya, teori ini tidak membenarkan adanya pemaksaan penerimaan ide

dan maksud dari sebuah gagasan atau ujaran yang dimunculkan oleh pembicara awal, namun lebih menghargai penangkapan secara matang berdasar pada basis keilmuan dan tata cara memandang masing-masing. Jadi jika ujaran politik diterjemahkan berbeda secara fungsi oleh para ahli ekonomi, para ahli agama, para ahli sosial kemasyarakatan, para ahli budaya dan lain sebagainya, maka hal itu menjadi sangat lazim dan layak, sehingga dalam hal ini akan terjadi kontrol berimbang terhadap fungsi ujaran yang awalnya datang dari ranah politik.

c. Ujaran Politik “Gaduh” Ahok

Dalam dunia politik, peranan ujaran sangat besar. Proses politik merupakan praktik komunikasi, artinya bagaimana mendayagunakan ujaran-ujaran sebagai alat komunikasi politik yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Oleh karenanya ujaran politik harus ditata sedemikian rupa karena dalam struktur linguistiknya penuh dengan muatan kekuasaan yang tersembunyi. Karena sesungguhnya ujaran politik memegang peranan penting dalam upaya untuk meyakinkan massa terhadap visi, misi dan orientasi yang ingin diwujudkan oleh elit politik atau partai politik tertentu. Maka dalam hal ini, jelas bahwa ujaran adalah faktor yang urgen dalam pembentukan *mindset* masyarakat dalam ranah politik di negeri kita ini.

Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam ujaran penyampaian ide, tujuan, serta kepentingan politiknya

cenderung sangat gaduh, kegaduhan ini tentu berefek pada penafsiran fungsi ujaran yang disampaikan oleh Ahok, penafsiran-penafsiran itu justru tidak jarang telah menembus wilayah privat dari Suku, Ras dan bahkan Agama. Wal-hasil, makian, cacian, hujatan, protes, sampai persepsi negatifpun muncul sebagai akibat dari ujaran politik Ahok yang gaduh tersebut. Padahal seandainya Ahok tahu bahwa Bahasa ujaran yang dikeluarkan olehnya selalu menjadi otak dari pembentukan karakter politik yang ingin dibangun oleh dirinya di negeri ini. Maka mustahil Ahok akan dengan mudah mengeluarkan ujaran-ujaran politik gaduhnya dalam setiap even, bahkan even kenegaraan sekalipun.

Sementara itu dalam sudut pandang politik kekuasaan, mengingat Ahok saat ini masih berstatus sebagai Gubernur DKI Jakarta, maka setiap ujaran politik yang dikeluarkan olehnya adalah representasi dari tujuan kepemimpinannya. Sekilas, sebagai masyarakat yang hidup dalam negara yang sangat menghargai perbedaan dan keragaman ini, tentu gaya bahasa dalam setiap ujaran Ahok tidaklah mengapa dan bisa dikategorikan sebagai hal biasa, karena gaya berbahasa dan berujar adalah hak privasi si-empunya sendiri. Namun, jika gaya berujar yang sudah banyak menimbulkan kerut kening bagi kebanyakan orang itu justru dimodifikasi dengan referensi yang bermuatan dalil-dalil sakral (Ayat Alqur'an misalkan), maka malah akan menimbulkan reaksi dan dapat mengancam integritas kekuasaan yang saat ini ada pada Ahok, dan

tentunya Ahok harus siap untuk itu, karena ibarat pepatah mengatakan “Mulutmu Harimaumu”. Semestinya, Ahok harus ingat bahwa ujaran politik adalah senjata mematikan bagi kekuasaan. oleh karena itu, seseorang bisa aja tercerabut dari lingkaran kekuasaannya jika dia telah melanggar aturan maksim pragmatisme bahasa yaitu *maksim norma* dan *maksim kesantunan berbahasa*. Dan hal ini pernah terjadi pada Presiden ke-4 Republik Indonesia KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Dengan ujaran-ujaran politiknya yang ceplas ceplos saat itu, justru malah membuat blunder bagi dirinya, sehingga DPR merasa gerah dan melawan dengan berbagai cara untuk menjatuhkan Gus Dur dari kursi kepresidenan.

Ujaran politik sangat erat kaitannya dengan upaya untuk merebut simpati rakyat. Ia hadir dan dibutuhkan untuk menumbuhkan pencitraan tertentu agar rakyat terpengaruh dan tersugesti oleh propaganda dengan ikon-ikon politik yang ditawarkan. Dalam idealitas ini, seorang Ahok sebagai politisi yang cerdas, dengan sendirinya perlu memiliki kecerdasan linguistik dalam upaya membangun komunikasi dan interaksi dengan publik. Ini artinya, ujaran politik yang dilontarkan oleh Ahok idealnya harus mengandung muatan dan misi kerakyatan yang dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat melalui ujaran-ujaran yang sederhana, gampang dicerna, dan terhindar dari kesan melawan apalagi sampai pada penistaan, karena sesungguhnya ujaran politik harus bisa

mengkomunikasikan maksud dan tujuan dari para elit politik kepada rakyat sebagai subyek ide maksud dan tujuan tersebut. Penggunaan bahasa yang lugas, sederhana, gampang dicerna dan tidak menyinggung sakralitas ayat-ayat Agama tertentu akan dengan mudah dicerna oleh rakyat, karena ketika sedang membuat ujaran politik sejatinya mereka sedang berkomunikasi dengan rakyat lewat ujaran-ujaran yang disampaikan.

d. Kesimpulan

Bagi saya, proses Pilkada DKI Jakarta adalah cerminan demokrasi bagi Indonesia dalam skup kecil. Oleh karenanya, Kita ingin melihat pesta demokrasi di DKI Jakarta berlangsung secara damai, arif, aman dan sukses sampai pada akhir babak pertarungan politik secara sehat. sehingga biarlah proses demokrasi itu berjalan sebagaimana mestinya, berjalan sebagaimana layaknya, berjalan sebagaimana seharusnya, biar saja dari unsur, etnis, ras, suku dan agama apapun para kompetitornya tidaklah menjadi persoalan. Yang terpenting adalah siapa yang akan menang tergantung pada rakyat yang akan menentukan pilihannya dengan melihat program dari masing masing-masing kandidat. Oleh karena itu untuk menjaga kondusifitas itu, sebaiknya para calon Gubernur DKI Jakarta harus menahan diri dengan tidak mengeluarkan ujaran-ujaran politik yang dapat memicu terjadinya konflik horizontal di masyarakat. Dan Ahok sebagai salah satu calon

Gubernur DKI periode mendatang harus mampu menahan diri dengan tidak mengeluarkan ujaran-ujaran politik dengan refrensi menyudutkan sakralitas Ayat-ayat Agama tertentu yang justru dapat mengantarkan Ahok menjadi Calon yang gagal untuk dipilih oleh rakyat DKI Jakarta sebelum sampai pada hari H pemilihan. Dan tentunya jika ini terjadi, proses demokrasi di DKI Jakarta akan kehilangan ruhanya, karena sesungguhnya Ahoklah sekarang ini yang menjadi viral untuk dilawan bagi calon-calon lainnya. Nah, untuk menghindari hal tersebut terjadi, Sebaiknya Ahok Diam.



BAB VI

KUASA BAHASA DALAM PROSES DINAMIKA KEBANGSAAN

A. PROMOSI KEBHINEKAAN

Aksi Bela Islam III pada tanggal 2 Desember 2016 yang merupakan kelanjutan dari Aksi bela Islam II tanggal 4 November 2016 sesungguhnya merupakan titik nadir dari keberhasilan Umat Islam. Karena yang mnejadi tuntutan utama dalam aksi tersebut adalah menjebloskan Ahok kedalam penjara sembari proses hukum tetap berjalan dalam lingkup Polri dan penegak hukum lainnya. Tuntutan itu seperti mudah saja direalisasikan, akan tetapi dalam kenyataannya harus menemui berbagai rintang mulai dari stabilitas politik karena notebne Ahok saat ini adalah calon Gubernur DKI Jakarta sampai kepada stabilitas keamanan yang disinyalir ditunggangi oleh pihak-pihak tertentu guna melakukan tindakan Makar terhadap Negara.

Kondisi ini sepertinya betul-betul dipahami oleh Pemerintah, sehingga berbagai langkah taktis dan

strategis dilakukan guna memberikan suguhan bernuansa lain kepada masyarakat. Entah itu tujuannya untuk menjadikan masyarakat tidak fokus pada isu sentral, atau memang cara pemerintah yang sangat apik dalam mendramatisir isu besar menjadi sangat persuasive dimata masyarakat. Ya. Apapun komentar banyak orang saat ini, yang jelas masyarakat Indonesia telah disuguhi sebuah penyelesaian konflik dalam kerangka demokrasi yang apik dan patut dijadikan contoh oleh dunia. Suguhan penyelesaian konflik berbasis masyarakat yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini dengan betul-betul mendayagunakan eseni komunikasi berbasis kebahasaan yang kuat, sehingga tanpa sadar eksistensi tuntutan Aksi Bela Islam I, II, III yang telah terjadi menjadi berimbang dengan isu-isu kebangsaan dan kebhinekaan yang dilontarkan oleh Pemerintah.

a. Kognisi Sosial yang berhasil

Teun A Van Dijk dengan teori Kognisi sosialnya (dalam Eriyanto, 2001: 222) menjelaskan bahwa Teks wacana harus dilihat tidak hanya sebatas struktur teks itu sendiri, akan tetapi harus dilihat lebih jauh pada aspek-aspek sosial yang mendasari lahirnya teks tersebut. Berdasar pada teori ini, Saat ini Pemerintah Indonesia sepertinya sedang melakukan model pengelolaan wacana yang oleh Van Dijk disebut sebagai Kognisi Sosial itu. Kata “Menjaga Kebhinekaan”, “Kita Cinta Indonesia” sepertinya lahir dari kajian mendalam

terhadap dinamika yang terjadi di masyarakat. Berdasar pada terjadinya Aksi bela Islam yang ke-2 tanggal 4 November 2016 kemarin, Pemerintah kemudian menganalisa secara mendalam untuk memunculkan wacana baru yang dapat mendampingi Wacana Bela Islam berkembang dan sama-sama mendapatkan tempat di hati masyarakat. dan Wacana menjaga Kebhinekaan seperti halnya yang paling cocok untuk mendampingi wacana Bela Islam. Sehingga wacana kebhinekaan tersebut secara gencar disuarakan oleh pemerintah melalui berbagai aksi sosial seperti Penggalangan massa bertajuk “Apel Akbar Kebangsaan” diberbagai daerah dan provinsi yang dilakukan sebelum aksi 212, serta Parade kebangsaan yang dilaksanakan tepat satu hari setelah Aksi bela Islam III di Jakarta.

Norman Fairlough (1989) dalam karya kontemporernya “Language and Power” memberikan kontribusi yang sangat menarik terkait bagaimana bahasa berperan dalam lingkaran kekuasaan, dalam tulisannya lebih lanjut, Fairlough (1989: 5) melihat bahwa bahasa sebagai praktik kekuasaan, artinya menggunakan bahasa tentu tidak akan luput dari tujuan kekuasaan tertentu. Dari pandangan Fairlough ini mengindikasikan bahwa relasi bahasa dan kekuasaan tidak dapat dipisahkan, bahasa lahir dan dimunculkan dengan tujuan-tujuan tertentu dan tentunya tujuan-tujuan itu bernuansa mempertahankan kekuasaan atau justru ingin meruntuhkan kekuasaan. Berkaca dari

pemikiran Fairlough tersebut, Pemerintah kita sepertinya sedang melakukan praktek relasi bahasa dan kekuasaan. Dengan memunculkan sebuah teks “kebhinekaan” pemerintah telah berhasil paling tidak menjaga meluasnya tujaun aksi Bela Islam I, II, III. Dalam konteks ini Pemerintah tetap menginginkan subsantasi Aksi bela Islam I, II, dan III tidak melebar sampai kepada tindakan maker, sehingga pelebaran substansi Aksi bela Islam yang tersinyalir adanya tujuan makar oleh para intelejen Negara menjadi terdistorsi akibat dari dimunculkannya teks dampingan yaitu “Menjaga kebhinekaan” ditenga-tengah masyarakat.

Dalam pandangan Eriyanto (2001: 227-228) ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam pembentukan wacana dalam sebuah kejadian. Pertama *Discourse Practice*, kondisi ini menitikberatkan sejauhmana efektifitas teks yang dimunculkan dalam sebuah kejadian. Efektifitas yang dimaksud disini adalah bagaimana teks mampu merubah sebuah kondisi yang sedang berlangsung kedalam kondisi yang diinginkan oleh si-pengguna teks tersebut, atau jika merubah kondisi tersebut sangat sulit mengingat berbagai faktor yang mengelilinginya, maka paling tidak teks tersebut mampu mengimbangi kekuatan dan kuasa dari teks lama yang telah mempengaruhi kondisi yang sedang terjadi. Nah, saat ini Pemerintah dengan jeli telah meletakkan teks “Menjaga Kebhinekaan” bersanding baik dengan teks “Bela Islam”. Sedangkan mengenai

kuasa teks itu sendiri apakah mengungguli atau mendampingi itu terserah pada pembaca mengartikannya sesuai dengan tingkat dan kemampuan pembaca dalam memahami sebuah tafsir akan teks, saya tidak bisa memaksa para pembaca untuk ikut larut dalam pemahaman saya berdasar pada kemampuan saya melihat dan menerjemahkan suatu teks.

Kedua *Sosioclutural Practice*, pratik sosiokultural menitikberatkan pada aspek kuasa bahasa bermain pada ranah sosial dan budaya. Hal senada juga diutarakan oleh Halliday (1979:56) bahwa bahasa adalah aktifitas sosial, dimana dalam aktifitas tersebut terbentuk sebuah relasi yang sangat kuat dimulai dari munculnya Lexicogrammar (Kosakata), kemudian menjadi genre (Kebiasaan) selanjutnya menjadi register (kebudayaan) dan pada akhirnya menjadi sebuah Idiology (Identitas). Jika “teks bela Islam” kemudian dibiarkan berjalan sendiri dimasyarakat tanpa didampingi oleh teks yang lain, maka dikhawatirkan mainstream berfikir masyarakat Indonesia kedepan hanya akan bermuara pada satu titik dan meninggalkan dimensi lain dari pondasi bangsa Indonesia. Oleh karena itu Pemerintah dengan sekuat tenaga mencarikan pasangan yang dapat mendampingi Teks “bela Islam” sehingga teks tersebut tidak berjalan sendiri di masyarakat melainkan saling berdampingan dan pada akhirnya nanti diharapkan akan melebur seperti sedia kala.

b. Membumikan Wacana Kerakyatan

Wacana dapat diartikan sebagai sebuah makna yang terkandung didalam teks, sementara teks menurut Halliday (1979) diartikan sebagai unit bahasa (Linguistik) yang memiliki fungsi dan berperan didalam konteksnya. Lebih lanjut masih menurut Halliday (Dalam Saragih, 2012: 3) Konteks kemudian diartikan sebagai sesuatu (Something) yang menyertai atau mengawainai teks (Co-Texts), istilah menyertai atau mengawani oleh Saragih (2012: 10) diperdalam dengan membagi Konteks kedalam dua bagian yaitu konteks sosial dan konteks Bahasa. Konteks sosial lebih mengarah kepada relasi bahasa dengan realitas sosial dimana bahasa sebagai unit memiliki peran sebagai Lexicogrammar (Kosakata awal) dalam membentuk Situasi (Register) dimana elemen yang terkandung dalam pembentukan situasi tersebut adalah Aktifitas (Field), pelaku (tenor) dan peran bahasa dalam pembentukan situasi tersebut (Mode). Selanjutnya dari situasi yang telah terbentuk nantinya lama kelamaan akan menjadi budaya (Culture), dan kemudian setelah menjadi budaya di masyarakat selanjutnya hasil dari Lexicogrammar membentuk register (Situasi), kemudian menjadi Genre (Budaya) ini nantinya akan mencapai klimaksnya dengan menjadi idielogi bagi masyarakat. Sedangkan konteks bahasa lebih melihat kepada kecocokan kata sebagai teks dengan kata, frasa, clausa lainnya yang secara bersama-sama membentuk sebuah kalimat sehingga memiliki maksud dan tujuan.

Dalam konteks ini, bisa saja satu kata memiliki beda arti dan makna jika ditempatkan atau disandingkan dengan kata, frasa, klausa lainnya dalam kalimat yang berbeda.

Berdasarkan penjelasan teoritis diatas, mari kita menilik sejenak kondisi bangsa kita terutama dari segi penempatan wacana kebahasaan. Meminjam istilah Chaika “Language is a social mirror”; bahasa adalah cermin sosial, tentu kita akan menemukan sebuah permainan pengaruh wacana yang sedang terjadi di Negeri kita ini. Dan penontonnya yaitu rakyat dan masyarakat luas sedang diajak untuk memiliki kedewasaan berpikir demi menerima dan mencerna wacana yang sedang dimainkan oleh para elit pemerintah dan elit golongan tertentu. Jika dilihat dari gejolaknya, Permainan wacana di Indonesia saat ini lebih mengarah dan tepat seperti yang diistilahkan oleh Witgeinstein “ sebagai “Wahana Permainan” dimana Elit sedang mengimbangi permainan wacana dari elemen masyarakat atas sebuah kasus pidana penistaan agama oleh seorang calon Gubernur DKI Jakarta atas nama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Dalam permainan ini belum jelas wacana mana yang berposisi sebagai protagonist dan wacana mana yang mengambil posisi sebagai antagonis, kedua-duanya masih saling merebut simpati pemahaman masyarakat dengan paradigma masing-masing. Jika Wacana yang dimunculkan oleh elemen GNPF adalah dalam ranah pembelaan pada Agama Islam, dan tentunya ini sangat *acceptable* mengingat mayoritas penduduk Indonesia

adalah muslim, maka wacana lain yang dimunculkan oleh pemerintah adalah menyingung terkait komitmen berdirinya Bangsa Indonesia yaitu “Kebhinekaan” (Keberagaman). Nah, dua wacana inilah saat ini yang sedang bergelayut memainkan peran masing-masing.

Dilihat dari sisi target dan tujuannya, Wacana Bela Islam sebenarnya memiliki target dan tujuan yang sangat sederhana, yaitu mengawal kasus hukum Ahok sampai pada putusan hukum tetap sebagai tersangka dari kasus dugaan penistaan Agama Islam yang dilakukannya beberapa waktu lalu. Hal ini cukup realistis, mengingat kasus agama sangatlah sensitif di Negara manapun, karena agama merupakan obyek transenden dan sangat sakral bagi para pemeluknya. Sehingga elemen GNPF merasa sangat perlu untuk terus mengingatkan masyarakat dan para penegak hukum untuk tidak mengesampingkan apalagi melupakan begitu saja kasus tersebut, dan cara mengingatkan dan mengawalinya adalah dengan mengundang partisipasi masyarakat untuk turun kejalan melakukan aksi sosial bertajuk Aksi Damai dan Super Damai. Dari perspektif ini, dapat diambil kesimpulan bahwa sebenarnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan dai aksi Wacana Bela Islam ini. Karena sejatinya wacana ini dapat diangap sebagai [enggerak kemunculan kembali kecitaan terhadap Agama Islam yang mungkin telah redup, Dan Negara harus menghormati itu, karena fakta sejarah mengatakan

bahwa Negara ini juga dibangun tidak lepas dari faktor agama sebagai fondasinya.

Jika pemerintah memahami maksud dan tujuan aksi Bela Islam dengan sebenar-benarnya, maka terlalu berlebihan pemerintah menganggap ada upaya-upaya lain (Tindakan Makar) yang tersusup dari aksi tersebut. Namun, barangkali Pemerintah melihat dari sudut pandang yang lain, yaitu dengan ikut sertanya actor-aktor politik *outsider* masuk dalam aksi tersebut sehingga pemerintah cepat mengambil kesimpulan bahwa ada upaya lain (Makar) yang terselip dari aksi tersebut. Disisi lain, adanya Wacana Simbolik seperti “Membentuk NKRI bersyari’ah” juga menjadi identifikasi tersendiri oleh Pemerintah dalam mengambil langkah preventif guna menghadapi niat terselubung dari aksi Bela Islam yang terjadi beberapa waktu lalu. Dari sinilah, menurut Hemat saya kemudian Pemerintah merasa perlu untuk membuat wacana tandingan yang diwujudkan dalam bentuk pesan iklan maupun tindakan nyata berupa aksi kebangsaan.

c. MONAS; Bukti Solidaritas Umat Islam

Aksi Bela Islam III yang semula di rencanakan disepanjang jalan dari Bundaran Hotel Indonesia sampai ke depan istana Presiden telah berhasil dipindahkan ke area Monumen Nasional. Keputusan ini bukan tanpa sebab, melainkan melalui kajian yang sangat mendalam dan penyesuaian-penyesuaian

berbagai aspirasi dari elemen yang akan melakukan aksi dengan pemerintah sebagai obyek sasaran aksi. Penyesuaian berbagai aspirasi dan pertimbangan itu dapat dihasilkan setelah beberapa upaya negosiasi dilakukan melalui komunikasi yang intens antara pemerintah dengan stakeholder elemen yang akan melakukan aksi. Kapolri, Panglima TNI pada pertemuan mereka dengan pentolan GNPF (Habib Riziq, Munarman, Bachtiar Natsir) telah memperoleh kata sepakat bahwa aksi Bela Islam akan dipindahkan titik kumpulnya di area Monumen Nasional, hal ini dilakukan mengingat pertimbangan sterilisasi massa agar tidak mudah disusupi penyusup yang memiliki agenda lain dari aksi itu sendiri.

Sementara itu beberapa hari sebelumnya, Presiden Jokowi telah melakukan safari Politik ke berbagai elemen Organisasi Masyarakat Islam, seperti NU, Muhammadiyah, MUI, serta mengundang para ketua Ormas Islam selain NU dan Muhammadiyah ke Istana Negara guna melakukan silaturahmi politik dan membuat komitmen keamanan bersama. Selain elemen Ormas Islam, Presiden juga mengundang para pembesar Partai untuk berkunjung ke Istana dan melakukan pembicaraan khusus terkait isu kebhinekaan dan kebangsaan. Hal ini ternyata cukup efektif dalam menguatkan peran seorang Jokowi sebagai Presiden Indonesia. Komunikasi dan safari politik yang dilakukan Jokowi harus diakui memiliki imbas yang

besar dalam meredam aksi yang dilakukan oleh Elemen GNPF pada tanggal 2 Desember 2016.

Kepiawaian Jokowi dalam melakukan komunikasi politik yang sejuk ini bukan tanpa sebab, Sebagai orang Jawa, Jokowi mampu melakukan praktik seni komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif tersebut menembus batas ruang dan waktu dari sekatan-sekatan individu maupun sosial, walaupun seperti terkesan sedikit merendah, Jokowi tetap melakukan kunjungan-kunjungan keberbagai lapisan yang menurutnya sangat berpengaruh dalam menciptakan kodusifitas Negeri ini. Sehingga semua elemen bisa didatangi Jokowi, mulai dari Ormas Islam terbesar di Indonesia (NU dan Muhammadiyah), Markas TNI, sampai kepada Ketua dan pembesar Partai Politikpun tak luput dari sasaran seni komunikasi efektifnya. Seni komunikasi efektif ini kemudian dipopulerkan oleh Jokowi sebagai Kegiatan menjaga Silaturrahi sebagai warisan budaya luhur bangsa Indonesia secara turun temurun. Pilihan frasa menjaga silaturrahi oleh Jokowi ini sepintas hanya frasa yang sederhana saja, namun sebenarnya memiliki kekuatan dan kuasa frasa yang dahsyat dan berdampak luar biasa khususnya dalam menjaga stabilitas Negeri ini.

Jokowi sepertinya mendapatkan pelajaran yang berharga dari dua Aksi Bela Islam sebelumnya, dalam Aksi Bela Islam I dan II, Pemerintah cenderung mempersiapkan peredaman aksi dengan cara menerapkan prosedur keamanan seperti menghadapi

musuh, dalam konteks strategi keamanan menghadapi musuh, Presiden adalah lambing Negara yang harus dilindungi dan diselamatkan pertama kali jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Maka konsekwensinya, para peserta Aksi sepertinya berhadapan dengan benteng kekuasaan sehingga menyulut munculnya heroism Jihad dikalangan para peserta Aksi. Lihat saja Aksi Bela Islam II yang jumlah massanya jauh lebih banyak dari Aksi Bela Islam I, memiliki kekuatan semangat Jihad (perang) lebih membara. Dan itu akan berlanjut pada Aksi Bela Islam III. Namun Pemerintah sepertinya tidak mau kecolongan lagi, oleh karena itu Pemerintah merubah strategi dari menghadapi para peserta Asi dengan cara represif menjadi cara *social preventive* yang menitikberatkan pada kesepakatan bersama sebelum aksi, bukan kesepakatan bersama pada saat aksi. Nah, ruanya cara in sangat efesien, sehingga Aksi Bela Islam III dapat dipusatkan di Monas dengan tertib dan dibawah penjagaan Kemanan yang kondusif. Sungguh suatu capaian dalam meredam Aksi yang luar biasa.

Kesepakatan untuk memilih Monas sebagai lokasi titik kumpul Massa Aksi Bela Islam III sesungguhnya menjadi bukti bahwa Umat Islam memiliki hati yang bersih dan solidaritas yang solid. Kerelaan hati seluruh umat Islam yang menjadi peserta Aksi Bela Islam III telah ditunjukkan disini, bahwa aksi ini sebenarnya bukan ditujukan untuk unjuk kekuatan semata, namun lebih tepat sebagai bentuk solidaritas

umat Islam terhadap persoalan bangsa terlebih pada ranah penegakan hukum. Umat Islam yang melakukan Aksi bukan tidak percaya kepada Pemerintah atas penegakan hukum yang sedang dilakukan terhadap tersangka kasus penistaan agama Islam oleh Ahok, akan tetapi lebih pada pengawalan kepada Pemerintah untuk tetap konsisten terhadap kasus tersebut dan menjauhkan kasus ini dari nuansa politik dan kepentingan-kepentingan negatife lainnya.

Bentuk solidaritas lainnya dibuktikan oleh umat Islam dengan jumlah yang fantastis telah datang berbondong-bondong dari seluruh penjuru tanah air ke Monas Jakarta. Lebih dari tujuh juta jiwa berkumpul di area Mnas Jakarta, dengan tertib dan aman, seluruh peserta aksi mengikuti instruksi yang diberikan oleh koordinator aksi, sehingga aksi yang biasanya terkesan seram dan penuh dengan wajah-waah waspada, kali ini berubah menjadi aksi yang tenang, nyaman, super damai dan kondusif, sehingga Presiden dan wakil presiden beserta seluruh jajaran pemerintahpun datang dan menyatu dengan rakyat, ya memang sepintas, terkesan aksi tersebut sudah kehilangan bentuknya karena sudah berubah menjadi parade silaturrahmi, namun sesungguhnya esensi dan substansi dari tujuan aksi itu telah tercapai, yakni penekanan kepada pemerintah untuk tetap mengawal dan melanjutkan proses penegakan hukum terhadap kasus penistaan agama Islam oleh Ahok. Dan dalam konteks ini, seluruh Umat islam peserta aksi sadar dan menerima pola yang

sudah dipraktikkan. Sebuah pola Win-win solution tingkat tinggi sedang dipraktikkan oleh Pemimpin dengan para Tokoh Agama Islam di Negeri ini.

d. Kesimpulan

Kuasa Bahasa sepertinya sedang dibuktikan mampu berperan dalam dinamika kebangsaan di Indonesia. Memunculkan gejolak, meredam gejolak, memunculkan isu, meredam isu, melakukan langkah agitasi, langkah preventif adalah bagian dari kuasa bahasa dalam ranah ini, kekerasan bisa saja didorong oleh kuasa bahasa dalam konteks dinamika kebangsaan seperti yang terjadi saat ini, namun jika hati tetap sejuk dan pikiran tetap jernih serta tujuan betul-betul untuk perbaikan dan kemulyaan, maka bahasa santun akan mendorong menciptakan iklim yang kondusif dan dapat diterima oleh semua lapisan. Sebaliknya, jika hati sudah dipatri dengan kekuatan egosentrisme yang mendarah daging, maka kuasa bahasa akan mengarahkan suatu tindakan yang sejatinya mulya ke ranah *Truth Claim* (Klaim Kepercayaan) dan *Lonely Claim* (Klaim Kepemilikan) yang berlebihan sehingga tujuan mulyapun bisa menjadi bom waktu bagi kredibilitas Agama yang notabene Rahmatan Lil ‘Alamin ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Chaer, Abdul. 1994. *Linguistik Umum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Chaer, Abdul dan Leonie Agustina. 2004. *Sosiolinguistik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Chomsky, N. 1965. *On Nature and language*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Dwi Purnomo, Maslathif. 2013. *Semantics*, in Linguistics. Medan; Fakultas Tarbiyah, IAIN Sumatera Utara (Unpublished Diktat)
- Eriyanto, 2001. *Analisis wacana; Pengantar Analisis teks Media*. Yogyakarta. LKiS
- Fairclough, Norman (2003). *Analyzing Discourse: Textual Analysis for Social Research*. London: Routledge.
- Fishman, Joshua A. 1991. *Sosiologi Bahasa*. Kuala Lumpur: Universitas Sains Malaysia Pulau Pinang.
- Halliday, 1971. *Language as social semiotics*. Open University Set Book. London
- Kempson, R. 1977. *Semantic Theory*. London: Cambridge University Press.
- Leech, G. 1981. *Semantic*. London: Penguin Books.
- Longe, V.U. 1995. *Studies in the varieties of language*.

Benin City: Head Mark Publishers

Munsiy, Alif Danya. 2005. *Bahasa Menunjukkan Bangsa*. Jakarta: KPG.

Ogbulogo, C. (2004). *Concepts in semantics*. Lagos: Sam Iroanusi Publications

Rahardjo, Mudjia. .2003. *Relung-Relung Bahasa: Bahasa dalam wacana politik Indonesia kontemporer*, Yogyakarta: Aditya Media

----- . 2004. *Wacana Kebahasaan*. Malang. Cendikia Paramulya

Rankema, Jane. 2004. *An Introduction to Discourse Studies*. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.

Saragih, Amrin, 2012. *Discourse Analysis (A systemic Functional Linguistics)*, Faculty of Tarbiyah IAIN SU. Medan

Sumarlam. 2012 *Analisis Wacana: Teori dan Praktik*. Surakarta: Pustaka Cakra

Soemarsono. 2002. *Sosiolinguistik*. Bandung: Pustaka Pelajar

Sobur. Alex. 2012. *Analisis Teks Media*. Bandung. Remaja Rosda Karya

TENTANG PENULIS



Maslathif Dwi Purnomo lahir pada tanggal 12 Mei 1982 di Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur Dari pasangan H. Asmuly dan Hj. Siti Masrifah. Pendidikan Dasar diselesaikannya di MI Hidayatul Ummah Pringgoboyo pada tahun 1994, dan MTs juga di almamater yang sama pada tahun 1997. Setelah lulus dari MA Negeri Lamongan dan Pondok Pesantren Roudlotul Qur'an Lamongan pada tahun 2000, ia kemudian melanjutkan studi S1 nya di STAIN Malang (Sekarang UIN Maliki Malang), dengan mengambil jurusan Bahasa dan Sastra Inggris, pemuda yang semasa kuliahnya aktif berorganisasi di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) ini berhasil lulus sebagai lulusan angkatan pertama UIN Malang (semenjak berubah dari STAIN Malang) pada tahun 2004.

Bulan Januari 2005 ia berangkat ke Medan ditugaskan oleh UIN Malang untuk mengabdikan menjadi tenaga pengajar di Pesantren Modern Al-Kautsar Al-Akbar Medan Sumatera Utara dibawah pimpinan Syech Ali Akbar Marbun, dipercaya menjadi Kepala MTs di

Pesantren tersebut dari tahun 2005 sampai dengan 2011, ia kemudian melanjutkan pendidikan Strata 2 nya di Universitas Negeri Medan (UNIMED) pada tahun 2007 dan selesai tahun 2009 dengan karya thesisnya "*Speech Acts Used by Street Children in Medan*". Tahun 2010 ia diterima menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan tugas utama sebagai Dosen Linguistik di IAIN Sumatera Utara (sekarang UIN Sumatera Utara).

Beberapa forum ilmiah berskala lokal, nasional dan internasional telah diikutinya, antara lain sebagai pembicara pada *International Seminar on Applied Linguistics* di Medan tahun 2012, *International Conference on Humanity History and Society (ICHHS)* di Bangkok Thailand tahun 2012, *Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS)* di Surabaya tahun 2013. *International Conference on Linguistics (ICL)* di Kuala Lumpur Malaysia tahun 2014. Dipecaya menjadi Ketua Implementasi Program *Australia's Education Partnership with Indonesia* (AusAid) Wilayah Sumatera Utara dari tahun 2012 sampai dengan 2016 menjadikan ia sangat aktif dalam pendampingan Madrasah khususnya di Sumatera Utara. saat ini ia tercatat sebagai Master Trainer Nasional Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Disela-sela aktifitas yang sangat padat, dosen muda penerima *Grant Pegabdian Masyarakat Berbasis Madrasah* yang telah terpilih menjadi delegasi UIN Sumut untuk Indonesia dalam program Short Course

on Higher Education Management di The University of Newcastle, Australia pada tahun 2015 ini masih menyempatkan diri untuk aktif menulis tentang Bahasa Politik dan diterbitkan di beberapa Media cetak. Ia selalu konsern dalam menganalisa Bahasa Politik khususnya dalam dinamika politik Nasional Indonesia, Beberapa karya tulisnya telah diterbitkan di jurnal ilmiah berskala lokal, Nasional maupun Internasional antara lain: *Violence, Extremism and Terrorism in Indonesia; a Case Study on Terrorism Acts in Indonesia Durin 2000 until 2011* (IPDR Journal, Singapore. 2012 Vol. 34), *The Power of Language on The Social, Politics and Cultural Events* (Journal of Tarbiyah IAIN SU, 2013), *Sexism Language on The Contemporary Linguistics Perspective* (Proceeding of AICIS, 2013. IAIN Sunan Ampel Surabaya) *Critical Thinking Method to The Study of Semantics in Higher Education* (Proceeding of ICL 2014, Kuala Lumpur Malaysia). Pada tahun 2015 ia telah menerbitkan satu buku dengan judul *Genre Approach to The Student's Achievement in Writing Narrative Text at MTs Al-Kautsar Al-Akbar Medan*.

